



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2023



BUPATI FAKFAK
UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si

WAKIL BUPATI FAKFAK
YOHANA DINA HINDOM, SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024



BUPATI FAKFAK



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia dan perkenaan-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penyelenggaraan Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah dari tahun ketahun mengalami pergeseran paradigma yang akan berimplikasi terhadap kualitas tugas pokok pemerintah itu sendiri, yakni terlaksananya pelayanan kepada masyarakat menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka sudah selayaknya penerapan Otonomi Daerah wajib dilaksanakan dengan optimal sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*. Untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah wajib mengoptimalkan program dan kegiatan yang sifatnya prioritas melalui berbagai pendekatan dan strategi dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di daerah dengan mengembangkan inisiatif, prakarsa dan kreativitas daerah, baik melalui kebijaksanaan perencanaan program maupun aspek kebijaksanaan keuangan daerahnya, sehingga mampu mendorong percepatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran otonomi daerah yakni mensejahterakan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, wajib hukumnya untuk setiap Pemerintah Daerah melaporkan realisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing sebagai bentuk akuntabilitas kepada berbagai pihak yang berkompeten secara transparan terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di suatu wilayah atau daerah otonom melalui penerapan *good governance* demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Adanya Indikator Kinerja Kunci yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LPPD sesungguhnya telah menyuguhkan potret riil terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan *Good Governance*. Oleh karena itu, presentase pemanfaatan dana yang masuk dalam suatu daerah otonom akan menggambarkan integritas moral pengambil kebijakan di daerah terkait sejauh mana tingkat kepedulian terhadap kesejahteraan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

masyarakat. Melalui LPPD ini pula akan terlihat secara jelas besaran dan presentase pemanfaatan dana yang digunakan untuk belanja aparatur dan yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang sifatnya prioritas.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan data serta informasi, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Fakfak, 28 Maret 2024


BUPATI FAKFAK,
UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan	11
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	135
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH	138
2.1 Capaian Kinerja Makro	138
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	138
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	139
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	179
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	190
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	193
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	218
3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan	220
3.1.1 Target Kinerja	220
3.1.2 Realisasi	220
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan	224
3.2.1 Realisasi	224
3.3 Permasalahan dan Kendala	227
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	227
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	
PELAYANAN MINIMAL	228
4.1 Urusan Pendidikan	228
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	228
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	229
4.1.3 Realisasi	229
4.1.4 Alokasi Anggaran	230
4.1.5 Dukungan Personil	230
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	230
4.2 Urusan Kesehatan	231
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	231
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	231
4.2.3 Realisasi	232
4.2.4 Alokasi Anggaran	233
4.2.5 Dukungan Personil	234
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	234
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	235
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	235
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	235
4.3.3 Realisasi	236



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4.3.4 Alokasi Anggaran	236
4.3.5 Dukungan Personil	236
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	237
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	237
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	237
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	237
4.4.3 Realisasi	238
4.4.4 Alokasi Anggaran	239
4.4.5 Dukungan Personil	239
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	239
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	240
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	240
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	240
4.5.3 Realisasi	241
4.5.4 Alokasi Anggaran	242
4.5.5 Dukungan Personil	242
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	243
4.6 Urusan Sosial	244
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	244
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	244
4.6.3 Realisasi	245
4.6.4 Alokasi Anggaran	245
4.6.5 Dukungan Personil	246
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	246
4.7 Program dan Kegiatan	247
BAB V PENUTUP	252
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Distrik, Ibu Kota Distrik Dan Luas Wilayah	4
Tabel 1.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Fakfak Per Distrik Menurut Jenis Kelamin	5
Tabel 1.3 Nama Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Fakfak	6
Tabel 1.4 Program Dan Kegiatan	38
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak	138
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kabupaten Fakfak Tahun 2023	194
Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja	197
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2022-2023	202
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Tiap-Tiap Misi	214
Tabel 2.6 Program Dan Anggaran Tahun 2023	215
Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan	222
Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan	225
Tabel 4.1 Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Fakfak Tahun 2023	229
Tabel 4.2 Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023	229
Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2023	230
Tabel 4.4 Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023	231
Tabel 4.5 Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023	233
Tabel 4.6 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2023	234
Tabel 4.7 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	235
Tabel 4.8 Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	236
Tabel 4.9 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	236
Tabel 4.10 Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023	237
Tabel 4.11 Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023	238
Tabel 4.12 Target Dan Capaian Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:22/Permen/M/2008	239
Tabel 4.13 Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023	239
Tabel 4.14 Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023	241
Tabel 4.15 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023	241
Tabel 4.16 Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023	242
Tabel 4.17 Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023	244
Tabel 4.18 Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023	245
Tabel 4.19 Alokasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2023	245



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Peta Kabupaten Fakfak	2
---------------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097) merupakan dasar bermula pembentukan Pemerintahan Daerah di Tanah Papua atau pada saat itu dikenal dengan Irian Barat. Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi rujukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan dilaksanakan oleh Pihak Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dengan berdasarkan prinsip Kedaulatan Rakyat berasas otonomi dan tugas pembantuan.

Maka dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan Pemerintahan mulai pada tingkat Pusat sampai ke Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu bentuk *Progress Report* pelaksanaan teknis pemerintah yang menjadi kewajiban Kepala Daerah serta perangkatnya dan dilaporkan secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat sesuai amanat perundang-undangan berdasarkan transparansi dan akuntabel.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

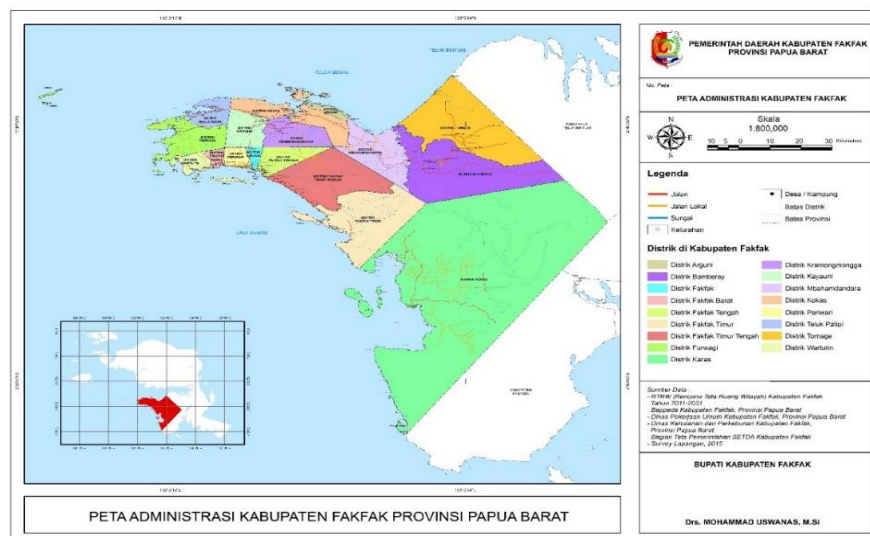
1. Pembentukan Kabupaten Fakfak berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097), termasuk didalamnya Kabupaten Fakfak;
2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengacu pada:

- a) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d) Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2024 Tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Fakfak yang merupakan salah satu Kabupaten Tertua di Tanah Papua dan memiliki ragam aneka sosial dan budaya yang telah terintegrasi sejalan dengan perkembangan zaman menjadi suatu potensi serta daya tarik khusus dalam identitas Kabupaten Fakfak, adapun Peta Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

Gambar 1
Peta Kabupaten Fakfak



(Sumber : BP4D Kab. FAKFAK tahun 2023)



1. Letak Geografis

Kabupaten Fakfak secara geografis dibatasi oleh garis bujur dan garis lintang, yaitu terletak pada 1310°30'-1380°40' BT dan 2°25'-4°000' LS dengan ketinggian antara 0-100 meter dari permukaan laut. Dengan kondisi bukit dan berlembah sehingga termasuk kategori medan sedang.

2. Batas Administrasi

Adapun batas-batas fisik daratan dan lautan wilayah Kabupaten Fakfak adalah, sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Laut Seram dan Teluk Berau
2. Sebelah Timur : Kabupaten Kaimana
3. Sebelah Utara : Kabupaten Teluk Bintuni
4. Sebelah Selatan : Laut Arafuru dan Kabupaten Kaimana

(Sumber : Kabupaten Fakfak Dalam Angka Tahun 2023)

3. Luas Wilayah

Kabupaten Fakfak memiliki luas wilayah administrasi seluas 14.320 Km², terdiri dari 17 (tujuh belas) distrik, 142 (seratus empat puluh dua) kampung dan 7 (tujuh) kelurahan, dimana dari 17 (tujuh belas) distrik tersebut terdapat 8 (delapan) distrik pemekaran baru berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012, dan dari 142 (seratus empat puluh dua) kampung terdapat 25 (dua puluh lima) kampung baru yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012, distrik-distrik dan kampung pemekaran tersebut telah disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Secara geografis posisi dan letak wilayah distrik serta wilayah kampung yang ada pada tiap distrik terpencar antara distrik satu dengan distrik lainnya dengan tingkat kesulitan jangkauan beragam, selanjutnya terkait dengan luas masing-masing wilayah di 17 (Tujuh Belas) distrik di Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 1.1

Nama Distrik, Ibu Kota Distrik dan Luas Wilayah

NO	NAMA DISTRIK	NAMA IBUKOTA DISTRIK	LUAS WILAYAH (km ²)
1.	Fakfak	Fakfak	233
2.	Fakfak Timur	Weri	1.020
3.	Fakfak Barat	Werba	679
4.	Kokas	Kokas	788
5.	Fakfak Tengah	Raduria	705
6.	Karas	Malakuli	2.491
7.	Kramongmongga	Kramongmongga	746
8.	Teluk Patipi	PatipiPasir	786
9.	Bomberay	Onim Sari	1.023
10.	Pariwari	Dulanpokpok	587
11.	Wartutin	Wartutin	1.006
12.	Fakfak Timur Tengah	Krabelang	701
13.	Arguni	Fior	334
14.	Mbamdandara	Goras	664
15.	Kayauni	Kayuni	732
16.	Furwagi	Rumbati	938
17.	Tomage	Tomage	887
JUMLAH			14.320

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Fakfak Tahun 2023

Dari tabel di atas Distrik Karas memiliki wilayah terluas sedangkan Distrik Fakfak sebagai ibu kota Kabupaten Fakfak memiliki wilayah terkecil hal ini disebabkan oleh pembagian wilayah (pemekaran distrik) menjadi 2 (dua) bagian dengan Distrik Pariwari.

4. Topografis

Topografis atau kondisi permukaan tanah di Kabupaten Fakfak sangat bervariasi, terdapat dataran rendah, dataran tinggi sampai dengan daerah perbukitan dengan rincian sebagai berikut:

- Dilihat dari aspek ketinggian, maka luas wilayah Kabupaten Fakfak dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. 0-100 m seluas : 1.192.132 Ha
 - b. >100-500 m seluas : 328.109 Ha
 - c. >500-100 m seluas : 284.301 Ha
 - d. ≥ 1000 m seluas : 250.058 Ha
 - Jumlah : 2.054.600 Ha
- Dilihat dari aspek lereng/kemiringan, dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. 0-15 °seluas : 1.434.636 Ha
 - b. 15-40°seluas : 57.500 Ha



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

c. >40°seluas : 2.297.964 Ha

Jumlah : 3.790.100 Ha

Dari data tersebut maka dapat diasumsikan bahwa Kabupaten Fakfak merupakan daerah dengan kondisi topografis tingkat kesulitan medan sedang (Sumber : Kabupaten Fakfak Dalam Angka 2023).

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada **Tahun 2023** penduduk yang berada di Kabupaten Fakfak bertambah dari tahun sebelumnya, yang jumlah total sebanyak **89.319** jiwa meningkat menjadi **91.453** jiwa yang terinci dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak **46.728** jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak **44.725** jiwa. Adapun komposisi penduduk pada 17 (tujuh belas) Distrik di Kabupaten Fakfak Tahun 2023 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Fakfak Per Distrik
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Nama Distrik	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
1	Fakfak	9.035	8.688	17.723
2	Fakfak Barat	1.865	1.792	3.657
3	Fakfak Timur	729	699	1.428
4	Kokas	2.284	2.176	4.460
5	Fakfak Tengah	7.197	6.887	14.084
6	Karas	1.651	1.575	3.226
7	Bomberay	1.264	1.068	2.332
8	Kramongmongga	1.136	1.103	2.239
9	Teluk Patipi	2.210	2.145	4.355
10	Pariwari	12.336	11.832	24.168
11	Wartutin	1.167	1.153	2.320
12	Fakfak Timur Tengah	1.486	1.427	2.913
13	Arguni	668	579	1.247
14	Mbahamdandara	556	584	1.140
15	Kayauni	975	965	1.940
16	Furwagi	897	856	1.753
17	Tomage	1.272	1.196	2.468
Total		46.728	44.725	91.453

(Sumber : Disdukcapil Kab. Fakfak Tahun 2023)

d. Jumlah Distrik dan Kampung/Kelurahan

Kabupaten Fakfak memiliki luas wilayah administrasi seluas 14.320 Km², terdiri dari 17 (tujuh belas) Distrik, 142 (seratus empat puluh dua) kampung dan 7 (tujuh) Kelurahan, dimana dari 17 (tujuh belas) Distrik tersebut terdapat 8



(delapan) distrik pemekaran baru berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012, dan dari 142 (seratus empat puluh dua) kampung terdapat 25 (dua puluh lima) kampung baru yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012, distrik-distrik dan kampung pemekaran tersebut telah disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Berikut ini nama-nama 17 (tujuh belas) distrik, 7 (tujuh) kelurahan dan 142 (seratus empat puluh dua) kampung di Kabupaten Fakfak:

Tabel 1.3

Nama Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Fakfak

No	Distrik	Kelurahan	Kampung
1	Fakfak	Fakfak Selatan	Gewerpe
		Fakfak Utara	Lusiperi
			Wrikapal
2	Fakfak Barat		Werba
			Kiat
			Purwasak
			Wurkendik
			Kwuhkendak
			Purwahab Tonggo
			Pahger Nkindik
			Werba Utara
			Porum
3	Fakfak Timur		Tunas Gain
			Urat
			Sanggram
			Weri
			Kiriabisa
			Saharei
4	Kokas	Kokas Kota	Mandoni
			Sekar
			Ugar
			Sisir
			Kampung Baru
			Patimburuk
			Batufiafas
			Kinam
			Mambunibuni
			Kriawaswas
			Sosar
			Pang Wadar
			Masina
			Kimina Kra
5	Fakfak Tengah	Danaweria	Kayu Merah
			Ketemba
			Nemewikarya
			Raduria
			Brongkendik
			Air Besar
			Mandopma
			Kanantare
			Pasir Putih



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

No	Distrik	Kelurahan	Kampung
			Pirma
			Sakartemin
			Hambriangkendik
			Unipokpok
6	Karas		Malakuli
			Faur
			Kiaba
			Antalisa
			Tarak
			Tuberwasak
			Mas
7	Bomberay		Onim Sari
			Mekar Sari
			Pinang Agung
			Bumi Muroh Indah
			Tesha
			Onim Jaya
			Wonorejo
8	Kramongmongga		Kramongmongga
			Wargeb
			Mamur
			Nembukteb
			Pikpik
			Kwamkwamur
			Bahbadan
			Gewab
			Tentreda
			Mbaham Ma Youn
9	Teluk Patipi		Puar
			Degen
			Tetar
			Sum
			Adora
			Us
			Patipi Pasir
			Patipi Pulau
			Mawar
			Tibatibananam
			Offie
			Muhri
			Bisa
10	Pariwari	Wagom	Tanama
		Wagom Utara	Kapaurtutin
		Dulanpokpok	Sekban
			Torea
			Sekru
			Sukuru Tuare
11	Wartutin		Werpigan
			Werabuan
			Wartutin
			Siboru
			Sipatnanam
			Kamandu Tetar
12	FakfakTimur Tengah		Waserat
			Wambar
			Kotam
			Kwama
			Kalamanuk



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

No	Distrik	Kelurahan	Kampung
			Wayati Timur
			Wayati
			Wayati Barat
			Krabelang
			Wambar Timur
13	Arguni		Andamata
			Taver
			Arguni
			Fior
			Furir
14	Mbahamdandara		Darembang
			Goras
			Mitimber
			Waremu
			Wos
			Mbahamdandara
			Goras Selatan
15	Kayauni		Kaburbur
			Ubadari
			Homorkokma
			Pattukar
			Kayauni
			Kuagas
			Rangkendak
			Mananmur
			Warpa
16	Furwagi		Salakiti
			Tawar
			Gar
			Rumbati
			Wefra
			Tanehamur
			Sengkiti
			Twootkindik
17	Tomage		Mbima jaya
			Warisa Mulya
			Wonodadi Mulya
			Tomage
			Otoweri
			Wamosan
			Salawir
			Wasa Mulya
			Wammar
			UPT I Tomage

(Sumber Data: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Fakfak Tahun 2023)

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Fakfak menyatakan perangkat daerah di Kabupaten Fakfak berjumlah 47 organisasi perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,



Inspektorat, 20 (dua puluh) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) kantor Satpol PP, 1 (satu) UPT RSUD dan 17 (tujuh belas) Distrik, dengan komposisi pegawai (PNS/ASN) yang ditempatkan disetiap OPD berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 berjumlah 4.473 jiwa. Adapun data penempatan pegawai secara rinci dapat dilihat pada lampiran laporan ini.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

 PEMERINTAH KABUPATEN FAK FAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.475.288.540.423,00	1.321.077.468.354,95	89,55	180.581.663.380,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.635.103.931,00	42.854.562.357,95	67,34	41.396.101.541,36
4.1.01	Pajak Daerah	8.175.986.365,00	9.024.204.467,00	110,37	9.074.850.159,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.437.297.557,00	3.365.216.122,00	97,90	9.535.591.852,38
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.299.000.024,00	4.169.644.947,00	66,20	4.227.188.490,46
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.722.819.985,00	26.295.496.821,95	57,51	18.558.471.039,52
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.411.653.436.492,00	1.278.222.905.997,00	90,55	139.185.561.839,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.402.403.067.260,00	1.263.498.862.263,00	90,10	139.185.561.839,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.009.024.154.912,00	931.667.078.129,00	92,33	20.840.944.839,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	275.469.539.348,00	280.193.556.334,00	101,71	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	117.909.373.000,00	51.638.227.800,00	43,79	118.544.617.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.250.369.232,00	14.724.043.734,00	159,17	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	9.250.369.232,00	14.724.043.734,00	159,17	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.592.894.105.914,00	1.392.788.569.976,79	87,44	1.237.090.585.880,40
5.1	BELANJA OPERASI	1.095.804.321.611,00	990.607.530.931,05	90,40	906.694.409.097,40
5.1.01	Belanja Pegawai	478.334.782.592,00	456.578.017.331,00	95,45	421.118.378.833,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.143.329.214,00	465.047.899.710,05	87,06	428.629.558.303,40
5.1.05	Belanja Hibah	62.962.743.805,00	50.871.256.390,00	80,80	40.838.781.821,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.363.466.000,00	18.110.357.500,00	88,94	16.107.690.140,00
5.2	BELANJA MODAL	301.837.979.123,00	274.768.627.573,74	91,03	211.851.559.783,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.340.015.500,00	2.220.170.500,00	66,47	22.478.353.693,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.509.063.941,00	52.401.468.114,00	88,06	48.401.774.807,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.141.219.903,00	95.937.484.162,74	88,72	50.184.197.090,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.300.079.279,00	123.090.729.797,00	95,20	88.663.428.276,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.447.600.500,00	1.018.800.000,00	70,38	2.123.805.917,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.975.000,00	99,98	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.107.285.887,00	13.131.365.920,00	93,08	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.107.285.887,00	13.131.365.920,00	93,08	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	181.144.519.293,00	114.281.045.552,00	63,09	118.544.617.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	181.144.519.293,00	114.281.045.552,00	63,09	118.544.617.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(117.605.565.491,00)	(71.711.101.621,84)	0	(1.056.508.922.500,04)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.605.565.491,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	118.605.565.491,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	117.605.565.491,00	(1.000.000.000,00)	-0,85	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(72.711.101.621,84)	0	(1.056.508.922.500,04)

(Sumber data : BPKAD Kab. Fakfak dalam LRA per 18 Maret 2024)



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Proses Penyusunan Rencana Pelaksanaan serta Evaluasi Pembangunan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai produk legal, RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan tersebut secara yuridis formal dapat dipertanggung jawabkan serta mengikat semua pihak dan menjadi dokumen publik.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pembangunan Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan berpedoman pada tahapan RPJMD ke-3 (2021-2026) yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Fakfak. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang dijabarkan lebih spesifik dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan menekankan delapan issue strategis meliputi (1) reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; (2) Kemiskinan dan Pengangguran; (3) Kualitas Pendidikan Masyarakat; (4) Kualitas Layanan Kesehatan; (5) Rendahnya Pengembangan Wilayah-wilayah Strategis Cepat Tumbuh Daerah; (6) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; (7) Pengembangan Investasi, Koperasi dan Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM); (8) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Konektifitas Wilayah. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul dan mandiri.

Namun demikian penuntasan delapan isu strategis diatas bukanlah perkara mudah, mengingat kondisi sosiokultural dan perekonomian masyarakat selalu bergerak dinamis. Dengan demikian, maka diperlukan strategi upaya penyesuaian kebutuhan dan optimalisasi potensi serta



sumberdaya untuk menghadapi tantangan dan mengatasi permasalahan strategis yang menjadi kendala pencapaian target pembangunan daerah dalam kerangka mewujudkan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan domestik (*pro-growth*), penciptaan dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*), mempercepat penurunan kemiskinan (*pro-poor*), dan ramah lingkungan (*pro-environment*). Sehingga perlu ada upaya yang dilakukan agar permasalahan daerah yang terjadi mulai dari meningkatnya kesenjangan serta ketimpangan baik kesenjangan ekonomi, kesenjangan antar penduduk maupun kesenjangan antar wilayah, dapat diatasi. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi serta kebijakan yang lebih tepat, terpadu, holistik dan komprehensif dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi. Implementasi program Gerbang Fajar dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun sesuai Visi dan Misi dalam RPJMD 2021-2026, yang diuraikan dalam program unggulan antara lain : pengembangan sumber daya alam berbasis kampung (*one village one product*), Fakfak Banjir, Fakfak Terang, Pengembangan Ekonomi mikro daerah, penyediaan sarana dan prasarana Infrastruktur dasar, dan peningkatan konektivitas kewilayahan, serta pembangunan pariwisata terintegrasi.

Dengan memaksimalkan peluang dan letak strategis Kabupaten Fakfak serta potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten ini maka sangat berpeluang untuk menjadi daerah maju yang berdaya saing. Tata kelola pemerintahan yang baik yang mengisyaratkan adanya aparat pemerintah yang mampu dan mau memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat serta dibutuhkan sinergitas antar pemerintah, masyarakat serta dunia usaha. Dalam memacu akselerasi pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur wilayah yang berperan sebagai triger pertumbuhan yang mampu menstimulasi berbagai kegiatan sektor maupun antar sektor terutama berkaitan dengan ekonomi baik hulu maupun hilir. Sebab disparitas antar wilayah maupun antar sektor menjadi salah satu pemicu ekonomi biaya tinggi sehingga semakin memperberat daya saing serta menghambat tumbuhnya kegiatan di sektor riil dan masuknya arus investasi ke daerah.

Landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Prov. Papua Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Prov. Papua Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Prov. Papua Barat Tahun 2017 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Fakfak.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Analisis lingkungan strategis sangat penting artinya dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan, terutama dalam penetapan kebijaksanaan sebagai arah dan langkah yang akan membawa kita kepada tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan strategis yang tepat dan dapat dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan *output*, *outcome*, dan *benefit* yang maksimal dan luas. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian yang mendalam terhadap kondisi obyektif wilayah Kabupaten Fakfak permasalahan strategis dalam pembangunan Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Ditingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung

Kualitas sumber daya aparatur sangat berpengaruh terhadap kompetensipelayanan publik selain itu kondisi yang dihadapi saat ini yaitu masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik internal, eksternal termasuk pengawasan masyarakat dan sistem pertanggung jawaban publik. Pada tingkat Distrik dan Kampung pendelegasian kewenangan yang diberikan tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur baik di tingkat pemerintahan Kampung



maupun Distrik sehingga pengelolaan pembangunan di Kampung dan Distrik belum berjalan optimal. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi aparatur serta lemahnya sumber daya manusia menjadi tantangan yang harus diperbaiki kedepan. Pada sisi lain kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah masih ditemui adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKPD baik dipusat maupun di daerah sehingga menimbulkan ketidak sinkronan dalam pelaksanaan tugas. Kurangnya koordinasi antar SKPD juga merupakan masalah yang sering dihadapi karena masih adanya ego sektoral yang cenderung tampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Lemahnya koordinasi antar SKPD menyebabkan masalah pembangunan yang seharusnya dilakukan secara lintas sektoral diselesaikan secara parsial. Sehingga terkesan program dan kegiatan tersebut tidak berjalan sinergis. Pada tingkat kelembagaan birokrasi masih ditemukan permasalahan terutama terkait dengan sumber daya aparatur yang masih rendah serta institusi birokrasi yang belum efektif baik struktur maupun kultur. Langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah merestrukturisasi kelembagaan Pemerintah Daerah agar lebih efisien dan efektif serta penciptaan sejumlah regulasi dan tata kelola yang lebih baik.

2. Kualitas Pelayanan Publik yang Rendah

Kualitas pelayanan publik yang rendah selain disebabkan terbatasnya kualitas sumber daya manusia, juga belum adanya standar pelayanan publik sebagai instrumen dalam menentukan standar pelayanan yang diberikan oleh setiap SKPD. Selain itu pula kultur birokrasi yang masih berorientasi pada dilayani bukan melayani sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan. Sementara itu pada sisi lain pemahaman terhadap tugas pokok serta fungsi setiap SKPD masih rendah serta masih tingginya ego setiap SKPD dalam memahami tugas pokok dan fungsi.

3. Rekrutmen serta Promosi Pegawai Negeri yang Belum Sepenuhnya Mengacu pada Aturan yang Ada

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu pola rekrutmen pegawai serta promosi masih belum mempertimbangkan secara cermat analisis kebutuhan beban kerja, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan serta masih



ditemui adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensinya.

4. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu agenda utama yang harus segera dicarikan solusinya. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang selalu saling terkait dan berkorelasi positif antara satu dengan yang lain dan apabila tidak tertangani secara efektif maka dapat berdampak pada masalah sosial lainnya. Masalah kemiskinan dan pengangguran ini juga disebabkan berbagai hal seperti kurang terkelolanya potensi sumber daya yang ada sehingga menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat rendah yang berdampak pada pendapatan serta daya beli. Selain itu terbatasnya lapangan kerja juga dipengaruhi oleh kurangnya kegiatan investasi di daerah. Oleh karena itu berbagai kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPS (tahun 2018) angka kemiskinan di Kabupaten Fakfak masih cukup tinggi yaitu sebesar 23,25% dan sebaran penduduk miskin di Kabupaten Fakfak sebagian besar berada di Kampung-kampung. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh lapangan kerja, terbatasnya kemampuan berusaha yang disebabkan oleh terbatasnya ketrampilan serta akses modal dan juga masih rendahnya dukungan investasi di daerah yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Disisi lain beberapa faktor eksternal juga telah memberi sumbangsi terhadap meningkatnya angka kemiskinan seperti kenaikan harga BBM yang berdampak pada inflasi sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui beberapa kebijakan, strategi serta program melalui kebijakan pengalihan subsidi BBM kepada sektor yang lebih produktif terutama di bidang pendidikan, kesehatan melalui program KIS, KIP dan KSK namun belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan serta



strategi yang lebih tepat serta komprehensif melalui program-program yang lebih bersifat jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang difokuskan pada perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta program-program pemberdayaan ekonomi. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin menjadi penting karena akan mendudukkan mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan posisi awal masyarakat miskin lebih berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari beban (*liabilities*) menjadi potensi (*assets*). Berbagai proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut diatas, perlu didukung oleh perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang *pro-poor* termasuk tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Terbatasnya Kemampuan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Ekonomi, Potensi Ekonomi Kabupaten Fakfak Cukup Besar Terutama Dibidang Pertanian.

Perkebunan, perikanan serta pertambangan namun pengelolaannya masih sangat terbatas. Keterbatasan pengelolaan potensi ekonomi selain disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung usaha seperti modal, peralatan serta manajemen usaha, juga pada sisi lain masih rendahnya etos kerja yang berpengaruh terhadap tingkat produktifitas. Hal ini menyebabkan skala usaha masih kecil dan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sementara itu pola usaha ekonomi masyarakat belum didukung oleh kemampuan mengadopsi teknologi tepat guna sehingga masih menggunakan cara-cara tradisional. Kondisi ini menyebabkan tingkat produksi relatif kecil sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan maupun kesejahteraan yang masih rendah. Selain itu dari sisi kualitas juga masih rendah karena belum didukung oleh sistem pengolahan pascapanen. Sementara itu pengelolaan potensi ekonomi di Kabupaten Fakfak belum sepenuhnya didukung oleh investasi



dan hanya beberapa kawasan seperti kawasan Bomberay yang sudah dikelola oleh pihak swasta yaitu penanaman kelapa sawit sedangkan pada kawasan lainnya belum ada kegiatan investasi.

6. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendidikan

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Fakfak masih menjadi permasalahan yang belum tuntas diselesaikan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan tersebut. Dengan tingkat aksesibilitas serta kondisi geografis daerah yang ada menyebabkan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan cukup mahal. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Fakfak tetap memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan.

7. Distribusi Guru yang Tidak Merata

Jumlah ketersediaan guru di Kabupaten Fakfak pada semua jenjang pendidikan baik SD, SLTP maupun SLTA sesuai dengan rasio pada dasarnya telah mencukupi. Namun demikian kondisi yang sering dihadapi yaitu adanya kekurangan guru terutama di Kampung-Kampung. Kenyataan yang dihadapi pada sekolah-sekolah tertentu jumlah guru mencukupi bahkan melebihi, sedangkan pada sekolah lain terutama di Kampung-Kampung jumlah guru pada sekolah baik di tingkat SD, SLTP maupun SLTA sangat kurang serta tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan rasio guru terhadap murid tidak berimbang sehingga mempengaruhi efektifitas belajar mengajar di sekolah.

8. Rendahnya Kualitas serta Akses Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan memegang peran yang sangat esensial. Untuk itu diperlukan kebijakan maupun strategi pengembangan pendidikan yang berkualitas serta berkarakter sebagai bagian dari Revolusi karakter Bangsa (Revolusi Mental) yang merupakan salah satu agenda prioritas dalam Nawa Cita Pemerintahan saat ini. Terdapat tiga variabel penting dalam pengelolaan pendidikan yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh yaitu (1) guru sebagai pengajar (2) Murid sebagai anak didik (3) Lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh. Pembangunan



bidang pendidikan di Kabupaten Fakfak selama ini telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Fakfak yang terus mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 IPM Kabupaten Fakfak sebesar 66,99 point meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 66,09. Peningkatan ini lebih tinggi dari Kabupaten pemekaran dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Beberapa variabel sebagai determinan penentu IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2018 sebesar 68,12 tahun lebih tinggi dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 67,95 point. Sedangkan Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2018 yaitu sebesar 98,57% lebih tinggi dibanding AMH tahun 2017 yaitu sebesar 98,50%. Sementara itu komponen rata-rata lama sekolah sebagai determinan IPM tahun 2018 yaitu 8,51 tahun partisipasi baik kasar maupun murni masih lebih tinggi untuk sekolah dasar dibandingkan pada tingkat SMP ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usia sekolah SMP di Kabupaten Fakfak yang tidak bersekolah. Sementara APK untuk tingkat SD sudah mencapai 119,90% artinya sudah lebih dari 95% penduduk usia SD yang sudah bersekolah. Namun jika dilihat dari APM angkanya masih 75,99% artinya masih banyak anak sekolah di SD yang usianya sudah bukan usia SD lagi.

9. Rendahnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia pendidik. Walaupun kualitas tenaga pendidik bukan satu-satunya variabel penentu kualitas pendidikan seseorang karena ada beberapa variabel lainnya seperti murid, ketersediaan sarana dan prasarana serta orang tua serta lingkungan yang juga memberi andil dalam menentukan kualitas seseorang, tetapi kualitas tenaga pendidik merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas murid yang menjadi didikannya. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak (2016) jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi sarjana (S2) yaitu sebanyak 158 orang, sarjana (S1) sebanyak 272 orang serta diploma 382 orang. Sementara itu jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi yaitu sebanyak 526 orang sedangkan yang belum memiliki sertifikasi yaitu sebanyak 1.617 orang.



10. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kesehatan

Permasalahan pokok kesehatan di Kabupaten Fakfak yaitu belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah, murah serta terjangkau. Sebagai implikasi kurang optimalnya fungsi dan peran sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan yang murah serta terjangkau. Selain itu kapasitas sumber daya tenaga kesehatan juga masih sangat terbatas, sementara itu beberapa indikator lainnya juga menunjukkan tingkat pelayanan masih rendah ditunjukkan oleh masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta masih tingginya prevalensi penyakit seperti malaria, ISPA serta HIV-AIDS yang cukup tinggi.

11. Adat, Budaya dan Kehidupan Beragama

Sejarah mencatat bahwa Kabupaten Fakfak telah dikenal sejak zaman Majapahit, dan telah menjadi pusat serta simpul dari berbagai bangsa serta budaya. Sebagai kota bersejarah, Kabupaten Fakfak telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah terutama pala dan kayu masohi yang sudah diperdagangkan sejak tahun 1856. Dengan geografis wilayah yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten di Papua Barat serta Maluku, maka daerah ini sejak lama telah dikenal serta telah terjadi hubungan sosial yang sangat kuat serta menjadi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Budaya satu tungku tiga batu satu hati satu saudara merupakan bukti bahwa masyarakat Fakfak merupakan masyarakat yang pluralis serta toleran terhadap sesama. Inilah yang menjadi dasar filosofi yang tetap terpelihara hingga sekarang. Kini perubahan arah kehidupan menuju kondisi yang bersifat materialistik, komersil serta duniawi telah menjadi gejala yang perlu disikapi serta diwaspadai. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman umat terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut, kurang optimalnya pemanfaatan tempat-tempat ibadah serta kurang optimalnya kinerja lembaga keagamaan dalam melakukan pembinaan terhadap umat dalam rangka membangun kesalehan sosial. Sementara itu dari aspek kelembagaan adat dan budaya masyarakat, permasalahan yang ada yaitu



adanya tuntutan terhadap hak-hak adat/ ulayat yang tidak didasari atas keabsahan yang memiliki legal formal.

12. Masalah Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur wilayah sangat memiliki peran penting serta menjadi urat nadi bagi perekonomian daerah. Dengan infrastruktur wilayah yang handal dapat mempercepat konektivitas serta memperlancar arus barang, jasa dan manusia. Namun demikian kondisi yang dihadapi adalah masih terbatasnya dukungan infrastruktur wilayah meliputi belum optimalnya ketersediaan jalan serta cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, terbatasnya fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem terminal sebagai tempat. Permasalahan pada aspek sumber daya air yaitu masih belum memadai dan cakupan air bersih baru mencapai 70%. Sedangkan permasalahan lainnya yaitu sumber daya listrik masih sangat terbatas, dengan kapasitas 4-5 MW terpasang pelayanan jaringan listrik belum melayani semua wilayah. Kondisi ini menyebabkan sering terjadi pemadaman listrik dan hingga kini belum dilakukan pengembangan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap listrik PLN. Sementara itu pada aspek infrastruktur perhubungan laut, walaupun kapasitas pelabuhan laut Fakfak telah dikembangkan baik dermaga maupun areal lapangan kontainer, namun masih perlu dikembangkan kedepan mengingat pertumbuhan barang, jasa dan manusia semakin meningkat setiap tahun. Di bidang infrastruktur perhubungan udara, permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya bandara Torea Fakfak. Dengan panjang *rainway* 1200 meter hanya bisa didarati pesawat jenis ATR 60. Untuk mengantisipasi perkembangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah merencanakan pembangunan bandara baru di Siboru.

13. Pemukiman, Perumahan dan Penataan Ruang

Pemukiman, perumahan dan Penataan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan tetapi saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan serta pemukiman yaitu biaya pembangunan yang mahal terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Disamping itu pula pembangunan perumahan serta pemukiman sering menemui permasalahan berupa tanah adat/ulayat.



Sedangkan berkaitan dengan penataan ruang, permasalahan yang terjadi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan penataan ruang. Hal ini sering menimbulkan permasalahan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

14. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Fakfak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pertambangan. Untuk itu agar pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat berkelanjutan maka pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun demikian pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dihadapkan pada permasalahan serta kendala yaitu keterbatasan sumber daya alam, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta adanya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melebihi upaya perbaikannya.

Berdasarkan telah kebijakan pembangunan serta analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Isu yang sangat penting berkaitan dengan reformasi birokrasi dan tata kelola yaitu:

- Penataan Kelembagaan;
- Profesionalisme Aparatur;
- Kualitas Pelayanan Publik;
- Ketersediaan sarana dan prasarana.

b. Kemiskinan dan Pengangguran.

- Penurunan jumlah penduduk miskin;
- Akses terhadap sumber daya modal;
- Lapangan kerja.

c. Kualitas serta Akses Pendidikan Masyarakat

- Keterjangkauan, Akses dan pembiayaan pendidikan;



- Partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
- SDM pendidikan dan kependidikan;
- Sarana dan prasarana pendidikan.

d. Kualitas serta akses Layanan Kesehatan

- Mutu layanan kesehatan meliputi SDM kesehatan Sarana dan Prasarana;
- Jaminan dan keterjangkauan akses layanan kesehatan;
- Sanitasi lingkungan.

e. Masih Rendahnya Produktifitas dan Daya Saing Pertanian Dalam Arti Luas

- Sumber daya petani;
- Kelembagaan petani;
- Akses modal.

f. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat

- Kemampuan berusaha;
- Akses modal;
- Kelembagaan ekonomi.

g. Permukiman dan Penataan Ruang

- Penataan permukiman;
- Pengendalian ruang;
- Akses kepemilikan rumah.

h. Pengembangan Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

- Pelayanan perijinan usaha;
- Kepastian Hukum;
- Data potensi;
- Kemandirian Koperasi, UKM.

i. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- Konservasi sumber daya alam;
- Bencana Alam;
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Perubahan iklim.



j. Perluasan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

- Kualitas serta akses jalan dan jembatan;
- Pelayanan air bersih;
- Akses listrik;
- Pemanfaatan energi terbarukan;
- Ketersediaan sarana telekomunikasi seluler;
- Pengembangan bandara;
- Pengembangan pelabuhan laut.

b. Visi Dan Misi

1. Visi

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi baik global, nasional, regional serta daerah, maka visi Kabupaten Fakfak periode 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKA FAKFAK YANG TERDEPAN,
SEJAHTERA, NYAMAN, UNGGUL, DAN MANDIRI
(FAKFAK TERSENYUM)”**

Adapun pengertian dari Visi dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a) Terdepan**, menjadikan Kabupaten Fakfak sebagai kabupaten terdepan di wilayah selatan Papua Barat dalam hal pembangunan karakter, pembangunan sektor sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, pelayanan dasar, reformasi birokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan melalui filosofi **SATU TUNGKU TIGA BATU IDU IDU MANI NINA** dengan memperhatikan nilai-nilai luhur kearifan lokal.
- b) Sejahtera**, Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, hal ini merujuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat Fakfak. Sejahtera pula dapat diartikan sebagai kehidupan masyarakat Fakfak dengan tingkat ekonomi yang layak dan mapan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dibidang Pendidikan, Kesehatan, sosial dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan merata;
- c) Nyaman**, memiliki arti ‘Terwujudnya masyarakat Fakfak yang merasa aman dan damai, terlepas dari segala ancaman dan



gangguan, bagi masyarakat dalam beraktifitas maupun dalam iklim investasi;

- d) **Unggul**, memiliki arti 'Terwujudnya Kabupaten Fakfak sebagai Kabupaten yang memiliki keutamaan, kecakapan, dan kekuatan dalam bidang-bidang tertentu dan kelak memiliki daya saing komparatif;
- e) **Mandiri**, Terwujudnya kemandirian dalam bentuk sikap dan perilaku serta mental yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat Fakfak, berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur, adil dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan mampu mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajiban.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi jangka menengah yaitu:

- a. Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang Cerdas, Sehat, Religius dan Produktif Yang Memiliki Daya Saing Melalui Pendidikan Dan Derajat Kesehatan.
- b. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis Pariwisata, Pertanian, dalam arti luas dan kelautan.
- c. Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel Berbasis Pelayanan Elektronik.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkoneksi wilayah yang terpadu dan terintegrasi.
- e. Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan local masyarakat Fakfak.
- f. Mewujudkan Pembangunan Fakfak Berkelanjutan, melalui kearifan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Yang Lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, selain disusun program-program yang berkaitan



dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang meliputi 6 (enam) Urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan non pelayanan dasar serta 8 (delapan) urusan pilihan, juga disusun program unggulan kepala daerah yang merupakan program unggulan (*Dedicated*) serta program strategis. Program tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan seperti peningkatan konektivitas wilayah, percepatan kualitas pelayanan publik, reformasi dan tata kelola, juga sebagai trigger pertumbuhan ekonomi daerah. Program unggulan Kepala Daerah tersebut meliputi:

1. Program Unggulan

- Program Pembangunan (Gerbang Fajar);
- Pengembangan sumber daya alam berbasis kampung (one village one product);
- Program Fakfak Banjir;
- Program Fakfak Terang;
- Pengembangan Ekonomi mikro Daerah;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar serta Peningkatan Konektivitas Kewilayahan;
- Pembangunan Pariwisata Terintegrasi;
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- Penerapan e-Government;
- Penerapan Standar Pelayanan Publik disetiap SKPD dan SPM untuk 6 (enam) Urusan Wajib SPM;
- Mendukung Rencana Aksi Penanggulangan Korupsi;
- Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Daerah;
- Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh.

2. Program Prioritas Kabupaten

Program prioritas Kabupaten disusun berdasarkan analisis terhadap perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Fakfak berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis daerah dan disesuaikan dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2021-2024. Sehingga diharapkan dapat percepatan pembangunan dan



ekonomi wilayah di Kabupaten Fakfak. Berikut merupakan program strategis pembangunan tahun 2023 :

a) Program Penguatan Sumber Daya Manusia (Fakfak Cerdas, Sehat dan Religius)

Bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia Fakfak yang unggul dan berdaya saing dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan memiliki nilai-nilai religius. Program ini dilakukan melalui program unggulan terutama Pendidikan vokasi, Pendidikan kedokteran, Pendidikan pilot, serta Program-program kejuruan lain yang dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi baik didalam maupun di luar negeri.

b) Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan melakukan penataan organisasi dan tata Kelola sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi guna membangun tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta akuntabel.

c) Program Bantuan 1.500 beasiswa bagi Pelajar Asal Fakfak

Pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Fakfak yang menempuh Pendidikan baik dalam maupun luar Kabupaten Fakfak dalam mendorong proses serta kualitas Pendidikan bagi putra putri asal Kabupaten Fakfak secara berkeadilan. Selain itu pula Pemerintah Kabupaten Fakfak memberi Afirmasi yang tersebar di perguruan tinggi negeri yaitu dengan memberi jaminan perkuliahan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi baik didalam maupun diluar Kabupaten Fakfak.

d) Program Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan

Program ini dimaksudkan memberikan perlindungan serta jaminan Kesehatan serta ketenagakerjaan bagi masyarakat melalui pemberian kartu fakfak tersenyum yang akan terintegrasi dengan data kependudukan.

e) Program Pembangunan Jaringan Air bersih (Fakfak Banjir)

Pembanguna jaringan air bersih dimaksudkan untuk penyediaan air bersih terutama bagi masyarakat yang lebih merata dan menjangkau baik di tingkat kabupaten, distrik maupun kampung. Selain itu



- melakukan revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana air bersih melalui optimalisasi sumber-sumber yang ada.
- f) Program Gerakan Membangun Perekonomian masyarakat
Bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui penguatan sector riil melalui peningkatan ekonomi unggulan daerah dibidang pertanian dalam arti luas serta pariwisata sebagai sektor unggulan, juga memperkuat usaha-usaha kecil mikro dan koperasi dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
 - g) Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Fakfak Sejahtera
Program ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan pengelolaan baik ekonomi maupun social kemasyarakatan secara terpadu dan komprehensif dengan meningkatkan ekonomi dan daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - h) Program Pencegahan dan Pengendalian Stunting (Chating Sejak Dini)
Dimaksudkan untuk melakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Fakfak melalui sistem informasi yang cepat dan tanggap sejak dini.
 - i) Program Pengembangan Reklamasi
Sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan ruang dikawasan perkotaan fakfak menjadi pusat sentra bisnis (CBD) dan Kawasan pengembangan pariwisata. Maka Kawasan reklamasi menjadi target pencapaian dari RPJMD Fakfak Tersenyum. Kawasan ini selain menjadi pusat rekreasi dan informasi serta edukasi dan sebagai ruang publik akan dilakukan penataan sesuai dengan fungsi ruang.
 - j) Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Terpadu (Fakfak Berwisata)
Sebagai salah satu program unggulan Kabupaten Fakfak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan percepatan sektor Pariwisata, budaya, sejarah dan nilai-nilai adat dan budaya. Program ini akan difokuskan dengan membangun pulau wisata tubir seram - pulau bone - pasir putih - pulau panjang/pulau boyam/wartutin/teluk thumburuni berbasis masyarakat.
 - k) Program Pengembangan Kepemudaan (Pemuda Milineal)



Dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemuda didalam pembangunan melalui kreatifitas dan berinovasi di bidang pembangunan. Bentuk-bentuk kegiatan penguatan komunitas-komunitas kepemudaan di Kabupaten Fakfak.

l) Program Nilai Adat dan Budaya (Fakfak Berbudaya)

Guna penguatan adat dan budaya yang bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat adat, kapasitas adat dan budaya. Dengan melakukan sinergitas antara pemerintah dan adat dalam pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di Kabupaten Fakfak. Beberapa kegiatan dilakukan antara lain percepatan daerah mengenai perlindungan, pengakuan dan pemberdayaan hukum adat, pembentukan kampung adat adat dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat di Kabupaten Fakfak.

m) Program Penyediaan Utilitas (Fakfak Terang)

Sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan listrik ditingkat kabupaten, distrik dan kampung, maka didalam visi misi RPJMD didorong program Fakfak Terang baik dengan memanfaatkan sumber energi listrik yang bersumber dari PLTD dengan mendorong percepatan pembangkit listrik tenaga angin dan gas serta memanfaatkan energi listrik terbarukan seperti PLTS regular maupun komunal. Program ini juga bersinergi langsung dengan program Papua terang dalam rangka menyediakan listrik dan meningkatkan kapasitas operasional, pengabungan sistem jaringan listrik ditingkat ibu kota distrik melalui penyediaan listrik desa.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya. Program - program tersebut antara lain:

- a) Program SKPD yang merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD
- b) Program lintas SKPD yang merupakan program yang melibatkan



lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan secara bersama

- c) Program kewilayahan yang merupakan program pembangunan
- d) Daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan untuk mendorong laju pertumbuhan, antar wilayah/antar kawasan di Kabupaten Fakfak. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut:

Urusan Wajib

1. Pendidikan, meliputi:

- Program pengelolaan Pendidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program pendidik dan tenaga kependidikan
- Program pengendalian perijinan Pendidikan
- Program pengembangan Bahasa dan sastra

2. Kesehatan, meliputi:

- Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
- Program peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat
- Program kesediaan farmasi, alat Kesehatan, makanan dan minuman
- Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum, meliputi:

- Program pengelola sumber daya air (SDA)
- Program pengelolaan dan pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional
- Program Pengelolaan dan pengembangan system air limbah
- Program Pengelolaan dan pengembangan system drainase

4. Perumahan, meliputi:

- Program Pengembangan pemukiman;
- Program penataan bangunan dan lingkungan
- Program penyelenggaraan jalan
- Program pengembangan perumahan
- Program Kawasan permukiman



- Program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh
- Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)
- Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualitas, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan pemukiman

5. Penanggulangan bencana

- Program penanggulangan bencana
- Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

6. Sosial

- Program pemberdayaan sosial
- Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan penyelamatan non kebakaran
- Program perlindungan jaminan sosial
- Program penanganan bencana
- Program pengelolaan taman makam pahlawan

7. Tenaga kerja

- Program perencanaan tenaga kerja
- Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja
- Program penempatan tenaga kerja
- Program hubungan industrial
- Program pengawasan ketenagakerjaan

8. Pemberdayaan perempuan

- Program pengrusutaman gender dan pemberdayaan perempuan
- Program perlindungan perempuan
- Program peningkatan kualitas keluarga
- Program pengelolaan sistem data gender dan anak
- Program pemenuhan hak anak (PHA)
- Program perlindungan khusus anak

9. Ketahanan Pangan

- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat



- Program penanganan kerawanan pangan
- Program pengawasan keamanan pangan

10. Pertanahan

- Program pengelolaan ijin lokasi
- Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- Program penyelesaian sengketa tanah Garapan
- Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
- Program retribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
- Program penetapan tanah ulayat
- Program pengelolaan tanah kosong
- Program pengelolaan ijin membuka tanah

11. Lingkungan Hidup

- Program perencanaan lingkungan hidup
- Program pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup
- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
- Program pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang terikat dengan PPLH
- Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- Program pengelolaan persampahan

12. Kependudukan

- Program pendaftaran penduduk
- Program pencatatan sipil
- Program pengelolaan informasi, administrasi kependudukan
- Program pengelolaan profil kependudukan



13. Pemberdayaan masyarakat dan kampung

- Program pendataan desa
- Program peningkatan Kerjasama desa
- Program administrasi pemerintah desa
- Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

14. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

- Program pengendalian penduduk
- Program pembinaan kelurga berencana
- Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

15. Perhubungan

- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
- Program pengelolaan pelayaran
- Program pengelolaan penerbangan
- Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- Program pengelolaan aplikasi informatika

16. Koperasi dan UKM

- Program pelayanan ijin usaha simpan pinjam
- Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- Program penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi
- Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian
- Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- Program pengembangan UMKM

17. Penanaman modal

- Program pengembangan iklim dan penanaman modal
- Program promosi penanaman modal
- Program pelayanan penanaman modal
- Program pengendalian pelaksanaan modal

18. Pemuda dan kebudayaan

- Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- Program pengembangan kapasitas kepramukaan
- Program penyelenggaraan statistik sektoral



- Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 - Program pengembangan kebudayaan
 - Program pengembangan kesenian tradisional
 - Program pembinaan sejarah
 - Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
19. Perpustakaan dan kearsipan
- Program pengelolaan museum
 - Program pembinaan perpustakaan
 - Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
 - Program pengelolaan arsip
 - Program perlindungan dan penyelamatan arsip
 - Program perijinan penggunaan arsip
20. Pemerintahan umum
- Program administrasi umum
 - Program perekenomian pembangunan
 - Program umum sekretariat DPRD kabupaten/kota
 - Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
 - Program pengelolaan keuangan daerah
 - Program pengelolaan barang milik daerah
 - Program pengelolaan pendapatan daerah
 - Program pengelolaan perbatasan
21. Sumber daya manusia
- Program kepegawaian daerah
 - Program pengembangan sumber daya manusia
22. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi:
- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - Program penyelenggaraan pemerintahan dan umum
 - Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desaprogram penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan



- Program peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidik politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

23. Kepegawaian, meliputi:

- Program Pendidikan Kedinasan;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

24. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:

- Program penyelenggaraan pengawasan
- Program perumusan kebijakan, pendampingan asistensi
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

URUSAN PILIHAN

1. Perikanan dan kelautan

- Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

2. Pariwisata dan ekonomi kreatif

- Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata
- Program pemasaran pariwisata
- Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hal kekayaan intelektual
- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

3. Pertanian

- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyedia dan pengembangan prasarana pertanian
- Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan



masyarakat veteriner

- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Program perijinan usaha pertanian
- Program penyuluhan pertanian

4. Perijinan dan perdagangan

- Program perijinan usaha dan pendaftaran perusahaan
- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
- Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Program pengembangan ekspor
- Program standarisasi dan perlindungan konsumen
- Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
- Program pengendalian ijin usaha industri
- Program pengelolaan informasi industri nasional

5. Transmigrasi

- Program Kawasan transmigrasi
- Program pembangunan Kawasan transmigrasi

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dasar penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dimulai dari tahapan serta mekanisme perencanaan pembangunan ditingkat Kampung, Distrik, Kabupaten, Provinsi serta Nasional dengan tujuan guna menciptakan keselarasan serta sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) dengan tujuan:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terpilih periode 2021-2026;
2. Mengkoordinasikan teknis pembangunan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun evaluasi pembangunan antara kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Fakfak dan Nasional;



3. Menjadi salah satu dokumen acuan bagi anggota DPRD Kabupaten Fakfak periode 2019-2024 dalam menjalankan fungsi penyusunan Perda, penganggaran dan pengawasan;
4. Menjadi pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahunnya dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun renstra SKPD; serta
5. Menjadi dokumen acuan bersama antara pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Fakfak selama 2021-2026.

Berikut ini penjabaran program dan kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023:



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

Tabel 1.4 Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Sesuai RKPD Tahun 2023

Kode					Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
1	01				Urusan Pemerinyahan Bidang Pendidikan		
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	Dikpora	10 Dokumen
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dikpora	10 Dokumen
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		40%
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dikpora	1520 Orang
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dikpora	10 Dokumen
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dikpora	40%
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dikpora	100 Dokumen
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dikpora	12 Dokumen
1	01	01	2.06		Administrasi Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi		
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dikpora	10 Paket
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dikpora	150 Paket
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dikpora	12 Laporan
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dikpora	20 Unit
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atu Kendaraan Dinas Jabatan	Dikpora	51 Unit
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dikpora	611 Orang
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dikpora	12 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						dan Listrik yang Disediakan		
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dikpora	12 Laporan
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dikpora	40%
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dikpora	10 Unit
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dikpora	100 Unit
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Dikpora	40 %
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Dikpora	40%
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Dikpora	8 Ruang
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Dikpora	1 Ruang
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Dikpora	4 Ruang
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Dibangun	Dikpora	3 Ruang
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Dikpora	7 Unit
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Dikpora	6 Unit
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Dikpora	2 Ruang
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Dikpora	2 Unit
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Dikpora	1 Paket
1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Dikpora	20 Paket
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Dikpora	6 Paket
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Dikpora	870 Unit
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidik yang Menyelesaikan Proses Belajar dan Ujian	Dikpora	114 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dikpora	114 Satuan pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dikpora	600 peserta Didik
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dikpora	50 Orang
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dikpora	114 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dikpora	114 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dikpora	228 Orang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dikpora	6 Ruang
1	01	02	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Dikpora	1 Konten Digital
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dikpora	422 Peserta Didik
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dikpora	1 Ruang
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Dikpora	3 Ruang
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Dikpora	2 Ruang
1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Dikpora	1 Unit
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Dikpora	3 Unit
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Dikpora	8 Unit
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Dikpora	1 Unit
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dikpora	1 Unit
1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Dikpora	1 Paket
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Dikpora	1 Paket
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Dikpora	400 Paket
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Dikpora	1500 Paket
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dikpora	22 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dikpora	286 Peserta Didik
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dikpora	30 Orang
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Dikpora	22 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Dikpora	22 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dikpora	66 Orang
1	01	02	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Dikpora	150 Orang
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Daerah	Dikpora	40 %
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah	Dikpora	3 Unit



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Dibangun		
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Dikpora	2 Unit
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Dikpora	96 Peserta Didik
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dikpora	96 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dikpora	40 Orang
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dikpora	214 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Dikpora	75 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dikpora	96 Orang
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal Daerah	Dikpora	40 %
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Dikpora	20 Peserta Didik
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dikpora	4 Satuan Pendidikan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Dikpora	8 Satuan Pendidikan
1	01	02	4.05	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Dikpora	
1	01	02	4.05	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Dikpora	2 Unit
1		02	4.05	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Dikpora	8 Satuan Pendidikan
1	01	02	4.06	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Dikpora	
1	01	02	4.06	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Dikpora	3 Satuan Pendidikan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Peningkatan Kualitas Pengembangan Kurikulum	Dikpora	40 %
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Peningkatan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	Dikpora	40 %
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dikpora	200 Dokumen
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini		Dikpora	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					dan Pendidikan Nonformal			
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dikpora	900 Dokumen
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Dikpora	
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Dikpora	
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dikpora	30 Dokumen
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dikpora	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		Dikpora	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Dikpora	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dikpora	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemudaran Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dikpora	20 Dokumen
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Daerah	Dikpora	40 %
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kejuaraan Olahraga Daerah	Dikpora	40 %
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dikpora	3 Dokumen
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Daerah	Dikpora	40 %
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Dikpora	140 Orang
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan Olahraga Rekreasi	Dikpora	40 %
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Dikpora	324 Unit
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinkes	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Dinkes	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinkes	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinkes	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Dinkes	12 Bulan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						ASN		245 Orang/bulan
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dinkes	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinkes	315 Paket
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinkes	15 Orang
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dinkes	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinkes	16 Paket
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinkes	0 Paket
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinkes	10 Paket
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinkes	10 Paket
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	30 Laporan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinkes	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinkes	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinkes	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinkes	3 Laporan
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinkes	3 Laporan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinkes	3 Laporan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinkes	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinkes	12 Unit
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Dinkes	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Dinkes	
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Dinkes	12 Unit
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinkes	3 Unit
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinkes	65 Unit



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat,Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Dinkes	12 Paket
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Dinkes	12 Paket
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Dinkes	3 Unit
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutindan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinkes	5 Unit
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dinkes	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes	5 Dokumen
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinkes	1 Unit
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinkes	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Dinkes	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinkes	40 % 40 %
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	40 %
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		PUPR2KP	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		PUPR2KP	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PUPR2KP	40 %
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PUPR2KP	40 %
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PUPR2KP	12 Laporan
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dana yang dibutuhkan Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah	PUPR2KP	113 Orang 2 Tahun
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PUPR2KP	113 Orang/bulan
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		PUPR2KP	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	PUPR2KP	0 Paket
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	PUPR2KP	40 %
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PUPR2KP	0 Paket



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PUPR2KP	4 Paket
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PUPR2KP	1 Paket
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	PUPR2KP	0 Paket
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	PUPR2KP	0 Dokumen
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PUPR2KP	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		PUPR2KP	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	PUPR2KP	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUPR2KP	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PUPR2KP	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	PUPR2KP	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PUPR2KP	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUPR2KP	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PUPR2KP	8 Unit
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	PUPR2KP	0 Unit
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PUPR2KP	1 Paket
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PUPR2KP	0 Unit
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR (SDA)		PUPR2KP	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PUPR2KP	
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	PUPR2KP	0 KM
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Sea wall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun Panjang Sea wall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	PUPR2KP	0 Dokumen
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi	PUPR2KP	0 Unit
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	PUPR2KP	0 KM
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan		PUPR2KP	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	PUPR2KP	0,3 KM
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		PUPR2KP	40%
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	PUPR2KP	40%
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAMIKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	PUPR2KP	0 Liter
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	PUPR2KP	0 SR
1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	PUPR2KP	0 Penyelenggaraan SPM
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	PUPR2KP	0 Unit
1	03	06			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		PUPR2KP	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PUPR2KP	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	PUPR2KP	0 Dokumen
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	PUPR2KP	0 M
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	PUPR2KP	0 M
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	PUPR2KP	0 M
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		PUPR2KP	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		PUPR2KP	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	PUPR2KP	0 Sistem Jaringan
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		PUPR2KP	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PUPR2KP	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	PUPR2KP	0 Dokumen
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	PUPR2KP	1 Dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai	PUPR2KP	1 Unit
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		PUPR2KP	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PUPR2KP	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	PUPR2KP	0 Dokumen
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	PUPR2KP	0 KM
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	PUPR2KP	0 KM
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	PUPR2KP	0 KM
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	PUPR2KP	0 M
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		PUPR2KP	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		PUPR2KP	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	PUPR2KP	0 Orang
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		PUPR2KP	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase terlaksananya program pengembangan perumahan	PUPR2KP	40%
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	PUPR2KP	40%
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	PUPR2KP	0 Unit Rumah
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terlaksananya kegiatan kawasan permukiman	PUPR2KP	40%
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terselenggaranya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	PUPR2KP	
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	PUPR2KP	0 Dokumen
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase terlaksananya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	PUPR2KP	40%
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	PUPR2KP	40%
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	PUPR2KP	0 Unit Rumah
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Persentase Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum	PUPR2KP	40%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					UTILITAS UMUM (PSU)	(PSU)		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Terlaksananya urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	PUPR2KP	40%
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	PUPR2KP	1 Lokasi
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien - SATPOL		40%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		40%
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	43 Orang
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Satpol PP	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satpol PP	0 Paket
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Satpol PP	0 Paket
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	4 Paket
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Satpol PP	2 Unit
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40%
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Satpol PP	1 Laporan
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Satpol PP	1 Laporan
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Satpol PP	8 Unit
1	05	01	2.13		Penataan Organisasi			
1	05	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Satpol PP	1 Dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	0 Kasus
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Satpol PP	16 Orang
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Satpol PP	1 Laporan
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Saranadan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Satpol PP	100 Unit
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Satpol PP	16 Desa/ Kelurahan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		Dinas Sosial	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien -Dinas Sosial		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah		40%
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	39 Orang/Bulan
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	40%
1	06	01	2.06	02	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Dinas Sosial	3 Paket



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Disediakan		
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	3 Paket
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	4 Laporan
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40%
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial	3 Laporan
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	12 Laporan
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40%
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial	1 Unit
1	06	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dinas Sosial	14 Unit
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase terlaksananya kegiatan Penanganan Masalah Sosial		40%
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		40%
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	250 Keluarga
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	30 Keluarga
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan potensi pekerja sosial dan PKH		40%
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	100 Keluarga
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Kelompok Disabilitas yang memperoleh bantuan sosial dan/ atau rehabilitasi sosial		40%
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pemulihan dan SDM Disabilitas		40%
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	470 Orang
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	4 Orang
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	20 Orang
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	2 Orang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	10 Orang
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	4 Orang
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase PMKS yang telah tertangani		40%
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	60 Orang
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Per makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	145 Orang
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	60 Orang
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	40 Orang
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Cakupan PMKS Yang Memperoleh bantuan Perlindungan Jaminan Sosial		40%
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah Data Fakir miskin dan bantuan sosial yang telah diberikan		40%
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Dinas Sosial	18.000 Orang
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	18.000 Keluarga
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50 Keluarga
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50 Orang
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat -Dinas Sosial		70%
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang telah Tertangani		40%
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.200 Orang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	100 Orang
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terlaksananya kegiatan bidang sosial		40 %
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Telah Terpelihara		40%
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	2 Makam
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan -BPBD		40%
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PersentaseTerlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	24 Laporan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	1 Tahun
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Sosial	2 Paket
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Sosial	6 Orang
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1 Paket
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	7 Paket
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Sosial	6 Paket
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan
1	05	01	2.07		PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Sosial	1 Unit
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PersentaseTerlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial	3 Laporan
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Dinas Sosial	12 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Disediakan		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Sosial	7 Unit
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan -BPBD		40 %
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	24 Laporan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gajian dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	1 Tahun
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPBD	2 Paket
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPBD	6 Orang
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPBD	1 Paket
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPBD	7 Paket
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BPBD	3 Paket
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPBD	6 Paket
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	12 Laporan
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	100 %
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPBD	1 Unit
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	100 %
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	BPBD	3 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						dan Listrik yang Disediakan		
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPBD	12 Laporan
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	100 %
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPBD	7 Unit
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Terselenggaranya Program Penanggulangan Bencana - BPBD	BPBD	70%
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	100%
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	BPBD	15 Unit
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	BPBD	25 Dokumen
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	BPBD	100 Orang
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	100%
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jamber dasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	BPBD	5 Dokumen
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	30 Orang
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penanganan Sistem Penanggulangan Bencana	BPBD	100%
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	BPBD	1 Dokumen
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD	20 Laporan
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	BPBD	4 Dokumen
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terselenggara Program Penunjang Urusan		40%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					KABUPATEN/KOTA	Pemerintahan		
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A2KB	45 Orang/Bulan
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	DP3A2KB	40 Orang
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DP3A2KB	1 Paket
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP3A2KB	40%
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP3A2KB	15 Paket
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DP3A2KB	5 Paket
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3A2KB	7 Laporan
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	DP3A2KB	40%
2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DP3A2KB	1 Unit
2	08	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DP3A2KB	1 Unit
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DP3A2KB	2 Unit
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	DP3A2KB	40%
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DP3A2KB	1 Laporan
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP3A2KB	12 Laporan
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	DP3A2KB	40%
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DP3A2KB	31 Unit
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DP3A2KB	62 Unit
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Terlaksananya perlindungan perempuan	DP3A2KB	40%
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	DP3A2KB	40%
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3A2KB	1 Dokumen
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3A2KB	6 Perangkat Daerah
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	DP3A2KB	40%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Korban Kekerasan		
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	DP3A2KB	100 Orang
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3A2KB	60 Layanan
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	DP3A2KB	40%
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	DP3A2KB	50 Orang
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas keluarga	DP3A2KB	40%
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Peningkatan kualitas keluarga	DP3A2KB	40%
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3A2KB	1 Perangkat Daerah
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DP3A2KB	1 Dokumen
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3A2KB	1 Dokumen
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Terlaksananya kegiatan pemenuhan hak anak (PHA)	DP3A2KB	40%
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan Pelembagaan PHA	DP3A2KB	40%
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi iPemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DP3A2KB	4 Organisasi
2	08	06	2.02		Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan penguatan dan pengembangan PHA	DP3A2KB	40%
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3A2KB	1 Dokumen
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Terlaksananya kegiatan perlindungan anak	DP3A2KB	40%
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan	DP3A2KB	6 Perangkat Daerah



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3A2KB	6 Perangkat Daerah
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		DP3A2KB	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Terlaksananya kegiatan pengendalian penduduk	DP3A2KB	40%
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP3A2KB	8 Distrik
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DP3A2KB	1 Laporan
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DP3A2KB	1 Laporan
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP3A2KB	2 Dokumen
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Presentase Terlaksananya kegiatan pembinaan keluarga berencana Persentase Terlaksana kegiatan pembinaan keluarga berencana Persentase Terlaksananya kegiatan pembinaan keluarga berencana	DP3A2KB	40%
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB	DP3A2KB	40%
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DP3A2KB	3 Organisasi
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP3A2KB	2 Dokumen
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP3A2KB	1 Dokumen
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP3A2KB	2 Laporan
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di	DP3A2KB	1 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	DP3A2KB	1 Laporan
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		DP3A2KB	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DP3A2KB	3 Organisasi
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP3A2KB	149 Orang
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	DP3A2KB	40%
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3A2KB	1 Laporan
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3A2KB	35 Orang
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	DP3A2KB	1 Unit
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP3A2KB	1 Dokumen 2 Laporan
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	DP3A2KB	50 Orang
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	DP3A2KB	40%
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP3A2KB	7 Organisasi
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DP3A2KB	1 Dokumen
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	DP3A2KB	36 Kampung
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Persentase Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan	DP3A2KB	40%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					SEJAHTERA (KS)	keluarga sejahtera (KS) Persentase Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	DP3A2KB	40%
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3A2KB	20 Unit
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3A2KB	447 Orang
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3A2KB	1 Laporan
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	DP3A2KB	781 Keluarga
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		DP3A2KB	
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP3A2KB	10 Organisasi
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	DP3A2KB	1 Laporan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		70%
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		100%
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DLHP	0 Dokumen
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		70%
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		100%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLHP	0 Dokumen
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		DLHP	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		DLHP	
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	DLHP	0 Laporan
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		DLHP	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan yang tercapai – Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	DLHP	40%
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan adm Keuangan Perangkat Daerah	DLHP	40%
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DLHP	48 Orang/Bulan
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan adm Kepegawaian Perangkat Daerah	DLHP	40%
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DLHP	5 Orang
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLHP	40%
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DLHP	1 Paket
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DLHP	0 Paket
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DLHP	0 Paket
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DLHP	0 Paket
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLHP	0 Laporan
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLHP	40%
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DLHP	1 Unit
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLHP	40%
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DLHP	1 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DLHP	1 Laporan
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	DLHP	40%
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DLHP	0 Unit
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DLHP	4 Unit
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DLHP	26 Unit
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		DLHP	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		DLHP	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah ,Air, Udara, dan Laut	DLHP	0 Dokumen
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		DLHP	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	DLHP	1 Dokumen
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		DLHP	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		DLHP	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		DLHP	
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	DLHP	330 Orang
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		DLHP	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		DLHP	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLHP	0 Laporan
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLHP	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat		DLHP	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	DLHP	0 Dokumen
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		DLHP	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		DLHP	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	DLHP	1 Entitas
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		DLHP	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah		DLHP	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	DLHP	2 Dokumen
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta		DLHP	
2	11	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	DLHP	0 Rekomendasi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten - DUKCAPIL		40%
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		100%
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan	Dukcapil	33 Orang/Bulan
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kinerja Pegawai	Dukcapil	100%
2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukcapil	12 Dokumen
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dukcapil	3 Orang
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum yang disediakan	Dukcapil	100%
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dukcapil	100%
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Dukcapil	100%
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukcapil	2 Dokumen
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang yang di sediakan	Dukcapil	100%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukcapil	1 Laporan
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukcapil	3 Laporan
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukcapil	2 Laporan
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak/Honor Daerah yang di sediakan	Dukcapil	28 Orang
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Aset yang Terpelihara	Dukcapil	100%
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Dukcapil	100%
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	40%
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Dukcapil	100%
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	17 Laporan
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dukcapil	9 Dokumen
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	100%
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Dukcapil	1 Laporan
2	12	02	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dukcapil	1 Dokumen
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	1 Laporan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Dukcapil	40%
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Dukcapil	100%
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dukcapil	17 Layanan
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dukcapil	100%
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Dukcapil	1 Laporan
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	40%
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Forum Konsultasi Publik	Dukcapil	1 Kali
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dukcapil	1 Dokumen
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan PIAK	Dukcapil	100%
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	4 Laporan
2	12	04	2.03	06	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dukcapil	1 Dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan PIAK	Dukcapil	100%
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	4 Laporan
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil	40%
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Penyusunan Profil dan Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten	Dukcapil	100%
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Fakfak dan Buku DAK Semester yang di cetak	Dukcapil	90 Dokumen
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran - DPMK		40%
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		40%
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMK	1 Laporan
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah		40%
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMK	40 Orang/Bulan
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMK	1 Dokumen
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		DPMK	
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMK	4 Orang
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		DPMK	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMK	1 Paket
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DPMK	1 Paket
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMK	1 Laporan
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMK	1 Laporan
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan barang milik daerah	DPMK	40%
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DPMK	1 Unit
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPMK	1 Unit



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMK	100%
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMK	1 Laporan
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMK	1 Laporan
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DPMK	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMK	4 Unit
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA		DPMK	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa		DPMK	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	DPMK	13 Desa
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi pemerintah desa	DPMK	40%
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	DPMK	40%
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMK	1 Dokumen
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMK	30 Dokumen
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	DPMK	1 Dokumen
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMK	1 Laporan
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	DPMK	24 Dokumen
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMK	1 Dokumen
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	DPMK	54 Orang
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMK	10 Dokumen
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	DPMK	4 Dokumen
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	DPMK	1 Dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DPMK	2 Lembaga
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMK	2 Laporan
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMK	1 Laporan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah – Dinas Perhubungan		40%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.2 Persentase Tersedianya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		40%
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	63 Orang
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1.3 Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40%
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dishub	74 Paket
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dishub	5 Orang
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.1.4 Persentase Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Dishub	40%
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dishub	7 Paket
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dishub	1 Paket
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dishub	1 Paket
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishub	1 Laporan
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.1.5 Persentase Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Dishub	40%
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dishub	2 Unit
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.6 Persentase Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dishub	40%
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	1 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dishub	1 Laporan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dishub	1 Laporan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.7 Persentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah	Dishub	40%
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dishub	20 Unit
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dishub	20 Unit
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Meningkatnya pelayanan angkutan kepada pemakai jasa angkutan	Dishub	40%
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.1.1 Persentase Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia	Dishub	40%
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dishub	10 Titik 26 Buah 980 meter
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Dishub	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	40%
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dishub	1 Laporan
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.1.8 Persentase angkutan umum yang sesuai trayek	Dishub	40%
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dishub	1 Unit
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran		40%
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.1. 13 Persentase Tersedianya Sarana dan prasarana pelabuhan sungai dan danau		40%
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun		66,69 Meter
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten -		40%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					KABUPATEN/KOTA	DISKOMINFO		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan		40%
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	35 Orang
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	40%
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Kominfo	50 Paket
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kominfo	3 Orang
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	40%
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Dinas Kominfo	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Dinas Kominfo	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinas Kominfo	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	40%
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Kominfo	4 unit
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Kominfo	
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas Kominfo	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	40%
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Dinas Kominfo	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Honorier	Dinas Kominfo	19 Orang
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinas Kominfo	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Kominfo	
2	16	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Dinas Kominfo	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Dinas Kominfo	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota		Dinas Kominfo	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik		Dinas Kominfo	
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo	0 Unit
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Fakfak	Dinas Kominfo	40%
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo	40%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Kominfo	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Dinas Kominfo	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Dinas Kominfo	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Dasar Statistik Sektoral Pelaksanaan Pembanguna	Dinas Kominfo	40%
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Dinas Kominfo	
2	20	02	2.01	03	Membangun Meta data Statistik Sektoral		Dinas Kominfo	
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur		Dinas Kominfo	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Dinas Kominfo	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tersedianya Dokumen Sandi dan Keamanan Informasi yang dikelola	Dinas Kominfo	40%
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah	Dinas Kominfo	40%
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Kominfo	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kominfo	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		Dinas Kominfo	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinas Kominfo	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinas Kominfo	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	5 Laporan
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN	Dinas Kominfo	100%
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	35 Orang
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dinas Kominfo	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Kominfo	5 Paket
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kominfo	15 Orang
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kominfo	4 Orang
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dinas Kominfo	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	1 Paket



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	7 Paket
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	6 Paket
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Unit Peningkatan Saranadan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kominfo	3 Unit
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	18 Laporan
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinas Kominfo	
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Kominfo	3 Unit
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran urusan pemerintahan	Dinas Kominfo	100%
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kominfo	1 Laporan
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kominfo	12 Laporan
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	5 Laporan
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	12 Laporan
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinas Kominfo	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kominfo	2 Unit
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kominfo	1 Unit
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kominfo	1 Unit
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase Koperasi Yang telah memiliki izin usaha		10 Unit
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Izin usaha terfasilitasi		100%
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinkop&UKM	10 Unit Usaha
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)		30 Unit Usaha
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Koperasi yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan		80%
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	Dinkop&UKM	30%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Dinkop&UKM	30 Unit Usaha
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Dinkop&UKM	30 Unit Usaha
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Dinkop&UKM	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Ke anggotanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dinkop&UKM	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Dinkop&UKM	1289 Unit Usaha
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0prosentasepertumbuhan jumlahpengurus/penge lolakoperasi yangmempunyaikemampuanmengelola unit usahakoperasi.	Dinkop&UKM	30 Unit
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengurus/pengelola yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Dinkop&UKM	80%
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Dinkop&UKM	90%
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dinkop&UKM	
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinkop&UKM	0 90 Orang
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Dinkop&UKM	
2	17	06	4.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dinkop&UKM	
2	17	06	4.01	03	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinkop&UKM	1 Unit
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Dinkop&UKM	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Dinkop&UKM	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinkop&UKM	17 Dokumen
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinkop&UKM	170 Unit Usaha
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan -DPMPTSP		40%
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		40 % 40 %
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	38 Orang/Bulan
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMPTSP	40 % 40 % 40 % 40 %
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMPTSP	69 Pasang
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMPTSP	10 Orang
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	8 Orang
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	40 % 40 % 40 % 40 % 40 %
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	4 Paket
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	30 Paket
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	3 Paket
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	3 Laporan
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	40 % 40 % 40 %
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	1 Laporan
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Laporan
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	40%
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	27 Unit
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Pengembangan Iklim Penanaman	DPMPTSP	40%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Modal		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	40%
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP	40%
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	40 % 40 % 40 %
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	70 Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	75 Orang
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	75 Kegiatan Usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Terkendalnya Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	40 %
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	DPMPTSP	40 %
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	50 Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	DPMPTSP	75 Kegiatan Usaha
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya persentase pelayanan administrasi perkantoran - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		40%
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan		40%
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkerpus	30 Orang/Bulan
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN		40%
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGEMBANGAN BAHAN		40%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						PERPUSTAKAAN		
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Laporan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Dinkerpup	1 Laporan
2	23	02	2.02				Dinkerpup	40%
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Laporan Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Dinkerpup	1 laporan
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkerpup	3 Laporan
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Laporan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Dinkerpup	1 Laporan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Laporan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Dinkerpup	1 Laporan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		Dinkerpup	
2	24	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinkerpup	
2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinkerpup	
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkerpup	1 Laporan
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi keuangan	Dinkerpup	40%
2	24	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkerpup	3 Laporan
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinkerpup	1 Laporan
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Dinkerpup	40%
2	24	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinkerpup	1 Laporan
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinkerpup	40%
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinkerpup	1 Laporan
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinkerpup	1 Laporan
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinkerpup	3 Laporan
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinkerpup	1 Laporan
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkerpup	2 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah /Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinkerpus	40%
2	24	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinkerpus	1 Laporan
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinkerpus	1 Laporan
2	24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkerpus	1 Laporan
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinkerpus	4 Laporan
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinkerpus	1 Laporan
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Dinkerpus	40%
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinkerpus	2 Laporan
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP	Dinkerpus	40%
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ARSIP	Dinkerpus	40%
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Laporan Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Dinkerpus	1 Laporan
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinkerpus	17 Laporan
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	TERLAKSANANYA PROGRAM KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP	Dinkerpus	40%
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkerpus	1 Laporan
2	24	02	4.04		Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ARSIP	Dinkerpus	40%
2	24	02	4.04	01	Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Dinkerpus	1 Laporan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran – Dinas Kelautan dan Perikanan	DPK	40%
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47 Orang/Bulan
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		40%



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPK	125 Paket
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPK	5 Orang
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPK	5 Orang
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	DPK	100%
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPK	1 Paket
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPK	1 Paket
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPK	1 Paket
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPK	1 Paket
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPK	1 Paket
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	DPK	1 Dokumen
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK	2 Laporan
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Sarpras Kerja Dari BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK	100%
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DPK	1 Unit
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas jasa penunjang operasional kantor	DPK	100%
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPK	3 Laporan
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPK	1 Laporan
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPK	12 Laporan
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	DPK	100%
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	DPK	2 Unit
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	DPK	1000 Ton
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Dapat Diusahakan Dalam Daerah Kabupaten	DPK	1 Dokumen
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	DPK	1 Dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	DPK	2158 Unit
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	DPK	9 Unit
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Nelayan	DPK	20 Kelompok
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	DPK	10 Orang
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Yang Operasional Dan Terkelola	DPK	1 Unit
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	DPK	1 Layanan
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Di usahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Terlayani	DPK	100%
3	25	03	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPK	1 Dokumen
3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	DPK	3 Rekomendasi
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	DPK	22,35 Ton
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rekomendasi Yang Diterbitkan Untuk Pengurusan Izin Usaha Perikanan Budidaya	DPK	100%
3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	DPK	8 Rekomendasi
3	25	04	2.02		Pembudi Dayalkan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Di berdayakan	DPK	15 Kelompok
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	DPK	4 Kelompok
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayalkan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		DPK	
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan TandaDaftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPK	4 Rekomendasi
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Difasilitasi Untuk Mengelola Dengan Baik dan Benar	DPK	15 Kelompok
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPK	2 Dokumen
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPK	6 Unit



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPK	166 Unit
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	DPK	50 Orang
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksiolahan hasil perikanan	DPK	246 Ton
3	25	06	2.01		Penerbitan TandaDaftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi TDPIK yang diterbitkan	DPK	10 Dokumen
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	DPK	3 Dokumen
3	25	06			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	DPK	40 Kelompok
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPK	2431 Kg
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Fakfak		40%
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Fakfak yang dikelola		8 Kampung
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Disparbud	5 Objek
2	22	02	2.02	02	Pembinaan SumberDaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		1 Laporan
2	22	04			MPEMBINAAN SEJARAH	Persentase Tingkat Pembinaan Sejarah diKabupaten Fakfak		40%
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal daerah yang dilestarikan		20%
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Disparbud	50 Orang
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Tingkat Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Fakfak	Disparbud	40%
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Fakfak yang ditetapkan	Disparbud	5 Item
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Disparbud	5 Objek
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran - DISPARBUD		40%
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		1 Tahun



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disparbud	12 Orang/Bulan 40 Orang/Bulan
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Disparbud	35 Orang
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Disparbud	15 Orang
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disparbud	15 Orang
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Disparbud	1 Tahun
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Disparbud	1 Paket
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disparbud	1 Paket
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disparbud	1 Paket
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disparbud	1 Paket
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disparbud	1 Laporan
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Disparbud	1 Tahun
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disparbud	1 Laporan
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Di sediakan	Disparbud	1 Laporan
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disparbud	1 Laporan
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Disparbud	1 Tahun
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Disparbud	1 Unit
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disparbud	2 Unit
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Disparbud	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Disparbud	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Disparbud	3 Unit
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Disparbud	1 Laporan
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Disparbud	1 Tahun



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Disparbud	3 Lokasi
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disparbud	1 Laporan
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Tingkat pemasaran pariwisata di Kabupaten Fakfak	Disparbud	40%
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	Disparbud	1 Tahun
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Disparbud	1 Dokumen
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Disparbud	1 Laporan
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Tingkat Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Fakfak	Disparbud	40%
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Disparbud	100 Orang
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Disparbud	1 Unit
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Disparbud	1 Tahun
3	26	04	2.02	01	Pengembangan Riset	Jumlah Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Disparbud	1 Dokumen
3	26	04	2.02	03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Disparbud	1 Laporan
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Disparbud	1 Dokumen
3	26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Disparbud	1 Dokumen
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Disparbud	1 Dokumen
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tingkat Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Fakfak	Disparbud	40%
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Disparbud	1 Tahun
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Disparbud	40 Orang
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya pelayanan publik di Dinas Perkebunan		40%
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	12 Laporan
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja ASN		40%
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Pertanian	124 Paket
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Pertanian	11 Orang
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi kantor	Dinas Pertanian	40%
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	15 Buah
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	4 Paket
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanganyang Disediakan	Dinas Pertanian	12 Bulan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	10 Laporan
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya BMD penunjang keg ktr	Dinas Pertanian	40 %
3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Pertanian	1 Unit
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya jasa-jasa pelayanan umum	Dinas Pertanian	40 %
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pertanian	1 Laporan
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Pertanian	12 bulan
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	22 orang
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD	Dinas Pertanian	40 %
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Pertanian	6 Unit
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Pertanian	6 Unit
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Pertanian	20 Unit
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Meningkatnya sumber-sumber benih pada Dinas Perkebunan	Dinas Pertanian	40 %
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Pertanian	20 Unit
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Meningkatnya sumber-sumber benih pada Dinas Perkebunan	Dinas Pertanian	40 %
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan	Meningkatnya sumber-sumber benih	Dinas Pertanian	74551



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pertanian	17126 bibit
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian pada Dinas Perkebunan	Dinas Pertanian	40 %
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya pengembangan areal perkebunan	Dinas Pertanian	807 HA
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Perluasan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian	397 HA
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Dinas Pertanian	52 Unit
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Menurunnya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) - Dinas Perkebunan	Dinas Pertanian	40 %
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Menurunnya Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Dinas Pertanian	23 HA
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Dinas Pertanian	30 Ha
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Meningkatnya pengetahuan, sikap & ketrampilan – Dinas Perkebunan	Dinas Pertanian	40 %
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan	Dinas Pertanian	450 org
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Pertanian	3 Unit
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pertanian	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		Dinas Pertanian	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Terkelolanya Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian	40 %
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur dan sarana pendukung yang terbangun	Dinas Pertanian	2 unit
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Dinas Pertanian	1 unit
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Pertanian	40 %
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah	Dinas Pertanian	10 %
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Dinas Pertanian	15 Laporan
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah	Dinas Pertanian	10 %
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	1 Laporan
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	1 Ton



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Dinas Pertanian	1 Ton
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahunsesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita	Dinas Pertanian	35 Kampng
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian	1 Laporan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Terlaksananya penanganan kerawanan pangan - Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian	70 %
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Perencanaan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Pertanian	2 dokumen
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dinas Pertanian	1 Dokumen
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya kerawanan pangan Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pertanian	22 Kampung
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	1 Dokumen
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Terlaksananya pengawasan keamanan pangan - Dinas Pertanian dan KP	Dinas Pertanian	70 %
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar rDaerah Kabupaten/Kota	Terawasinya Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	23 Kampung
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dinas Pertanian	1 Dokumen
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Dinas Pertanian	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Dinas Pertanian	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien -Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian	40 %
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Pertanian	8 dokumen
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	1 Dokumen
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian	1 Laporan
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas Pertanian	350 orang
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian	250 Orang/bulan
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas Pertanian	20 orang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut i Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Pertanian	7 Orang
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Dinas Pertanian	40 %
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	5577 Paket
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Pertanian	30720 Paket
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dinas Pertanian	12 Dokumen
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pertanian	10 Laporan
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Pertanian	20 %
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	1 Laporan 8 Paket
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Pertanian	1 Laporan
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayarkan honoranya	Dinas Pertanian	67 Orang
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barangmilik daerah	Dinas Pertanian	90 unit
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya aPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Pertanian	40 Unit
							Dinas Pertanian	
							Dinas Pertanian	
							Dinas Pertanian	
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Pertanian	120 Unit
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian	40 %
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	3500 ekor
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Pertanian	1 Laporan
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya pengadaan bibit	Dinas Pertanian	3000 ekor
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian	2500 Ekor



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan	Dinas Pertanian	40%
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penjaminan Kesehatan HewanPenutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota	Dinas Pertanian	30%
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Pertanian	1 Laporan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	40%
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	50 Poktan
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Pertanian	8 Unit
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Pertanian	20 Unit
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	22 Unit
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah SekolahLapang Kelompok Tani yang Terbentuk danBeroperasi	Dinas Pertanian	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran – Dinas Perdagangan dan Perindustrian		40%
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja ASN		34 Orang
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perindag	5 laporan
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji ASN Dinas Perindag		34 Orang
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perindag	34 Orang/Bulan
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Perindag	1 Orang
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perindag	11 Paket
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Perindag	8 Paket
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perindag	9 Laporan
3	30	01	2.07		PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Perindag	
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Perindag	5 Unit



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perindag	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perindag	1 Laporan
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Perindag	12 Laporan
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perindag	3 Laporan
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Perindag	54 Laporan
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Perindag	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Perindag	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Perindag	6 Unit
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perindag	730 Unit
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Perindag	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Perindag	6 Dokumen
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Perindag	1 Dokumen
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Perindag	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Perindag	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Perindag	50 Orang
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Perindag	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Perindag	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Perindag	12 Dokumen
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		Perindag	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Perindag	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Perindag	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Perindag	5 Dokumen
3	31	02	4.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Perindag	
3	31	02	4.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Perindag	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien - DISNAKERTRANS		40%
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		40%
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disnakertrans	1 Paket
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Disnakertrans	2 Paket
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Disnakertrans	1 Paket
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Disnakertrans	1 Paket
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnakertrans	5 Laporan
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Disnakertrans	40%
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disnakertrans	1 Paket
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Disnakertrans	40%
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Disnakertrans	4 Unit
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disnakertrans	2 Unit
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Disnakertrans	40%
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase keberhasilan proses pelatihan keterampilan berdasarkan kluster kompetis	Disnakertrans	40%
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Disnakertrans	70 Orang
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Disnakertrans	7 Unit
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Disnakertrans	40%
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase Informasi pasar kerja yang tersedia	Disnakertrans	40%
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		30 Orang
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

3	32	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya program penunjang urusan pemerintah daerah Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien - DISNAKERTRANS		40%
3	32	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		41 Orang 40%
3	32	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disnakertrans	41 Orang
3	32	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		40%
3	32	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disnakertrans	21 Laporan
3	32	01			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase ketersediaan kawasan transmigrasi	Disnakertrans	40%
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Perluasan kawasan Transmigrasi	Disnakertrans	40%
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Disnakertrans	15 Dokumen
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditempatkan	Disnakertrans	40%
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang tersebar	Disnakertrans	40%
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	5 Laporan
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Disnakertrans	20 Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	08	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	Disnakertrans	15 KK
3	32	03	2.01	10	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Disnakertrans	25 Orang
3	32	03	2.01	20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Disnakertrans	2 Lokasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan pemukiman yang dikembangkan	Disnakertrans	40%
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase pemukiman mandiri	Disnakertrans	40%
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Disnakertrans	5 Satuan Pemukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Keuangan PD		40%
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Setda	170 Orang/Bulan
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Setda	0 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Setda	0 Orang
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Setda	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Setda	0 Paket
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Setda	0 Paket
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Setda	0 Paket
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Setda	0 Paket
4	01	01	2.06	05	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangDisediakan	Setda	0 Paket
4	01	01	2.06	08	FasilitasiKunjungan Tamu	Jumlah LaporanFasilitasi KunjunganTamu	Setda	0 Laporan
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setda	0 Laporan
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Setda	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Setda	0 Unit
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Setda	0 Unit
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda	40%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Setda	0 Laporan
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Setda	12 Laporan
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Setda	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Setda	0 Unit
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Setda	0 Unit
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Setda	0 Unit
4	01	01	2.11		AdministrasiKeuangan danOperasionalKepala Daerahdan Wakil KepalaDaerah		Setda	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	0 Orang/Bulan
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah		Setda	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4	01	01	2.12	01	PenyediaanKebutuhan RumahTangga KepalaDaerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Setda	0 Paket
4	01	01	2.12	02	PenyediaanKebutuhan RumahTangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Setda	0 Paket
4	01	01	2.12	03	PenyediaanKebutuhan RumahTangga SekretariatDaerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Setda	0 Paket
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi		Setda	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Setda	0 Dokumen
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi iBirokrasi	Setda	0 Dokumen
4	01	01	2.13	04	Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setda	0 Dokumen
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		Setda	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH		Setda	
4	01	03			PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Setda	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Setda	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	3 Dokumen
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Setda	3 Dokumen
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	50 Orang
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		Setda	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH		Setda	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Setda	4 Perkara
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Penanganan Kasus Perkara	Setda	100%
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Setda	10 Perkara
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda	4 Perkara
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Setda	1000 Dokumen
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		Setda	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH		Setda	
4	01	02			Administrasi Tata Pemerintahan		Setda	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasi IPenataan Administrasi Pemerintahan	Setda	0 Dokumen
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Pertemuan Fasilitasi DOB	Setda	2 Kegiatan
4	01	02	2.01	03	FasilitasiPelaksanaanOtonomi Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD yang Tersusun	Setda	2 Dokumen
4	01	02	2.04		Fasilitasi KerjaSama Daerah		Setda	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Setda	0 Dokumen 1 Kegiatan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Dokumen KSB dan PKS Daerah	Setda	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

4	01				SEKRETARIAT DAERAH		Setda	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra, kegiatan keagamaan dan bantuan serta Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Setda	40%
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra, kegiatan keagamaan dan bantuan	Setda	40%
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Setda	60 Dokumen
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Setda	33 Dokumen
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Setda	10 Dokumen
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		Setda	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH		Setda	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Setda	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Setda	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setda	24 Laporan
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Setda	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		Setda	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH		Setda	24 Dokumen
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Setda	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Setda	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Setda	3 Dokumen
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Setda	3 Laporan
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Setda	3 Laporan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		Setda	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH		Setda	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Setda	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Setda	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Setda	0 Laporan
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Setda	0 Laporan
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Setda	0 Laporan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusanpemerintahan yang efektif dan efisien -SEK. DPRD		
4	02	01	2.01		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 Dokumen
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	2 Dokumen
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	2 Laporan
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Setwan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Setwan	43 Orang/Bulan
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Setwan	12 Dokumen
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Setwan	12 Dokumen 2 Gedung Kantor
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Setwan	1 Dokumen
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	2 Kegiatan 248 Pasang 8 Orang 42 Orang 38 Orang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Setwan	248 Paket
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Setwan	24 Orang
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	42 Orang
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	38 Orang
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyediaan Bahan/Material 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Setwan	12 Bulan 5 Jenis Alat 15 Jenis Alat 12 Bulan 5000 Bahan 150 Buku 12 Bulan 14 Kegiatan 5 Kegiatan
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Setwan	12 Paket
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Setwan	5 Paket
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Setwan	15 Paket
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Setwan	12 Paket
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Setwan	10 Paket
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Setwan	12 Paket
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setwan	14 Laporan
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pengadaan Mebel 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Setwan	1 Unit 1 Unit 6 Jenis 5 Jenis 0 Bangunan 6 Sarpras 6 Sarpras



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						atau Bangunan Lainnya		
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Setwan	1 Unit
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Setwan	10 Unit
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setwan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Setwan	12 Laporan
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Setwan	12 Laporan 1 Tahun
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Setwan	12 Unit
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Setwan	120 Unit
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Setwan	1 Unit
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Setwan	12 Bulan 240 Pasang 20 Orang
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Setwan	20 Orang/Bulan
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Setwan	240 Paket
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Setwan	20 Orang
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 2. Fasilitas Fraksi DPRD 3. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Setwan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Setwan	12 Dokumen
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Setwan	40 Laporan
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Setwan	20 Laporan
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Setwan	12 Paket
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Setwan	40%
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Setwan	1 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Setwan	1 Dokumen
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	8 Dokumen
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Setwan	2 Dokumen
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Pembahasan KUA dan PPAS 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Pembahasan APBD 4. Pembahasan APBD Perubahan 5. Pembahasan Laporan Semester 6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Setwan	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	2 Dokumen
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Setwan	2 Dokumen
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Setwan	1 Dokumen
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Setwan	1 Dokumen
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Setwan	2 Dokumen
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Setwan	2 Dokumen
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Setwan	48 Rapat 48 Rapat 48 Rapat 48 Rapat 48 Rapat 48 Rapat



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Keuangan 7. Pengawasan Penggunaan Anggaran 8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah		1 Dokumen
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Setwan	48 Laporan
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Setwan	48 Laporan
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Setwan	48 Laporan
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Setwan	48 Laporan
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Setwan	48 Laporan
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Setwan	48 Dokumen
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Setwan	48 Dokumen
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Setwan	1 Dokumen
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	1. Orientasi DPRD 2. Pendalaman Tugas DPRD 3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 7. Penyusunan Program Kerja DPRD	Setwan	2 Kali 2 Kali 12 Bulan 12 Bulan 2 Kali 8 Dokumen
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Setwan	2 Dokumen
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Setwan	4 Orang
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	3 Orang
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Setwan	34 Dokumen
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Setwan	8 Dokumen
4	02	02	2.05		Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah 2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 3. Pelaksanaan Reses	Setwan	51 Laporan 20 Dokumen 34 Dokumen
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Setwan	51 Laporan
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Setwan	20 Dokumen
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Setwan	34 Dokumen
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Setwan	12 Laporan
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	1. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Setwan	12 Dokumen
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Setwan	12 Dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Setwan	12 Laporan
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Setwan	25 Dokumen
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Setwan	36 Dokumen
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				PERENCANAAN			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sumber Daya Aparatur- BAPPEDALITBA	BP4D	40 %
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD		5 Dokumen
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BP4D	5 Dokumen
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	BP4D	1 Tahun
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	BP4D	12 bulan
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BP4D	4 Kegiatan
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BP4D	3 jenis
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BP4D	3 jenis
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BP4D	1 kegiatan
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BP4D	2 Dokumen
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar OPD Kabupaten	BP4D	30 kali
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BP4D	3 Kegiatan
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BP4D	3 Unit
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BP4D	1 kegiatan
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BP4D	2 Kegiatan
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BP4D	12 bulan
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga Honorer kantor yang terbayarkan	BP4D	12 bulan
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BP4D	3 Kegiatan
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BP4D	3 Unit
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diservis	BP4D	1 kegiatan
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BP4D	1 kegiatan
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi	BP4D	80 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					PEMBANGUNAN DAERAH	Pembangunan Daerah		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	terlaksananya kegiatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Daerah	BP4D	4 Kegiatan
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BP4D	1 Berita Acara
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BP4D	1 Berita Acara
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BP4D	4 Berita Acara
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BP4D	2 Dokumen
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah Kegiatan terkait Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	BP4D	3 Kegiatan
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	BP4D	10 Orang
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BP4D	3 Kegiatan
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BP4D	1 Laporan
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	BP4D	1 Kerja Sama
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BP4D	3 Laporan
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BP4D	75 %
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BP4D	1 Tahun
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP4D	1 Dokumen
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BP4D	1 Laporan
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BP4D	1 Laporan
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	BP4D	1 Laporan
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP4D	1 Dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BP4D	1 Laporan
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BP4D	1 Laporan
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	BP4D	8 Kegiatan
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BP4D	1 Dokumen
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BP4D	1 Laporan
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BP4D	1 Laporan
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BP4D	8 Kegiatan
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	BP4D	1 Laporan
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BP4D	1 Laporan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BP4D	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan daerah	BP4D	75 %
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	BP4D	4 dokumen
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	BP4D	1 Laporan
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	BP4D	1 Dokumen
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	BP4D	1 Dokumen
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	BP4D	4 Kegiatan
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	BP4D	1 Dokumen
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BP4D	3 Kegiatan
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur	BP4D	4 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BP4D	1 Laporan
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02				KEUANGAN			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	39 Orang/bulan
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	100 Orang
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD	0 Paket
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD	0 Paket
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	0 Laporan
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	0 Dokumen
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	1 Dokumen
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BPKAD	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPKAD	2 Unit
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BPKAD	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD	0 Laporan
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 tahun
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		BPKAD	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		BPKAD	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD	0 Dokumen
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD	3 Laporan
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKAD	1 Unit
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	BPKAD	0 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BPKAD	0 ObyekPajak
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BPKAD	0 Dokumen
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BPKAD	0 Dokumen
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKAD	0 Dokumen
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD	0 Laporan
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02				KEUANGAN			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	3 Dokumen
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	3 Laporan
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	BPKAD	40 %
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	BPKAD	60 Orang/bulan
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		BPKAD	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	200 Orang
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		BPKAD	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 Paket
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 Paket
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD	4 Paket
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD	5 Paket
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	12 Laporan
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	0 Dokumen
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		BPKAD	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPKAD	2 Unit
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPKAD	4 Unit
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BPKAD	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD	3 Laporan
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	54 Laporan
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BPKAD	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKAD	4 Unit
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKAD	2 Unit
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD	0 Unit
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKAD	75 Dokumen
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKAD	100 Dokumen
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	100 Dokumen
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	75 Dokumen
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	200 Dokumen
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	100 Dokumen
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	200 Dokumen
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	200 Dokumen
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		BPKAD	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	5 Dokumen
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	5 Dokumen
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	50 Dokumen
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		BPKAD	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	3 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kotadan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	100 Dokumen
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	1 Dokumen
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		BPKAD	
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	BPKAD	142 Laporan
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	5 Laporan
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		BPKAD	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		BPKAD	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKAD	75 Dokumen
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKAD	6 Laporan
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	2 Laporan
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	5 Dokumen
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	50 Laporan
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03				KEPEGAWAIAN			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan -BKPSDM		40 %
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN		100 %
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	61 Orang/bulan
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kinerja aparatur		100 %
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM	9 Orang
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan publik		100 %
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	16 Paket
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	110 Paket
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	2 Paket
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	BKPSDM	6 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Konsultasi SKPD		
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor	BKPSDM	75 %
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BKPSDM	10 Unit
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	11 Unit
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kinerja perangkat daerah	BKPSDM	100 %
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM	12 Laporan
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM	4 Laporan
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi pemeliharaan saran dan prasarana kantor	BKPSDM	100 %
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	BKPSDM	2 Unit
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	BKPSDM	3 Unit
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM	10 Unit
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terlaksananya kegiatan kepegawaian Daerah	BKPSDM	40 %
5	03	02	2.01		Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase selektifitas sistem rekrutmen	BKPSDM	80 %
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	650 Dokumen
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	80 Dokumen
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM	2 Lembaga
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	13 Dokumen
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN	BKPSDM	80 %
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	800 Dokumen
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	5 Dokumen
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase standar kemampuan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	BKPSDM	85 %
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	BKPSDM	200 Orang
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPSDM	85 Dokumen
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	65 Orang
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	BKPSDM	5 Dokumen
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	BKPSDM	100 Orang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase peninalain dan evaluasi kinerja Aparatur	BKPSDM	75 Dokumen
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	BKPSDM	200 Orang
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	4500 Orang
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya persentase pelayanan administrasi perkantoran - inspektorat		40 %
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Inspektorat	48 Orang/bulan
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	0 Laporan 57 Orang
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Inspektorat	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat	4 Paket
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	4 Paket
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	12 Laporan
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	4 Laporan
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	12 Laporan
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat	2 Unit
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat	1 Unit
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	40 %
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya Pengawasan Internal	Inspektorat	7 Kegiatan
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	2 Laporan
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	2 Laporan
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	3 Laporan
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	7 Laporan
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Inspektorat	100 Laporan
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah KesepakatanPengawasan Internal yang Terbentuk	Inspektorat	1 Kesepakatan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	2 Dokumen
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Inspektorat	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Inspektorat	15 Laporan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Inspektorat	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		Inspektorat	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	3 Kegiatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Distrik Arguni	Distrik Arguni	12 Bulan
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Distrik Arguni	Distrik Arguni	12 Bulan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Distrik Arguni	1 Tahun
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Distrik Arguni	1 Paket
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Distrik Arguni	1 Tahun
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Distrik Arguni	1 Paket
7	01	01	2.07		PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sewa Gudang	Distrik Arguni	1 Tahun
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Distrik Arguni	7 Unit
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sewa Gudang Kantor dan Rumah Tinggal Pegawai	Distrik Arguni	12 Bulan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distrik Arguni	13 Orang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Distrik Arguni	13 orang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	Distrik Arguni	100 %
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Distrik Arguni	1 Unit
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Distrik Arguni	12 Bulan
7	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Distrik Arguni	12 Bulan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase 4 Kampung Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung	Distrik Arguni	100 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung	Distrik Arguni	4 Kampung



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang Difasilitasi	Distrik Arguni	4 Kampung
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Distrik Arguni	100 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dilaksanakan	Distrik Arguni	1 Kegiatan
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dilaksanakan	Distrik Arguni	1 Kegiatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan di 5 Kampung	Distrik Arguni	100 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan	Distrik Arguni	5 Kampung
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terwujudnya Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan	Distrik Arguni	5 Kampung
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien pada Distrik Pariwari		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distrik Pariwari	58 Orang/bulan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparat distrik dan Kelurahan yang mengikuti pelatihan/diklat peningkatan kapasitas		40 %
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Distrik Pariwari	5 Orang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Adanya Barang Cetak dan Pengggandaan	Distrik Pariwari	40 %
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik Pariwari	12 Bulan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Distrik Pariwari	100 Paket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrik Pariwari	6 Laporan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung yang disewa oleh distrik untuk kelurahan	Distrik Pariwari	40 %
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Distrik Pariwari	5 Unit
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Distrik Pariwari	12 Unit
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Distrik Pariwari	2 Unit



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Umum Kantor Kelurahan dan Distrik	Distrik Pariwari	40 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Distrik Pariwari	12 Laporan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik Pariwari	12 Bulan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan	Distrik Pariwari	40 %
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Distrik Pariwari	4 Unit 3 Unit
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Distrik Pariwari	10 Unit
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Distrik Pariwari	2 Unit
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan pada Distrik Pariwari	Distrik Pariwari	40 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah anggota PKK Distrik dan Kelurahan	Distrik Pariwari	40 %
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik Pariwari	2 Laporan
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dikampung	Distrik Pariwari	40 %
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Distrik Pariwari	52 Pokmas/ Ormas
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Distrik Pariwari	Distrik Pariwari	40 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	Distrik Pariwari	40 %
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik Pariwari	100 Orang
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Distrik Pariwari	100 Orang
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang		40 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					KELURAHAN	diberdayakan pada Distrik Pariwari		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dikampung		40 %
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Distrik Pariwari	53 Unit
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Distrik Pariwari	11 Pokmas/ Ormas
7					UNSUR KEWILAYAHAN		Distrik Pariwari	
7	01				KECAMATAN		Distrik Pariwari	
7	01	03			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan pada Distrik Pariwari	Distrik Pariwari	40 %
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti forum musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Distrik Pariwari	40 %
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Distrik Pariwari	21 Unit
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Distrik Pariwari	30 Pokmas/ Ormas
7					UNSUR KEWILAYAHAN		Distrik Pariwari	
7	01				KECAMATAN		Distrik Pariwari	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan pada Distrik Pariwari	Distrik Pariwari	40 %
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dikampung	Distrik Pariwari	40 %
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Distrik Pariwari	70 Unit
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah Pokmas danOrmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Distrik Pariwari	11 Pokmas/ Ormas
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien Distrik Fakfak		40 %
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Jumlah konsultansi yang dilaksanakan		40 %
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya urusan keuangan daerah		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya"Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan		0% 40 % 40 %
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyelenggaraan	Ditrik Fakfak	40 % 40 % 40



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		% 40 % 40 % 40 %
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ditrik Fakfak	40 % 40 %
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ditrik Fakfak	40 % 40 % 40 % 40 %
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ditrik Fakfak	4 Laporan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ditrik Fakfak	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Ditrik Fakfak	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Ditrik Fakfak	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Ditrik Fakfak	1 Tahun



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	Ditrik Fakfak	40 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan di Desa	Ditrik Fakfak	40 % 40 %
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya kegiatan Bimbingan dan Pengawasan Distrik Fakfak	Ditrik Fakfak	40 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Ditrik Fakfak	40 % 0 %
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7					UNSUR KEWILAYAHAN		Ditrik Fakfak	
7	01				KECAMATAN		Ditrik Fakfak	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	Ditrik Fakfak	40 %
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BAK SAMPAH	Ditrik Fakfak	3 BUAH
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Ditrik Fakfak	3 BUAH
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ditrik Fakfak	15 Pokmas/ Ormas
7					UNSUR KEWILAYAHAN		Ditrik Fakfak	
7	01				KECAMATAN		Ditrik Fakfak	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	Ditrik Fakfak	40 %
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kampung	Ditrik Fakfak	1 Tahun
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Ditrik Fakfak	3 Unit
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Ditrik Fakfak	2 pokmas/ Ormas
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien Distrik Wartutin		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	Distrik Wartutin	22



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

								Orang/bulan
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Distrik Wartutin	12 Dokumen
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Distrik Wartutin	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Distrik Wartutin	12 Paket
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Distrik Wartutin	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distrik Wartutin	12 Paket
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Distrik Wartutin	12 Paket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrik Wartutin	12 Laporan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Distrik Wartutin	40 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Distrik Wartutin	12 Laporan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik Wartutin	12 Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Distrik Wartutin	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Distrik Wartutin	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik Wartutin	12 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Distrik Wartutin	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Distrik Wartutin	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik Wartutin	500 Orang
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan –Distrik Mbahamdandara		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	D.Mbahamdandara	19 Orang/bulan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	D.Mbahamdandara	14 Laporan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tamu yang datang ke Distrik		40 %
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	D.Mbahamdandara	3 Laporan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	D.Mbahamdandara	1 Laporan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dan Operasional	D.Mbahamdandara	40 %
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	D.Mbahamdandara	2 Laporan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan yang terpenuhi	D.Mbahamdandara	40 %
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	D.Mbahamdandara	2 Laporan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sewa Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pegawai	D.Mbahamdandara	40 %
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	D.Mbahamdandara	2 Laporan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	D.Mbahamdandara	4 Laporan
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Penata Organisasi	D.Mbahamdandara	40 %
7	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	D.Mbahamdandara	1 Dokumen
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		D.Mbahamdandara	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		D.Mbahamdandara	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	D.Mbahamdandara	3 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	D.Mbahamdandara	40 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	D.Mbahamdandara	40 %
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Dokumen Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	D.Mbahamdandara	1 Dokumen
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi keuangan		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Dokumen
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya penunjang kegiatan administrasi umum perangkat daerah		40 %
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Dokumen
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3 Dokumen
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Barang milik daerah penunjang		40 %
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Pengadaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Dokumen
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Dokumen
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40 %
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Dokumen
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		40 %
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Dokumen
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Dokumen
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Terlaksananya Penata Organisasi		40 %
7	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2 Dokumen
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan di Distrik Karas		40 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	PRESENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA		40 %
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Distrik Karas		40 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintah Umum		40 %
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Jumlah Dokumen Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan		1 Dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien Distrik Fakfak Barat		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distrik FF Barat	35 Orang/bulan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Distrik FF Barat	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Distrik FF Barat	3 Paket
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Distrik FF Barat	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik FF Barat	10 Paket
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Distrik FF Barat	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Distrik FF Barat	6 Unit
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Distrik FF Barat	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Distrik FF Barat	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Distrik FF Barat	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Distrik FF Barat	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik FF Barat	70 Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN		Distrik FF Barat	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Distrik FF Barat	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Distrik FF Barat	9 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Distrik FF Barat	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Distrik FF Barat	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Distrik FF Barat	250 Orang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Distrik FF Barat	60 Orang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Distrik FF Barat	25 Dokumen
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Distrik FF Barat	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien di Distrik Kokas		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distrik Kokas	37 Orang/bulan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Distrik Kokas	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik Kokas	5 Paket
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Distrik Kokas	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Distrik Kokas	1 Unit
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Distrik Kokas	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik Kokas	12 Bulan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Distrik Kokas	
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Distrik Kokas	1 Unit
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Distrik Kokas	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Distrik Kokas	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik Kokas	3 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terpenuhinya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik Kokas	1 Tahun
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik Kokas	40 %
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik Kokas	34 Orang
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Distrik Kokas	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik Kokas	1 Paket
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Distrik Kokas	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Distrik Kokas	6 Unit
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Distrik Kokas	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Distrik Kokas	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik Kokas	2 Laporan
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya urusan penunjang pemerintahan di Distrik Tomage		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan urusan keuangan daerah		1 Tahun
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distrik Tomage	15 Orang/bulan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Distrik Tomage	1 Paket
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Distrik Tomage	1 Paket
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distrik Tomage	3 Paket
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik Tomage	2 Paket
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Distrik Tomage	1 Paket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrik Tomage	4 Laporan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Distrik Tomage	1 Tahun
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Distrik Tomage	1 Laporan
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distrik Tomage	1 Laporan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik Tomage	6 Orang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Distrik Tomage	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Distrik Tomage	1 Unit
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Distrik Tomage	1 Unit
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Distrik Tomage	9 Kampung
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik Tomage	0 Orang 19 Orang
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Fakfak Timur Tengah	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah laporan Keuangan yang disusun		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distrik FF Timteng	19 Orang/bulan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perangkat Daerah	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timteng	30 Paket
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timteng	10 Paket
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timteng	10 Paket
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Distrik FF Timteng	8000 Paket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrik FF Timteng	12 Laporan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Distrik FF Timteng	12 Laporan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Distrik FF Timteng	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Distrik FF Timteng	10 Unit
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Persentase meningkatnya Jumlah Pelimpahan Kegiatan	Distrik FF Timteng	40 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Camat			
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Distrik FF Timteng	5 Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Distrik FF Timteng	10 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan – Distrik Fakfak Timur Tengah	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik FF Timteng	200 Orang
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Distrik FF Timteng	50 Orang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di distrik fakfak timur tengah	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase meningkatnya Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Distrik FF Timteng	10 Dokumen
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Furwagi		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan yang disusun Terlaksananya Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD		40 % 40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Dsitrik Furwagi	15 Orang/bulan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal dan		40 % 40 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						pelatihanJumlah Pakaian DinasYang tersedia (PDH,Batik, Olah Raga)		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Distrik FF Timteng	0 Paket
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Gedung yang disewa oleh distrik untuk kantor dan rumah tinggal untuk pegawai Jumlah Alat Tulis kantor dan BBM yang terpenuhi Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi Jumlah kegiatan yang dikoordinasi Jumlah Komponen Listrik yang terpenuhi Jumlah Peralatan kantor yang terpenuhi Jumlah Surat Menyurat yang terpenuhi	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timteng	0 Paket
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan BBM yang Terpenuhi Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timteng	1 Tahun0 Paket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrik FF Timteng	1 Laporan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Distrik FF Timteng	1 Laporan
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Distrik FF Timteng	1 Unit
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan yang terpenuhi	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timteng	1 Laporan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timteng	12 Laporan
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Distrik FF Timteng	5 Laporan
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Distrik FF Timteng	2 Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Keterlibatan Masyarakat	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaanMasyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik FF Timteng	8 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentaseTerselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Distrik FF Timteng	0 Orang



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Distrik FF Timteng	0 Orang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya kegiatan Bimbingan dan Pengawasan Distrik Furwagi	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang difasilitasi	Distrik FF Timteng	40 %
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Distrik FF Timteng	8 Dokumen
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran-Distrik Bomberay		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distrik Bomberay	18 Orang/bulan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Daerah	Distrik Bomberay	40 %
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Distrik Bomberay	1 Paket
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Distrik Bomberay	1 Dokumen
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Distrik Bomberay	40 %
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik Bomberay	1 Paket
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah untuk operasional kantor distrik	Distrik Bomberay	40 %
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Distrik Bomberay	1 Laporan
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Distrik Bomberay	1 Unit
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Distrik Bomberay	40 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Distrik Bomberay	1 Laporan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik Bomberay	12 Bulan/Orang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Distrik Bomberay	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Distrik Bomberay	1 Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Distrik Bomberay	40 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		40 %
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Distrik Bomberay	1 Laporan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik Bomberay	7 Kampung
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum	Distrik Bomberay	40 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Distrik Bomberay	40 %
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik Bomberay	1 Paket
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Distrik Bomberay	35 Orang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya kegiatan Bimbingan dan Pengawasan Distrik Bomberay	Distrik Bomberay	40 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan di tingkat kampung	Distrik Bomberay	40 %
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Distrik Bomberay	1 Dokumen
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien pada Distrik Fakfak timur	Distrik FF Timur	40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan yang disusun		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang/bulan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	Distrik FF Timur	40 %
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timur	1 Paket
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timur	1 Paket
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Distrik FF Timur	1 Paket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrik FF Timur	1 Laporan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah	Distrik FF Timur	40 %
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Distrik FF Timur	43 Unit
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan	Distrik FF Timur	40 %
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik FF Timur	12 Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Fakfak Timur	Distrik FF Timur	40 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan	Distrik FF Timur	40 %
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Distrik FF Timur	6 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik FF Timur	1 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Distrik Fakfak Timur	Distrik FF Timur	40 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Distrik FF Timur	40 %
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik FF Timur	27 Orang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya kegiatan Bimbingan dan Pengawasan Distrik Fakfak Timur	Distrik FF Timur	40 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Distrik FF Timur	40 %
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Distrik FF Timur	1 Dokumen
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn		100 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya		40 %
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah		40 %
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20 Paket
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		15 Paket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Laporan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100 %
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		1 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		10 Dokumen
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		10 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan		100 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Penugasan Kepala Daerah	dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Peserta MTQ Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		100 Orang
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien Distrik Kayauni	Distrik Kayauni	40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Distrik Kayauni	40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Distrik Kayauni	12 Dokumen
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Distrik Kayauni	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik Kayauni	4 Paket
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Distrik Kayauni	1 Paket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrik Kayauni	2 Laporan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Distrik Kayauni	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Distrik Kayauni	2 Unit
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Distrik Kayauni	5 Unit
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Distrik Kayauni	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik Kayauni	1 Laporan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik Kayauni	12 Laporan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Distrik Kayauni	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Distrik Kayauni	5 Unit
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi		Distrik Kayauni	
7	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	Distrik Kayauni	1 Laporan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Laksana		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Distrik Kayauni	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Distrik Kayauni	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Distrik Kayauni	4 Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik Kayauni	4 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Distrik Kayauni	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Distrik Kayauni	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik Kayauni	350 Orang
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Distrik Kayauni	300 Orang
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Urusan Pemerintahan Daerah – DISTRIK FAKFAK TENGAH		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		85 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distrik FF Tengah	48 Orang/bulan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Distrik FF Tengah	10 Orang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Distrik FF Tengah	10 Paket
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distrik FF Tengah	10 Paket
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik FF Tengah	10 Paket
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Distrik FF Tengah	5 Paket



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Disediakan		
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	Distrik FF Tengah	13 Laporan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrik FF Tengah	2 Laporan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Distrik FF Tengah	7 Unit
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Distrik FF Tengah	13 Laporan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik FF Tengah	12 Laporan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Distrik FF Tengah	20 Unit
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Distrik FF Tengah	40 %
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	02	2.04	03	PelaksanaanUrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lainyang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Distrik FF Tengah	13 Laporan
7	01	03			PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Distrik FF Tengah	40 %
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Distrik FF Tengah	14 LembagaKema syarakatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik FF Tengah	13 Laporan
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PresentasePemberdayaanMasyarakat Desa danKelurahan	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah Pokmas danOrmas yangMelaksanakanPemberdayaanMasyarakat diKelurahan	Distrik FF Tengah	36 Pokmas/ Ormas
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Distrik FF Tengah	40 %
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Distrik FF Tengah	13 Laporan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PersentaseTerlaksananya kegiatan program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum diDistrik Fakfak Tengah	Distrik FF Tengah	40 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	04	2.01	02	HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Distrik FF Tengah	13 Laporan
7	01	05			PROGRAMPENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHANUMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintan Umum - Distrik FakfakTengah	Distrik FF Tengah	60 %
7	01	05	2.01		PenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmum SesuaiPenugasan KepalaDaerah	Presentase Urusan Pemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik FF Tengah	100 Orang
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Distrik FF Tengah	60 Orang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terselenggaranya kegiatan Bimbingan dan Pengawasan Distrik Fakfak Tengah	Distrik FF Tengah	40 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase fasilitasi, rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Distrik FF Tengah	85 %
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Distrik FF Tengah	13 Dokumen
7	01	06	2.01	11	FasilitasiPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum	Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum	Distrik FF Tengah	13 Dokumen
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah DokumenFasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas,Fungsi, dan KewajibanLembagaKemasyarakatan	Distrik FF Tengah	13 Dokumen
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Distrik FF Tengah	13 Dokumen
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		40 %
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	PRESENTASE PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT		85 %
7	01	02	2.01	02	PeningkatanEfektifitas KegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		40 %
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		85 %
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		25 Unit
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA	Persentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien di Distrik teluk Patipi		40 %
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		40 %
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Distrik teluk Patipi	32 Orang/bulan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Aparatur Distrik	Distrik teluk Patipi	40 %
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Distrik teluk Patipi	3 Paket
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Distrik teluk Patipi	40 %
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Distrik teluk Patipi	1 Paket
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Distrik teluk Patipi	2 Paket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Distrik teluk Patipi	1 Laporan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Distrik teluk Patipi	40 %
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Distrik teluk Patipi	2 Paket
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Distrik teluk Patipi	40 %
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Distrik teluk Patipi	20 Laporan
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Terlaksananya Pelayanan Publik	Distrik teluk Patipi	40 %
7	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Distrik teluk Patipi	1 Dokumen
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan di Distrik Teluk Patipi	Distrik teluk Patipi	40 %
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Distrik teluk Patipi	1 Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Distrik Teluk Patipi	Distrik teluk Patipi	40 %
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Persentase Terlaksananya Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Distrik teluk Patipi	40 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

					Penugasan Kepala Daerah	Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Distrik teluk Patipi	1 Laporan 0 Orang
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Distrik teluk Patipi	1 Laporan 0 Orang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dokumen
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran - KESBANGPOL		40 %
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan		12 Bulan
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	34 Orang/bulan
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah		40 %
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kesbangpol	1 Paket
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Kesbangpol	40 %
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	2 Paket
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	4 Paket
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Kesbangpol	3 Paket



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

						Disediakan		
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	12 Laporan
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kesbangpol	40 %
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kesbangpol	3 Unit
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kesbangpol	40 Unit
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya ketersediaan Jasa penunjang Urusan Kantor	Kesbangpol	12 Bulan
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kesbangpol	12 Laporan
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kesbangpol	40 %
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kesbangpol	3 Unit
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kesbangpol	10 Unit
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan	Kesbangpol	40 %
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kesbangpol	40 %
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	200 Orang
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol	120 Orang
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partisipasi Masyarakat dalam Keg.Parpol, Ormas dan PEMILU/PEMILUKADA	Kesbangpol	17 Distrik



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kesbangpol	40 %
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	680 Orang
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	100 Orang
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol	17 Laporan
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Kesbangpol	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Kesbangpol	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	250 Orang
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol	4 Laporan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	Kesbangpol	40 %
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesbangpol	40 %
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Kesbangpol	75 Orang



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

					Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Masalah Konflik Sosial yang difasilitasi di kabupaten Fakfak	Kesbangpol	40 %
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	40 %
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	200 Orang
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	5 Laporan
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol	4 Dokumen

Sumber Data: BP4D Kab. Fakfak Tahun 2023)



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Fakfak menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan *Good Governance*.

a. Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;



10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota.

b. Kebijakan Umum

Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran. Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu sasaran dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Fakfak menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dengan DPRD Kabupaten Fakfak Nomor : 900/1504/BUP/2022 dan 900/21/DPRD-FF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023, Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-



OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

c. Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi dalam rangka mewujudkan visi. Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mencapai tujuan dan sasaran dituntut untuk dapat mengoptimalkan peningkatan kinerja pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas terutama berkaitan dengan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur serta kemiskinan dan pengangguran juga dibidang reformasi birokrasi dan tata kelola perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu penyusunan program dan kegiatan pada setiap OPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara harus dapat mencermati berbagai tantangan yang dihadapi serta standar pelayanan yang ditetapkan yaitu sesuai dengan pembagian kewenangan urusan pemerintah daerah sehingga dapat mengatasi isu-isu strategis secara lebih tepat terarah dan berkesinambungan.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel 2.1
CAPAIAN KINERJA MAKRO TAHUN 2023

No	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERUBAHAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,26	70,85	0,84
2	Angka Kemiskinan	18,13	17,840	-1,60
3	Angka Pengangguran	6,75	6,52	-0,23
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,24*	1.45**	-0,79
5	Pendapatan Per Kapita	64,89*	67,03**	3,30
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,330	0,359	8,79

Sumber : (BPS Kabupaten Fakfak Tahun 2023 per tanggal)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.



2.2.1 INDIKATOR KINERJA KELUARAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDIDIKAN	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	84	Didikpora	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	925	Didikpora	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3471	Didikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	349	Didikpora	
		Jumlah pendidik pada PAUD	455	Didikpora	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	22	Didikpora	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	10	Didikpor	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	141	Didikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Didikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah	0	Didikpora	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12057	Didikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2743	Didikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1145	Didikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	512	Didikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1235	Didikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	489	Didikpora	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	364	Didikpora	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	41	Didikpora	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	240	Didikpora	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	87	Didikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1061	Didikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV)	489	Didikpora	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	111	Didikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	27	Didikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	115	Didikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	49	Didikpora	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	5	Didikpora	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Didikpora	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	827	Didikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	79	Didikpora	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	75	Didikpora	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	75	Didikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	111	Didikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	7	Didikpora	
2.	KESEHATAN	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	Dinas Kesehatan	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1784	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	262	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1273	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	201	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2362	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	212	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5148	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	5	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6035	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai	60	Dinas Kesehatan	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5148	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	50	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5148	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	50	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	20	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	30	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	20	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	624	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	20	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	20	Dinas Kesehatan	
3.	PEKERJAAN UMU DAN TATA RUANG	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	136309	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	5050	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	300971	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	36412	Dinas PUPRP2KP	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	2166	Dinas PUPRP2KP	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	69	Dinas PUPRP2KP	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	18	Dinas PUPRP2KP	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas PUPRP2KP	
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPRP2KP	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha	0	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM			
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	5	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	Dinas PUPRP2KP	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Dinas PUPRP2KP	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Dinas PUPRP2KP	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas PUPRP2KP	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	Dinas PUPRP2KP	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PUPRP2KP	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas PUPRP2KP	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	67	Dinas PUPRP2KP	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPRP2KP	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	518	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang jalan yang dibangun	6	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang jembatan yang dibangun	10	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	5	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	7	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang jalan yang dipelihara	4	Dinas PUPRP2KP	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan	0	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	1	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	834	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan	0	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	2	Dinas PUPRP2KP	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	2	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPRP2KP	
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	766	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	32	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	160	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	17	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	15	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	2	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	160	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	794	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan	0	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1915	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	6713	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	154.1	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	135	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	7094	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah di kab/kota	18306	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah unit PK RTLH	135	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah tidak layak huni	6713	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio rumah dan KK	18306	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah rumah pembangunan baru	10	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	15033	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	6781	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	601	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	12581	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	14	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	7356	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	15	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	15	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	43	Dinas PUPRP2KP	
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	22	Satpol PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1540		
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8	Satpol PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Satpol PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	2	Satpol PP	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	490	Satpol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	Satpol PP	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	53795	Satpol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	Satpol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	Satpol PP	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara	65	Satpol PP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang ikut pelatihan			
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	27	Satpol PP	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	118	Satpol PP	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	Satpol PP	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	Satpol PP	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	240	Satpol PP	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Satpol PP	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	Satpol PP	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	0	Satpol PP	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	Satpol PP	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	Satpol PP	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan	0	Satpol PP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa			
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	2	Satpol PP	
		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0	Satpol PP	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Satpol PP	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	Satpol PP	
6.	SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	986	Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	50	Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	142	Sosial	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	137	Sosial	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi			
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	3	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	6	Sosial	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Sosial	
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Sosial	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Sosial	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	43	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	120	Sosial	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan	198	Sosial	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kepada keluarga dan masyarakat			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	4	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	2	Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0	Sosial	
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	4482	Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	379	Sosial	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Sosial	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Sosial	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	42	Sosial	
7.	TENAGA KERJA	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Disnakertrans	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Disnakertrans	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Disnakertrans	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	19	Disnakertrans	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	2	Disnakertrans	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1	Disnakertrans	
		Persentase LPK yang terakreditasi	0	Disnakertrans	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	1	Disnakertrans	
		Jumlah penganggur yang dilatih	37	Disnakertrans	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	37	Disnakertrans	
		Persentase penyerapan lulusan	0	Disnakertrans	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Disnakertrans	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Disnakertrans	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Disnakertrans	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Disnakertrans	
		Data tingkat produktivitas total	0	Disnakertrans	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	10	Disnakertrans	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0	Disnakertrans	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0	Disnakertrans	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	1	Disnakertrans	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	350	Disnakertrans	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	5	Disnakertrans	
		Jumlah mogok kerja	0	Disnakertrans	
		Jumlah penutupan perusahaan	0	Disnakertrans	
		Jumlah perselisihan kepentingan	3	Disnakertrans	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnakertrans	
		Jumlah perselisihan PHK	2	Disnakertrans	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	Disnakertrans	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Disnakertrans	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	Disnakertrans	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh	0	Disnakertrans	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Mediator Hubungan Industrial			
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	10	Disnakertrans	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	990	Disnakertrans	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	1	Disnakertrans	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Disnakertrans	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Disnakertrans	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Disnakertrans	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0	Disnakertrans	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Disnakertrans	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Disnakertrans	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0	Disnakertrans	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Disnakertrans	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang	0	Disnakertrans	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Disnakertrans	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Disnakertrans	
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	35	DP3P2AKB	
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0	DP3P2AKB	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	DP3P2AKB	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	DP3P2AKB	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DP3P2AKB	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	DP3P2AKB	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	DP3P2AKB	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1	DP3P2AKB	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota	525	DP3P2AKB	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang sudah dilatih			
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	DP3P2AKB	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	DP3P2AKB	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	DP3P2AKB	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	DP3P2AKB	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		
9.	PANGAN	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0	Dinas Pertanian	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	2	Dinas Pertanian	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Pertanian	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	6	Dinas Pertanian	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	17	Dinas Pertanian	
		Tertanganinya kerawanan pangan	1	Dinas Pertanian	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1	Dinas Pertanian	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	5	Dinas Pertanian	
10.	PERTANAHAN	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	DLHP	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	DLHP	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	DLHP	
		Dokumen Izin membuka tanah	0	DLHP	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100	DLHP	
11.	LINGKUNGAN HIDUP	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	0	DLHP	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	93	DLHP	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	100	DLHP	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	0	DLHP	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	42	DLHP	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	20	DLHP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	DLHP	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLHP	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	0	DLHP	
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerbitan akta perkawinan	100	Disdukcapi	
		Penerbitan akta perceraian	100	Disdukcapi	
		Penerbitan akta kematian	100	Disdukcapi	
		Penyajian data kependudukan	1700	Disdukcapi	
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	22	DPMK	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	22	DPMK	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan	374	DPMK	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kapasitas dan diberdayakan			
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DPMK	
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	DP3AP2KB	Belum ada GDKP yang di Perdakan
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23	DP3AP2KB	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	19	DP3AP2KB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	DP3AP2KB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	5	DP3AP2KB	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	DP3AP2KB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	99	DP3AP2KB	
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	0	DP3AP2KB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	41	DP3AP2KB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	8	DP3AP2KB	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	38	DP3AP2KB	
15.	PERHUBUNGAN	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100	Dinas Perhubungan	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	0	Dinas Perhubungan	
		Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	1771	Dinas Perhubungan	
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	10638	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Dinas Kominfo	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	0	Dinas Kominfo	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	65957	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	21276	Dinas Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	Dinas Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0	Dinas Kominfo	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	Dinas Kominfo	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	Dinas Kominfo	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	0	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang	0	Dinas Kominfo	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city			
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2	Dinas Kominfo	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Kominfo	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	765097	Dinas Kominfo	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0	Dinas Kominfo	
17.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	44117	Koperasi & UKM	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	12778	Koperasi & UKM	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah	52515	Koperasi & UKM	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	Koperasi & UKM	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	13522	Koperasi & UKM	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8302	Koperasi & UKM	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Koperasi & UKM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Koperasi & UKM	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5974	Koperasi & UKM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Koperasi & UKM	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Koperasi & UKM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan	0	Koperasi & UKM	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Koperasi & UKM	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3422	Koperasi & UKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	12778	Koperasi & UKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	Koperasi & UKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	7799	Koperasi & UKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	5515	Koperasi & UKM	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	100	Koperasi & UKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	5019	Koperasi & UKM	
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMTSP	
18.	PENANAMAN MODAL	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	DPMTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intentif penanaman modal	0	DPMTSP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	DPMTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	0	DPMTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	10	DPMTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1167	DPMTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	7.2812	DPMTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	3	DPMTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0	DPMTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	2	DPMTSP	
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	479	Dinas Pendidikan, Pemuda&Olahraga	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	285	Dinas Pendidikan, Pemuda&Olahraga	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	299	Dinas Pendidikan, Pemuda&Olahraga	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	273	Dinas Pendidikan, Pemuda&Olahraga	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	150	Dinas Pendidikan, Pemuda&Olahraga	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat	50	Dinas Pendidikan,	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		daerah		Pemuda&Olahraga	
20.	STATISTIK	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komifo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Dinas Komifo	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	Dinas Komifo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Komifo	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Dinas Komifo	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0	Dinas Komifo	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0	Dinas Komifo	
21.	PERSANDIAN	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komifo	
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Komifo	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	Dinas Komifo	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	0	Dinas Komifo	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	KEBUDAYAAN	(PHKS) yang ditetapkan			
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	28	Parawisata dan Kebudayaan	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	2	Parawisata dan Kebudayaan	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mda meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1	Parawisata dan Kebudayaan	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	14	Parawisata dan Kebudayaan	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	Parawisata dan Kebudayaan	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	11	Parawisata dan Kebudayaan	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	5	Parawisata dan Kebudayaan	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	2	Parawisata dan Kebudayaan	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	3	Parawisata dan Kebudayaan	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Parawisata dan Kebudayaan	
23.	PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	53	Dinas Perpustakaan &Kearsipan	
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	8	Dinas Perpustakaan &Kearsipan	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.1	Dinas Perpustakaan &Kearsipan	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	8	Dinas Perpustakaan &Kearsipan	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perpustakaan			
		Jumlah masyarakat yang gemar membaca di masyarakat	12	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	425	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24.	KEARSIPAN	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media	0	Dinas Perpustakaan	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		&Kearsipan	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan &Kearsipan	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan &Kearsipan	
25.	PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Dinas Perikanan&Kelautan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	1	Dinas Perikanan&Kelautan	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Perikanan&Kelautan	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	272	Dinas Perikanan&Kelautan	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1500	Dinas Perikanan&Kelautan	
26.	PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	16	Parawisata dan Kebudayaan	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	23	Parawisata dan Kebudayaan	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0	Parawisata dan Kebudayaan	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	Parawisata dan Kebudayaan	
27.	PERTANIAN	Sarana pertanian yang diberikan	41	Dinas Pertanian	
		Prasarana pertanian yang digunakan	6	Dinas Pertanian	
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian	
		Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Pertanian	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	Dinas Pertanian	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	Dinas Pertanian	
28.	KEHUTANAN	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	KPHP Unit XVI Fakfak	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	61	KPHP Unit XVI Fakfak	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	150	KPHP Unit XVI Fakfak	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	KPHP Unit XVI Fakfak	
29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	DPMPTSP	
30.	PERDANGANGAN	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase penerbitan TDG	100	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	7727	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	4	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	22000	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan	2	Dinas Perdagangan &	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		Perindustrian	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	37	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
31.	PERINDUSTRIAN	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	38333	Dinas Perdagangan & Perindustrian/ DPMPTSP	
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian/ DPMPTSP	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	38333	Dinas Perdagangan & Perindustrian/ DPMPTSP	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	38333	Dinas Perdagangan & Perindustrian/ DPMPTSP	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	2145	Dinas Perdagangan & Perindustrian/ DPMPTSP	
32.	TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	2	Disnakertrans	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	Disnakertrans	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1	Disnakertrans	

Sumber : (Data per OPD di Kabupaten Fakfak Tahun 2023)



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	86,623409	Didikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,995223	Didikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	82,174421	Didikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	24,425635	Didikpora	
2.	KESEHATAN	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,323084	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97,539639	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	72,909507	Dinas Kesehatan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	71,058965	Dinas Kesehatan	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	57,689279	Dinas Kesehatan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49,970971	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29,574769	Dinas Kesehatan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,347147	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,719168	Dinas Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	71,875	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	72,203157	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	68,580858	Dinas Kesehatan	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	55,935412	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,	5,6046741	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	12,5	Dinas PUPRP2KP	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	64,737059	Dinas PUPRP2KP	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67,7617388	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas PUPRP2KP	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	39,061263	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	63,181818	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	98,484849	Dinas PUPRP2KP	
4.	PERUMAHAN RAKYAT	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/	0	Dinas PUPRP2KP	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kota yang ditangani			
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	100	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	Dinas PUPRP2KP	
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah pengaduan yang ditangani pelanggaran yang masuk	100	Satpol PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,3936448	Satpol PP/BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	36,4963504	Satpol PP/BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satpol PP/BPBD	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	4,8	Satpol PP/BPBD	
6.	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100	Dinas Sosial	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bencana daerah kabupaten/kota			
7.	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Disnakertrans	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,888889	Disnakertrans	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	884041,51	BPS/Disnakertrans	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2,8571429	BPS/Disnakertrans	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	4,3434343	Disnakertrans	
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada be lanja langsung APBD	89,658088	DP3AP2KB	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100	DP3AP2KB	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	46,953605	DP3AP2KB	
9.	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0	Dinas Pertanian	
10.	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi	100	DLHP/Kantor Pertanahan	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang diterbitkan			
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	DLHP	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0	DLHP	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	100	DLHP	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	DLHP	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	71,428571	DLHP	
11.	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	60	DLHP	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	74,544464	DLHP	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	2,7027027	DLHP	
12.	ADMINISTRASI	Perekaman KTP Elektronik	94,0812899	Dukcapil	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	KEPENDUDUKAN	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	41,6825577	Dukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran	82,7312481	Dukcapil	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	13,3333333	Dukcapil	
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100	DPMK	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100	DPMK	
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	6	DP3AP2KB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	98,601775	DP3AP2KB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	0	DP3AP2KB	
15.	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,012	DinasPerhubungan	
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	0	Dinas Perhubungan	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,36	Dinas Perhubungan	
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	82,9787234	Dinas Kominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	33,3333333	Dinas Kominfo	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	50,2618832	Dinas Kominfo	
17.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	11,3207547	Koperasi & UKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	7,7581289	Koperasi & UKM	
18.	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	271,43947	DPMTSP	
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,6897668	DISPORA	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,8840674	DISPORA	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	0	DISPORA	
20.	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	6,3829787	Dinas Kominfo	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	6,3829787	Dinas Kominfo	
21.	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	Dinas Kominfo	
22.	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	0	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	87	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
24.	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	265	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
25.	KELAUTAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	66.37493	Dinas Perikanan dan Kelautan	
26.	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan	-81.68778	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-81.68778	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
		Tingkat Hunian Akomodasi	1,5699619	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,4091712	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	18,2498076	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
27.	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	371175	Dinas Pertanian	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-172,7272727	Dinas Pertanian	
28.	KEHUTANAN	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga Pemulihan ekosistem pada Tahura Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	211	KPHP Unit XVI Fakfak	
29	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	DPMTSP	
29.	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	93	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	110	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	2	Dinas Perdagangan & Perindustrian	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.213552	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	11.30435	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
31.	TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2	Dinas Perindag	

Sumber : (Data per OPD di Kabupaten Fakfak Tahun 2023)



2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	163,6406936	BPKAD	
		Rasio PAD	4,5837928	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,596	BPKAD	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0	BPKAD	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	-89,8490922	BPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	0	BPKAD	
2.	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	100	BARJAS/SETDA	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	BARJAS/SETDA	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	36,8987926	BARJAS/SETDA	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0	BARJAS/SETDA	
3.	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78,7391013	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3,0710173	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	420,3125	BKPSDM	
4.	MANAJEMEN KEUANGAN	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0	BPKAD	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	32,6557832	BPKAD	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

		Manajemen Aset	1	BPKAD	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,617254	BPKAD	
5.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	0	BPKAD/KOMINFO	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	25	BPKAD/KOMINFO	



2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan diandalkan. Tahun 2023 merupakan tahun Kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026. Secara umum penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 dapat dikatakan berhasil, hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah kabupaten Fakfak Tahun 2023. Berikut ini informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Fakfak :

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Fakfak Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021–2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) Tahun 2023, serta Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kabupaten Fakfak Tahun 2023

MISI I : Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Fakfak Yang Cerdas, Sehat, Religius Dan Produktif Yang Memiliki Daya Saing Melalui Pendidikan Dan Derajat Kesehatan.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal	Angka Harapan Lama Sekolah	15,34 Per tahun
	Meningkatnya budaya literasi dalam masyarakat	Peningkatan kunjungan ke perpustakaan	5 %
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,91 per tahun
	Percepatan penanganan dan pencegahan stunting	Prevalensi balita stunting	15 %
	Meningkatnya partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan daerah	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	90%
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100 %
MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah Yang Berbasis Pariwisata, Pertanian Dalam Arti Luas Dan Kelautan.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah Pengangguran/Tingkat Pengangguran	9,46 Jiwa
	Meningkatnya minat dan laju realisasi investasi di bidang strategis daerah	Laju pertumbuhan Investasi daerah	6 %
	Meningkatnya pengembangan sektor-sektor strategis daerah di bidang Pariwisata,Pertanian dan Kelautan	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata pertahun	8 %
		Pertumbuhan Produksi Perikanan	6 %
		Pertumbuhan Produksi Pertanian	7 %
	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi barang dan jasa daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan PDRB	7 %
	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM	Cakupan UKM yang diberdayakan	75 %
		Cakupan legalitas kelembagaan koperasi yang memenuhi standard	55 %
MISI III : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Akuntabel Berbasis Pelayanan			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah Kabupaten Fakfak	WTP
		Pertumbuhan PAD	5 %
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi baik dari aspek sektor maupun spasial	Tingkat integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C
	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan	Skor Maturitas SPIP	3



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

	pemerintahan daerah		
	Meningkatnya kompetensi aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	73 %
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung	Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	35 %
	Meningkatnya sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	-
	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki registrasi kependudukan secara lengkap	90 %
	Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	Cakupan keterisian data pada sistem administrasi dan informasi kampung	90 %
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat.	100 %
MISI IV : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Interkoneksi Wilayah yang Terpadu dan Terintegrasi.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan infrastruktur terpadu	Terciptanya konektivitas antar dan inter wilayah	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (baik dan sedang)	60 %
	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Berkelanjutan	Cakupan Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	25 %
	Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh sarana telekomunikasi	65 %
	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh moda transportasi umum, baik darat, laut maupun udara	75 %
MISI V : Melestarikan Adat dan Budaya sesuai dengan Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Fakfak.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan melestarikan budaya dalam masyarakat adat	Meningkatnya peran kelembagaan adat dan budaya	Jumlah lembaga/organisasi adat dan budaya	3 Lembaga
	Meningkatnya upaya perlindungan sosial dan afirmasi OAP	Cakupan masyarakat yang mendapatkan bantuan afirmasi perlindungan OAP	100 %
	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal	Jumlah program/ kegiatan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal	8 Program
MISI VI : Mewujudkan Pembangunan Fakfak Berkelanjutan Melalui Kearifan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat	Tercapainya pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal sebesar 60 persen pada tahun 2025	Persentase pemanfaatan hutan lindung	75 %
	Terwujudnya struktur ruang serta pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan RT/RW Provinsi maupun daerah	Persentase realisasi rencana pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan RTRW	85 %
	Terlaksananya pengelolaan	Persentase realisasi rencana	75 %



	lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisian DAL	pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL	
	Meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam	Indeks Resiko Bencana	99,00 %

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja selama satu tahun. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.3

Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian	Predikat
1.	Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Fakfak Yang Cerdas, Sehat, Religius Dan Produktif Yang Memiliki Daya Saing Melalui Pendidikan Dan Derajat Kesehatan.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal	Angka Harapan Lama Sekolah	15,34 Per tahun	15,34%	100%	Sangat Berhasil
			Meningkatnya budaya literasi dalam masyarakat	Peningkatan kunjungan ke perpustakaan	5 %	5 %	100%	Sangat Berhasil
			Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,91 per tahun	68,91 per tahun	100%	Sangat Berhasil
			Percepatan penanganan dan pencegahan stunting	Prevalensi balita stunting	15 %	15 %	100%	Sangat Berhasil
			Meningkatnya partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan daerah	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang Aktif	90%	90%	100%	Sangat Berhasil
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
2.	Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah Yang Berbasis Pariwisata, Pertanian, Dalam Arti Luas Dan	Membangun dan meningkatkan kemandirian Ekonomi masyarakat Fakfak	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah pengangguran/Tingkat Pengangguran	9,46 Jiwa	9,46 Jiwa	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya minat dan laju realisasi investasi di bidang bidang strategis daerah	Laju pertumbuhan Investasi daerah	6 %	6 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya pengembangan sektor-sektor strategis daerah di	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata pertahun	8 %	8 %	100 %	Sangat Berhasil



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian	Predikat
	Kelautan.		bidang Pariwisata, Pertanian dan Kelautan					
				Pertumbuhan Produksi Perikanan	6 %	6 %	100 %	Sangat Berhasil
				Pertumbuhan Produksi Pertanian	7 %	7 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya ketersediaan dan distribusi barang dan jasa daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan PDRB	7 %	7 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM	Cakupan UKM yang diberdayakan	75 %	75 %	100 %	Sangat Berhasil
				Cakupan legalitas kelembagaan koperasi yang memenuhi standard	55 %	55 %	100 %	Sangat Berhasil
3.	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Akuntabel Berbasis Pelayanan Elektronik	Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah Kabupaten Fakfak	WTP	WTP	100 %	Sangat Berhasil
				Pertumbuhan PAD	5 %	5 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi baik dari aspek sektor maupun spasial	Tingkat integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	CC	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Skor Maturitas SPIP	3	2,8	93,3 %	Berhasil
			Meningkatnya kompetensi aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan	73 %	73 %	100 %	Sangat Berhasil



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian	Predikat
				peningkatan kapasitas				
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung	Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	35 %	35 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki registrasi kependudukan secara lengkap	90 %	90 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	Cakupan keterisian data pada sistem administrasi dan informasi kampung	90 %	90 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
4.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Interkonektivitas Wilayah Yang Terpadu Dan Terintegrasi.	Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan infrastruktur terpadu	Terciptanya konektivitas antar dan inter wilayah	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	60 %	60 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Berkelanjutan	Cakupan Rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	25 %	25 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh sarana telekomunikasi	65 %	65 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya kesediaan	Cakupan wilayah yang	75 %	75 %	100 %	Sangat Berhasil



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian	Predikat
			infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	sudah terakses oleh moda transportasi umum, baik darat, laut maupun udara				
5.	Melestarikan Adat Dan Budaya Sesuai Dengan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Fakfak.	Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan melestarikan budaya dalam masyarakat adat	Meningkatnya peran kelembagaan adat dan budaya	Jumlah lembaga/organisasi adat dan budaya	3 Lembaga	2 Lembaga	66,6 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya upaya perlindungan sosial dan afirmasi OAP	Cakupan masyarakat yang mendapatkan bantuan afirmasi perlindungan OAP	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
			Meningkatnya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Lokal	Jumlah program/ kegiatan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal	8 Program	8 Program	100 %	Sangat Berhasil
6.	Mewujudkan Pembangunan Fakfak Berkelanjutan Melalui Kearifan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana.	Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat	Tercapainya pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal sebesar 60 persen pada tahun 2025	Persentase pemanfaatan hutan lindung	75 %	-	-	Tidak Berhasil (Tidak dilaksanakan karena ketidaktersediaan anggaran)
			Terwujudnya struktur ruang serta pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan RT/RW Provinsi maupun daerah	Persentase realisasi rencana pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan RTRW	85 %	85 %	100 %	Sangat Berhasil
			Terlaksananya pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor)	Persentase realisasi rencana pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL	75 %	-	-	Tidak Berhasil (Tidak dilaksanakan karena ketidaktersediaan anggaran)



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian	Predikat
			dalam rangka mengurangi tingkat kekritisasi DAL					tersediaan anggaran)
			Meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam	Indeks Resiko Bencana	99,00 %	99,00 %	100 %	Sangat Berhasil



c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya dan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

MISI I : Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang cerdas, sehat, relegius dan produktif yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan derajat kesehatan Tujuan : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan														
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal	Angka Harapan Lama Sekolah	14,9		15,1	15,1 Per tahun	15,34	15,34	15,55		15,7		15,92	
2.	Meningkatnya budaya literasi dalam masyarakat	Peningkatan kunjungan ke perpustakaan	5%		5%	5%	5%	5%	5%		5%		5%	
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,47		68,71	68,71	68,91	68,91	69,12		69,33		69,53	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

4	Percepatan penanganan dan pencegahan stunting	Prevalensi balita stunting	18,02		16%	16%	15,00	15%	14,00		13,00		12,00	
5	Meningkatnya partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan daerah	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	70,00		90,00	90%	90,00	90%	90,00		95,00		95,00	
6	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100,00		100,00	100%	100,00	100%	100,00		100,00		100,00	

MISI II : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector unggulan daerah yang berbasis pariwisata, pertanian dalam arti luas dan kelautan
Tujuan : Membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Jumlah penduduk miskin/tingkat kemiskinan	10,53		10,33	9,57	9,46	9,46	8,43		7,39		6,82	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

MISI II : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector unggulan daerah yang berbasis pariwisata, pertanian dalam arti luas dan kelautan Tujuan : Membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak.														
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Meningkatnya minat dan laju realisasi investasi di bidang-bidang strategi daerah	Laju pertumbuhan investasi daerah	2,14		5%	5%	6%	6%	7%		7%		7%	
3.	Meningkatnya pengembangan sektor-sektor strategis daerah di bidang pariwisata, pertanian dan kelautan	Tingkat pertumbuhan kunjungan wisata pertahun	6,00		7,00	7%	8,00	8%	9,00		10,00		11,00	
		Pertumbuhan produksi perikanan	5,00		6,00	6%	6,00	6%	6,00		6,00		6,00	
		Pertumbuhan produksi pertanian	5,00		6,00	6%	7,00	7%	7,00		7,00		7,50	
4.	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi barang dan jasa daerah	Pertumbuhan sektor perdagangan PDRB	5,00		5,00	6,9%	7,00	7%	7,00		7,00		7,00	
5.	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM	Cakupan UKM yang diberdayakan	65,00		70,00	70%	75,00	75%	75%		85,00		90,00	
		Cakupan legalitas kelembagaan koperasi yang memenuhi standar	45,00		50,00	50%	55,00	55%	55,00		65,00		70,00	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

MISI III : meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik.														
Tujuan : meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).														
No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya fektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas laporan keuangan daerah kabupaten fakfak	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP	
		Pertumbuhan PAD	26,00		5,00	5%	5,00	5%	5,00		5,00		5,00	
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi baik dari aspek sektor maupun spasial	Tingkat integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100,00		100,00	100%	100,00	100%	100,00		100,00		100,00	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik perangkat daerah	Prediikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	D		C	C	C	CC	B		B		B	



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

4	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor maturitas SPIP	2		2	2	3	2,8	3		3		3	
5	Meningkatnya kompetensi aparatur	Cakupan aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	72,00		72,00	72%	73,00	73%	73,00		74,00		74,50	
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung	Persentase kampung yang berkembang, maju dan mandiri	25,00		30,00	30%	35,00	35%	40,00		45,00		50,00	
7	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki registrasi kependudukan secara lengkap	80,00		85,00	85%	90,00	90%	95,00		98,00		100,00	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

8	Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembagnunan berbasis kampung	Cakupan keterisian data pada sistem administrasi dan informasi kampung	60,00		75,00	75%	90,00	90%	100,00		100,00		100,00	
9	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, kebersihan, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlingungan masyarakat	100,00		100,00	100%	100,00	100%	100,00		100,00		100,00	

MISI IV : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar interkoneksi wilayah yang terpadu dan terintegrasi. Tujuan : Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan infrastruktur terpadu.													
			2021	2022	2023	2024	2025	2026					



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terciptanya konektivitas antar dan inter wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	50,00		55,00	55%	60,00	60%	65,00		70,00		75,00	
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan	Cakupan rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	15,19		20,00	20%	25,00	25%	30,00		35,00		40,00	
3	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh sarana telekomunikasi	55,00		60,00	60%	65,00	65%	70,00		75,00		80,00	
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	Cakupan wilayah yang sudah terakses oleh moda transportasi umum, baik darat, laut maupun udara	65,00		70,00	70%	75,00	75%	80,00		85,00		90,00	

MISI V : Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan local masyarakat fakfak
Tujuan : Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan melestarikan budaya dalam masyarakat



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya peran koperasi dan UKM	Men ingkatnya Pelayanan dasar masyarakat	1		2 Lembaga	2 lembaga	3 Lembaga	2 Lembaga	4		5		5	
2.	Meningkatnya aliran modal dan investasi	Meningkatnya Pendapatan investasi daerah	100,00		100,00	100%	100,00	100%	100,00		100,00		100,00	
3.	Meningkatnya usaha industri, perdagangan dan jasa-jasa	Ketersediaan Lembaga- lembaga keuangan mikro yang berkembang	6		7	7 Program	8	8 Program	9		9		10	

MISI VI : Mewujudkan pembangunan fakfak berkelanjutan melalui kearifan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari serta berbasis mitigasi bencana Tujuan : Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat														
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

1.	Tercapainya pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal sebesar 60 persen pada tahun 2025	Persentase pemanfaatan hutan lindung	65,00		70,00	2,03%	75,00	-	80,00		85,00		85,00	
2	Terwujudnya struktur ruang serta pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan RT/RW provinsi maupun daerah	Persentase realisasi rencana pemanfaatan ruag dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan RTRW	80,00		80,00	80%	85,00	85%	90,00		95,00		95,00	
3	Terlaksananya pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisian DAL	Persentase realisasi rencana pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL	65,00		70,00		75,00	-	80,00		85,00		90,00	
4	Meningkatkan pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam	Indeks resiko bencana	103,00		101,00	101%	99,00	99%	97,00		95,00		93,00	

Sumber Data: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Fakfak

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Realisasi Anggaran Kabupaten Fakak Provinsi Papua Barat pada Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut :



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023

1. Pagu Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.475.288.540.423,00 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
2. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.387.348.283.554,95 (Satu Trilyun tiga ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah, Sembilan Puluh lima sen). dengan rincian adalah :

PEMERINTAH KABUPATEN FAK FAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI	1.475.288.540.423,00	1.387.348.283.554,95	94,04	180.581.663.380,36
4.1	DAERAH (PAD)	63.635.103.931,00	42.854.232.357,95	67,34	41.396.101.541,36
4.1.01	Pajak Daerah Retribusi Daerah	8.175.986.365,00	9.023.874.467,00	110,37	9.074.850.159,00
4.1.02	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	3.437.297.557,00	3.365.216.122,00	97,90	9.535.591.852,38
4.1.03		6.299.000.024,00	4.169.644.947,00	66,20	4.227.188.490,46
4.1.04	PENDAPATAN TRANSFER	45.722.819.985,00	26.295.496.821,95	57,51	18.558.471.039,52
4.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.411.653.436.492,00	1.344.494.051.197,00	95,24	139.185.561.839,00
4.2.01	Dana Perimbangan	1.402.403.067.260,00	1.329.770.007.463,00	94,82	139.185.561.839,00
4.2.01.01	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dana Desa	1.009.024.154.912,00	931.667.078.129,00	92,33	20.640.944.839,00
4.2.01.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	275.469.539.348,00	280.193.556.334,00	101,71	0,00
4.2.01.05	Pendapatan Bagi Hasil	117.909.373.000,00	117.909.373.000,00	100,00	118.544.617.000,00
		9.250.369.232,00	14.724.043.734,00	159,17	0,00
	BELANJA DAERAH	9.250.369.232,00	14.724.043.734,00	159,17	0,00
		1.592.894.105.914,00	1.461.889.173.924,79	91,78	1.237.836.561.180,40



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4.2.02	BELANJA OPERASI	1.095.804.321.611,00	992.497.989.679,05	90,57	907.325.933.167,40
4.2.02.01	Belanja Pegawai	478.334.782.592,00	456.578.017.331,00	95,45	421.118.378.833,00
5	Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah	534.143.329.214,00	466.938.358.458,05	87,42	429.161.082.373,40
5.1	Belanja Bantuan Sosial BELANJA	62.962.743.805,00	50.871.256.390,00	80,80	40.838.781.821,00
5.1	MODAL	20.363.466.000,00	18.110.357.500,00	88,94	16.207.690.140,00
5.1.01	Belanja Modal Tanah	301.837.979.123,00	274.768.627.573,74	91,03	211.966.011.013,00
5.1.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja	3.340.015.500,00	2.220.170.500,00	66,47	22.478.353.693,00
5.1.05	Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal	59.509.063.941,00	52.401.468.114,00	88,06	48.516.226.037,00
5.1.06	Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset	108.141.219.903,00	95.937.484.162,74	88,72	50.184.197.090,00
5.2	Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya	129.300.079.279,00	123.090.729.797,00	95,20	88.663.428.276,00
5.2.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.447.600.500,00	1.018.800.000,00	70,38	2.123.805.917,00
5.2.02	Belanja Tidak Terduga BELANJA	100.000.000,00	99.975.000,00	99,98	0,00
5.2.03	TRANSFER	14.107.285.887,00	14.070.365.920,00	99,74	0,00
5.2.04	Belanja Bantuan Keuangan	14.107.285.887,00	14.070.365.920,00	99,74	0,00
5.2.05		181.144.519.293,00	180.552.190.752,00	99,67	118.544.617.000,00
5.2.06		181.144.519.293,00	180.552.190.752,00	99,67	118.544.617.000,00
5.3					
5.3.01					
5.4					
5.4.02					
	SURPLUS / DEFISIT	(117.605.565.491,00)	(74.540.890.369,84)	0	(1.057.254.897.800,04)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.605.565.491,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	118.605.565.491,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

	PEMBIAYAAN NETTO	117.605.565.491,00	(1.000.000.000,00)	-0,85	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN				



Tabel 2.5
Capaian Kinerja Tiap-Tiap Misi

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja (%)
1.	I	1	6	6	Sangat Berhasil = 6 (100%) Berhasil = - Cukup Berhasil = - Tidak Berhasil = -
					100,00
2.	II	1	5	8	Sangat Berhasil = 8 (100%) Berhasil = - Cukup Berhasil = - Tidak Berhasil = -
					100,00
3.	III	1	9	10	Sangat Berhasil = 9 (100%) Berhasil = 1 (93,3%) Cukup Berhasil = - Tidak Berhasil = -
					93.30
4.	IV	1	4	4	Sangat Berhasil = 4 (100%) Berhasil = - Cukup Berhasil = - Tidak Berhasil = -
					100,00
5.	V	1	3	3	Sangat Berhasil = 2 (100%) Berhasil = 1 (66,6) Cukup Berhasil = - Tidak Berhasil = 1(0%)
					66,60
6.	VI	1	4	4	Sangat Berhasil = 2 (100%) Berhasil = - Cukup Berhasil = - Tidak Berhasil = 2 (0%)
					50,00



No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja (%)
JUMLAH		6	31	35	84,93

Sumber Data: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Fakfak

e. Analisis Program Pencapaian Target Kinerja

Tabel 2.6

Program dan Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Pengelolaan Pendidikan	80.095.082.100
2	Pengembangan Kurikulum	754.360.150
3	Pengendalian perizinan Pendidikan	119.938.298
4	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	670.000.000
5	Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	4.562.565.478
6	Pembinaan Perpustakaan	1.049.991.117
7	Pengelolaan Arsip	744.279.284
8	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat	74.503.715.403
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	355.660.198
10	Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	122.860.000
11	Perlindungan Perempuan	950.801.309
12	Peningkatan Kualitas Keluarga	1.200.048.231
13	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	500.002.240
14	Perlindungan Khusus Anak	250.005.811
15	Pengendalian Penduduk	136.172.866
16	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.053.383.779
17	Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera (KS)	3.315.318.383
18	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	1.623.009.873
19	Penempatan Tenaga kerja	537.791.907
20	Pembangunan kawasan Transmigrasi	710.880.536
21	Pengembangan kawasan Transmigrasi	163.844.000
22	Promosi penanaman modal	44.010.000
23	Pelayanan penanaman modal	119.370.000
24	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	299.477.000
25	Pengembangan kebudayaan	6.040.774.689
26	Pembinaan sejarah	1.029.875.197
27	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1.793.733.800
28	Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata	1.459.152.851
29	Pemasaran pariwisata	1.657.702.798
30	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	869.912.443
31	Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	831.177.845
32	Pengelolaan perikanan tangkap	9.310.649.418
33	Pengelolaan perikanan budidaya	2.777.033.411
34	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	549.999.027
35	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	36.860.026
36	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	6.474.897.316
37	Penanganan kerawanan pangan	789.155.242



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
38	Pengawasan keamanan pangan	256.183.794
39	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.105.615.632
40	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	499.999.256
41	Penyuluhan pertanian	2.739.380.345
42	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	5.601.871.461
43	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	75.240.000
44	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	32.580.000
45	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	54.720.000
46	Perencanaan dan pembangunan industri	1.970.332.043
47	Pelayanan izin usaha simpan pinjam	88.944.395
48	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	122.525.477
49	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	72.850.000
50	Pendidikan dan latihan perkoperasian	622.187.932
51	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	63.590.100
52	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	67.788.000
53	Pengembangan UMKM	1.417.407.558
54	Pengelolaan keuangan daerah	198.811.812.775
55	Pengelolaan barang milik daerah	1.569.806.250
56	Pengelolaan pendapatan daerah	4.434.870.535
57	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	7.270.081.128
58	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.911.035.839
59	Penelitian dan pengembangan daerah	968.246.613
60	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	42.145.482.044
61	Perekonomian dan pembangunan	2.837.150.000
62	Penyelenggaraan pengawasan	3.523.740.636
63	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	81.084.000
64	Kepegawaian daerah	10.445.031.185
65	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.941.493.921
66	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.884.408.711
67	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	95.552.777
68	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	40.544.100
69	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penangan konflik sosial	352.976.737
70	Pendaftaran penduduk	1.055.174.702
71	Pencatatan Sipil	788.649.890
72	Penelolaan informasi administrasi kependudukan	603.145.548
73	Pengelolaan profil kependudukan	53.446.500
74	Program penataan desa	299.999.320
75	Administrasi pemerintahan desa	2.066.396.070
76	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	943.207.126
77	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1.794.217.340
78	Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	396.221.819
79	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.804.355.962
80	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	21.027.476.426
81	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	9.704.900.259
82	Pengembangan pemukiman	25.665.362.388
83	Penataan bangunan gedung	20.387.020.042



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
84	Penyelenggaraan jalan	84.876.490.181
85	Pengembangan Jasa Konstruksi	321.720.000
86	Pengembangan Perumahan	2.001.312.296
87	Kawasan pemukiman	1.545.160.000
88	Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	5.086.908.705
89	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.942.925.595
90	Informasi dan komunikasi publik	2.249.999.920
91	Pengelolaan aplikasi informatika	932.731.949
92	Penyelenggaraan statistik sektoral	1.699.659.305
93	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	300.298.500
94	Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ)	4.665.049.735
95	Pengelolaan pelayaran	1.293.918.630
96	Pemberdayaan Sosial	1.415.787.068
97	Rehabilitasi Sosial	2.481.675.201
98	Perlindungan dan jaminan sosial	1.587.560.061
99	Penanggulangan bencana	1.934.427.875
100	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.094.321.220
101	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.393.047.011
102	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	151.172.250
103	Penyuluhan pertanian	201.830.000
104	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	263.370.000
105	Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	1.276.124.202
106	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	231.270.000
107	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	223.509.415
108	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	203.325.529
109	Pengelolaan persampahan	305.861.757

Sumber Data: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Fakfak 2023



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melakukan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban pelaksana melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Alokasi dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan di daerah dan menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang didanai dari APBN melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD. Dalam pengelolaan Tugas Pembantuan maka setiap OPD akan melaksanakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dasar hukum.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan tugas Pembantuan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- d. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke



Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- k. Surat menteri Keuangan RI Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- l. Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman, Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan umum, maka Pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat Kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melapor pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas.

Alokasi dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efesien dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan di daerah dan menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang didanai dari APBN melalui program dan kegiatan yang di danai dari APBD dalam pengelolaan Tugas Pembantuan maka setiap OPD akan melaksanakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dasar hukum.

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Adapun tugas pembantuan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2023 yaitu tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja, di Bidang Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Rakyat dan



Kawasan Permukiman, Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di Bidang Perikanan dan Kelautan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Bidang Perkebunan.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan

Tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan berupa tugas Pembantuan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Kementerian Pemberdayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

3.1.1. Target Kinerja

Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian adalah Program Daerah Tertinggal, Pedesaan dan Transmigrasi sebesar Rp. 1.167.422.000,00., Program Penyelenggaraan Jalan Yaitu Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre - Siboru sebesar Rp. 6.533.858.700,00, Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre - Siboro sebesar Rp. 200.000.000,00, Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin) jalan Wagom Dulan Pokpok sebesar Rp. 770.974.519,00, Penangan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekonstruksi) Siboru Sipatnamam – Teluk Patipi sebesar Rp. 12.101.368.000,00, Penangan Longsegment (pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekontruksi Lusifiri Jalan Kokas sebesar Rp. 3.512.300.000,00, Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekontruksi) jalan Wagom – Torea sebesar Rp. 11.519.426.230,00., Program Prasarana Penunjang Pembudidayaan Ikan berupa 1 Unit Kendaraan bermotor Roda 3 sebesar Rp. 48.900.000,00., Program Seleksi Guru dan jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.672.316.456,00.

3.1.2. Realisasi

Realisasi Anggaran dari Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diberikan Pusat yaitu Program Daerah Tertinggal, Pedesaan dan Transmigrasi sebesar Rp. 1.165.632.027., Program Penyelenggaraan Jalan Yaitu Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre -Siboru sebesar Rp. 6.330.051.000,00, Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre - Siboro sebesar Rp. 199.400.000,00, Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin) jalan Wagom Dulan Pokpok sebesar Rp. 770.400.000,00, Penangan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekonstruksi) Siboru Sipatnamam – Teluk Patipi sebesar Rp. 11.856.070.000,00, Penangan



Longsegment (pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekontruksi Lusifiri Jalan Kokas sebesar Rp. 3.400.000.000,00, Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekontruksi) jalan Wagon – Torea sebesar Rp. 11.189.726.000,00., Program Prasarana Penunjang Pembudidayaan Ikan berupa 1 Unit Kendaraan bermotor Roda 3 sebesar Rp. 48.900.000,00., Program Seleksi Guru dan jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.101.100.062,00.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan

NO	KP/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA A	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BIDANG TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA										
	Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DIPA APBN TAPI No. XP.DIPA067.07.4.350430/2 023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022	Program Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi - Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tomage SP.2	Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kab. Fakfak	1.167.422.000,00 1.167.422.000,00	1.165.632.027,00 1.165.632.027,00	99,85	Terealisasinya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100 100	APBN
2	BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN										
	Dtjen Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DIPA Kementerian yang di Tuangkan Ke dalam DPA	1. Program Penyelenggaraan Jalan a. Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre - Siboru b. Pengawasan Pembangunan Jalan Desa Strategis Mumre – Siboru c. Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin)Jalan Wagom – Dulanpompok d. Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan / Rekonstruksi) Siboru	Mumre – Siboru Distrik Wartutin Mumre – Siboru Distrik Wartutin Wagom – Dulanpompok Distrik Pariwari Siboru-Sipatnanam – Teluk patipi	DPUPR2KP Kab. Fakfak DPUPR2KP Kab. Fakfak DPUPR2KP Kab. Fakfak DPUPR2KP Kab. Fakfak	34.434.119.749,00 6.533.858.700,00 200.000.000,00 770.974.519,00 12.101.368.000,00	33.745.647.000,00 6.330.051.000,00 199.400.000,00 770.400.000,00 11.856.070.000,00	96,88 96,88 99,70 99,93 97,97	Terealisasinya Pembangunan dan Penyelenggaraan Jalan Terealisasinya Kegiatan Pengawasan Pembangunan dan Penyelenggaraan Jalan	100 100 100	APBN



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO	KP/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSAN A	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sipatnanam – Teluk Patipi e. Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala Peningkatan/ Rekonstruksi) Lusiferi jalan Kokas f. Penanganan Longsegment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala Peningkatan / Rekonstruksi) jalan Pala Wagom – Torea	Kampung Lusiferi Distrik Fakfak Wagom - Torea Distrik Pariwari	DPUPR2KP Kab. Fakfak DPUPR2KP Kab. Fakfak	3.512.300.000,00 11.519.426.230,00	3.400.000.000,00 11.189.726.000,00	96,80 97,14			
3	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Pakan dan Obat Ikan	NOMOR : SP DIPA-032.04.1.632462/2023 TANGGAL 24 DESEMBER 2022	Program Kampung Perikanan Budidaya - Prasarana Penunjang Pembudidayaan ikan berupa 1 unit Kendaraan Roda 3			48.900.000,00 48.900.000,00	48.900.000,00 48.900.000,00	100 100			
4	BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia	Permen PANRB No. 14 Tahun 2023 KEPMENPANRB No. 649 tahun 2023 KEPMENPANRB No.	Program Seleksi PPPK Guru dan Jabatan Fungsional	Kabupaten Fakfak	BKPSDM Kab. Fakfak	1.672.316.456,00	1.101.100.062	65,84%	Terlaksananya Perekrutan PPPK 179 Tenaga	100	APBN



3.2 . Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan

Tugas pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Yaitu Program Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Yaitu Kegiatan Rehabilitas Tanaman Pala 100 Ha, Program Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Yaitu Kegiatan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Pala 5 Ha, Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul 16 Ha (BPT) dan Perjalanan Monitoring,. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Yaitu Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Propinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan Pada Kerja Pangan,. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi pangan Berkualitas Yaitu Dukungan Manajemen,. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi yang Berkualitas Yaitu Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (PSVA) dan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

3.2.1. Realisasi

Realisasi Anggaran dari Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diberikan Propinsi yaitu Program Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Yaitu Rehabilitasi Tanaman Pala sebesar Rp. 200.000.000,00, Program Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Yaitu Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Pala 5 Ha Sebesar Rp. 25.000.000,00, Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul 16 Ha (BPT) sebesar Rp. 7.625.000,00 dan Perjalanan Dinas Monitoring sebesar Rp. 2.525.000,00, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi pangan Berkualitas Yaitu Dukungan Manajemen sebesar Rp. 40.260.000,00,. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi yang Berkualitas Yaitu Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (PSVA) sebesar Rp. 23.500.000,00 dan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebesar Rp. 9.580.000,00,.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

Tabel 3.2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan

NO	KP/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BIDANG PERKEBUNAN										
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	Nomor : SP DIPA-018.05.4.330024/2023 Tanggal 30 November 2022	Program Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah - Rehabilitasi Tanaman Pala 100 Ha	Kampung Kamandutetar, Kampung Wartutin dan Kampung Degen	Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak	200.000.000,00 200.000.000,00	200.000.000,00 200.000.000,00	100 100	Terealisasinya Rehabilitasi Tanaman Pala 100 Ha.	100	
			Program Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan : - Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Pala 5 Ha - Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul 16 Ha (BPT) - Perjalanan Dinas Monitoring	Kampung Kuagas, Kampung Werebuan		35.150.000,00 25.000.000,00 7.625.000,00 2.525.000,00	35.150.000,00 25.000.000,00 7.625.000,00 2.525.000,00	100 100 100 100	Terlaksananya Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	100	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO	KP/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN										
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROPINSI PAPUA BARAT	SP DIPA - 018.08.4.339091/20 23	Program ketersediaan Akses dan konsumsi pangan Berkualitas - Dukungan Manajemen	Kabupaten Fakfak	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak	40.260.000,00 40.260.000,00	40.260.000,00 40.260.000,00	100 100	Ketersediannya Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas dan Dukungan Manajemen	100	
	BADAN PANGAN NASIONAL	SP DIPA - 125.01.3.690730/20 23	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Berkualitas - Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (PSVA) - Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Kabupaten Fakfak Kabupaten Fakfak	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak	33.080.000,00 23.500.000,00 9.580.000,00	33.080.000,00 23.500.000,00 9580.000,00	100 100 100	1Kegiatan (PSVG) 1 Kegiatan (PSVA)	100 100	



3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan hak ulayat kendala yang terjadi jika tidak membayar hak ulayat yang berada di lokasi kegiatan, Kondisi Alam Seperti Cuaca yang tidak dapat di prediksi untuk Menyelesaikan Pekerjaan, kemudian akses pendropingan bahan matrial dan alat kerja terkendala apabila medan yang di jangkau menggunakan akses Laut (Kapal/Perahu), Tukang kerja yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut yang perlu dilaporkan dalam pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2023 adalah sebelum melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu melakukan negosiasi kepada pemilik hak ulayat saat survey awal, untuk faktor alam pekerjaan menyesuaikan karena faktor alam tidak dapat di prediksi, tenaga tukang harus benar-benar yang ingin bekerja sesuai dengan keahliannya.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan dasar dalam urusan pendidikan di Kabupaten Fakfak secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dengan jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan antara lain:

a. Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

b. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan. Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

c. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut.



4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan antara lain :

Tabel 4.1

Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Fakfak

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2023
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	2023
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2023

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan di Kabupaten Fakfak tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 4.2

Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capain SPM (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	81,20%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	94,00%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum	100%	21,31%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capain SPM (%)
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		

Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Fakfak 2023

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Alokasi anggaran dalam penerapan SPM adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar	42.663.387.964	27.974.912.817	65%
2	Pengelola Pendidikan Usia Dini (PAUD)	6.651.954.860	4.642.951.597	69%
3	Pengelola Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.823.500.502	949.470.629	52%
	Jumlah	51.138.843.326	33.567.335.043	65%

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Fakfak

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), personil di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM di tahun 2022 berjumlah 1.424 orang dengan klasifikasi pendidikan, golongan dan pangkat dapat dilihat secara detail pada lampiran jumlah pegawai.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Kurangnya informasi yang diterima pihak sekolah mengenai SPM;
2. Peran pihak sekolah masih kurang dalam penerapan SPM;
3. Kurangnya efektivitas pelaksanaan program sekolah yang berkaitan dengan pemenuhan SPM.



Solusi :

1. Sosialisasi mengenai SPM bagi pihak sekolah;
2. Memberikan bimbingan untuk mengoptimalkan peran pihak sekolah dalam penerapan SPM;
3. Pihak sekolah harus menyusun, memonitoring dan mengevaluasi pemenuhan SPM dalam Rencana Kegiatan Sekolah yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan Rencana Kerja Tahunan.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

4.2.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel. 4.4

Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023
8	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	100%	2023
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2023

4.2.3 Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 4.5
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	95,91%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang menerima layanan kesehatan	64,22%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	98,35%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang menerima layanan kesehatan	75,71%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	79,28%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	26,35%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	49,73%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	23,74%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	50,11%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	34,68%
11	Pelayanan Kesehatan dengan Tuberculosis (TBC)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis yang menerima layanan kesehatan	73,08%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	50%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, sebagai berikut:



Tabel 4.6

Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	65.981.299.725	58.774.706.577	89%
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kab/Kota	24.201.751.562	12.265.390.888	50%
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	20.400.000	24.400.000	100%
4.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	122.860.000	75.740.000	61%
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	122.860.000	75.740.000	61%
Jumlah		90.449.171.287	71.215.977.465	78%

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan, personil pendukung di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak berjumlah 762 orang dengan klasifikasi pendidikan, golongan dan pangkat dapat dilihat secara detail pada lampiran jumlah pegawai.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan adalah sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai akibat belum optimalnya puskesmas berfungsi sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan;
2. Lemahnya upaya pembinaan dan apresiasi terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
3. Sumber daya kesehatan dalam pemerataan distribusi serta kualitas tenaga kesehatan
4. Belum terpenuhinya kecukupan pembiayaan kesehatan yang diikuti efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.



Solusi :

1. Mengembangkan Puskesmas di wilayahnya melalui pelaksanaan kebijakan dasar serta standar pelayanan puskesmas sesuai fungsi;
2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur, ketenagaan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan anggaran;
3. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan secara optimal;
4. Membangun jejaring kemitraan pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan swasta dalam pembangunan kesehatan;
6. Melakukan kajian terhadap jenis dan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan;
7. Memantapkan standar tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
8. Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan daerah secara bertahap dengan fokus prioritas untuk pelayanan publik.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar urusan pekerjaan umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel. 4.7

Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1.	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2023
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2023



4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum di Kabupaten Fakfak tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.8

Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	83%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	79%

Sumber: Dinas PUPRP2KP Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut:

Tabel 4.9

Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	10.987.377.082	10.037.664.902	98%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	9.365.522.846	9.077.608.966	96%
	Jumlah	20.352.899.928	19.115.273.868	93%

Sumber data : Dinas PUPRP2KP Kabupaten Fakfak Tahun 2023

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum, personil pendukung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak berjumlah 87 (delapan puluh



tujuh) pegawai dengan klasifikasi pendidikan, golongan dan pangkat dapat dilihat secara detail pada lampiran jumlah pegawai.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2023 permasalahan yang dihadapi ialah kondisi lokasi pekerjaan yang membuat beberapa kegiatan terhambat penyelesaian dan kondisi sosial masyarakat yang kurang kooperatif terhadap program pembangunan pemerintah, dimana tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kesadaran dan pengorbanan terhadap program yang tengah dilaksanakan pemerintah. Sehingga solusi untuk mengatasi permasalahan ini, diharapkan ada penanganan yang jelas dan tegas oleh instansi yang berkompeten sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemrintah.

4.4.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel 4.10

Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	2023
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2023



4.4.3 Realisasi

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat di kabupaten fakfak tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.11

Realiasi Capain SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)
1.	Penyediaan & rehatiitasi rumah yg layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	60%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	60%

Sumber Data: Dinas PUPRP2KP Kabupaten Fakfak 2023

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selaku OPD teknis pelaksana dalam melaksanakan standar pelayanan minimal pada urusan perumahan rakyat masih mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam bidang Urusan Perumahan Rakyat yakni:

- Rumah layak huni dan terjangkau;
- Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU).

Oleh karena itu target dan capaian realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 4.12

**Target dan Capaian Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)
1.	Rumah layak huni dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	53%
2.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	100%	54%

Sumber data: Dinas PUPRP2KP Kabupaten Fakfak

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut:

Tabel 4.13

Alokasi Anggaran SPM

Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Program Kawasan Pemukiman	1.545.160.000	28.740.000	1.86%
2	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.691.388.705	5.662.317.000	99%
	Jumlah	7.236.548.705	5.691.057.000	78%

Sumber data : Dina PUPR Kabupaten Fakfak 2023

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat, personil pendukung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak berjumlah 122 Orang pegawai dengan klasifikasi pendidikan, golongan dan pangkat dapat dilihat secara detail pada lampiran jumlah pegawai.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2023 **permasalahan** yang dihadapi ialah kondisi lokasi pekerjaan yang membuat beberapa kegiatan terhambat penyelesaian dan kondisi sosial masyarakat yang kurang kooperatif terhadap program pembangunan pemerintah,



dimana tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kesadaran dan pengorbanan terhadap program yang tengah dilaksanakan pemerintah. Sehingga **solusi** untuk mengatasi permasalahan ini, diharapkan ada penanganan yang jelas dan tegas oleh instansi yang berkompeten sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- d. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana;
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:



Tabel 4.14

**Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	2023
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2023
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2023
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2023
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	2023

4.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.15

**Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	85%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	50%
3	Pelayanan pencegahan dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	50%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)
	kesiapsiagaan terhadap bencana			
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	75%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	75%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16

**Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1.099.010.000	1.055.028.000	96%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	665.816.179	551.467.500	82%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	424.977.904	518.840.600	122%
	Jumlah	2.189.804.083	1.125.336.100	97%

Sumber Data : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Fakfak

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, personil pendukung di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 205 pegawai terdiri dari 43 ASN dan 162 Non ASN dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fakfak berjumlah 29 pegawai dengan klasifikasi pendidikan, golongan dan pangkat dapat dilihat secara detail pada lampiran jumlah pegawai Kabupaten Fakfak.



4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

1. Kondisi geografis Kabupaten Fakfak yang terdiri dari wilayah daratan rendah, pegunungan dan lautan;
2. Belum dilantiknya Anggota PPNS sehingga dalam pelaksanaan tugas belum maksimal;
3. Masih kurangnya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran hanya berupa bak penampungan air yang ada pada pos pemadam kebakaran sehingga bila terjadi bencana kebakaran mobil pemadam harus bolak-balik dari tempat kejadian kebakaran ke pos pemadam kebakaran;
4. Terbatasnya Sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih dan truk DALMAS;
5. Kurangnya tenaga teknis kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja;
6. Kurangnya sarana dan prasarana;
7. Terbatasnya anggaran;
8. Belum adanya pemetaan daerah-daerah rawan bencana;
9. Kurangnya pengembangan kualitas SDM;
10. Lemahnya fungsi kordinasi antar instansi terkait.

Solusi:

1. Perlu adanya penambahan sarana dan prasaran sebagai penunjang pelaksana kegiatan;
2. Perlu adanya peningkatan SDM anggota Satpol PP;
3. Penempatan pejabat yang menduduki jabatan Eselon III dan IV sesuai PP Nomor 6 Tahun 2010 terutama memperhatikan kemampuan dari pejabat tersebut, dalam upaya ketersediaan anggaran untuk menunjang segala program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana secara optimal;
4. Penambahan pegawai sesuai kebutuhan dan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan Diklat structural dan diklat fungsional;
5. Penambahan sarana dan prasarana kebencanaan;
6. Perlu adanya tenaga yang memiliki keahlian dalam pendataan daerah-daerah rawan bencana.



4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

4.6.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel 4.17

Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2023
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2023
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2023
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2023
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2023



	bagi korban bencana kab/kota			
--	------------------------------	--	--	--

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Fakfak

4.6.3 Realisasi

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal Urusan Sosial di Kabupaten Fakfak tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.18

Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	87%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	80%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	60%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	87%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	94%

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Fakfak

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19

Alokasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.813.452.335	561.079.217	31%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2.	Rehabilitasi Sosial penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	668.222.866	189.747.425	28%
3.	Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial Kabupaten /Kota	3.398.450.984	3.172.224.049	98%
Jumlah		5.880.126.185	3.923.050.691	67%

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Fakfak 2023

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial, personil pendukung di lingkungan Dinas Sosial berjumlah 68 orang yang terdiri 41 orang ASN dan 27 orang Non PNS.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi Permasalahan

Dalam penerapan SPM bidang urusan sosial pada Dinas Sosial terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang belum diperbaharui secara berkala setiap tahun anggaran berjalan;
2. Keterbatasan anggaran sehingga belum semua PMKS dapat dilayani secara baik;
3. Belum tersedia anggaran untuk pendataan PMKS secara berkala;
4. Keterbatasan tenaga ASN dalam pelayanan pendampingan dan konseling kepada PMKS yang membutuhkan.
5. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam membantu penanganan SPM Bidang Sosial
6. Hal-hal teknis pelayanan terhadap SPM Urusan Sosial dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak optimal.

Solusi

Untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi maka solusi yang diberikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan anggaran yang cukup disesuaikan dengan pelayanan yang dilaksanakan sehingga setiap program dan kegiatan dalam pelayanan PMKS dapat dilaksanakan secara optimal;



2. Perlu adanya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga ASN yang bertugas dalam pelaksanaan urusan sosial sehingga dapat melakukan pelayanan bagi PMKS yang membutuhkan.
3. Mengusulkan proposal ke Kementerian Sosial RI untuk memperoleh akses dalam pemberian bantuan pelayanan dasar urusan sosial.

4.7. Pogram Dan Kegiatan

a. Program dan Kegiatan Urusan pendidikan

➤ Program Pengelolaan Pendidikan

- 1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
 - Pengadaan Mebel PAUD;
 - Pengadaan Peralatan Siswa PAUD;
 - Penyelenggaraan proses belajar PAUD;
 - Penyiapan dan tindaklanjut evaluasi satuan PAUD;
 - Pengelolaan dana BOP PAUD;
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - Penambahan ruang kelas baru;
 - Pembangunan ruang guru/ kepala sekolah/ TU;
 - Pembangunan sarana prasarana utilitas sekolah;
 - Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru penjaga sekolah;
 - Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas;
 - Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah;
 - Pengadaan perlengkapan sekolah;
 - Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
 - Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar;
 - Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
 - Pengelolaan dana BOS sekolah dasar;
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar;
- 3) Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama
 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
 - Pembangunan Laboratorium;
 - Pembangunan Asrama Sekolah;



- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
 - Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
 - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;
 - Pengadaan Mebel Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
 - Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
 - Penyiapan dan tindaklanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah Pertama;
 - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama;
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama;
- 4) Pengelolaan Non formal/ Kesetaraan
- Penyelenggaraan proses Belajar Non Formal/Kesetaraan;
 - Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/ kesetaraan;
 - Pengelolaan dana BOP sekolah non formal/kesetaraan;

b. Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Pembangunan Puskesmas;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;(OTSUS)
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya; (OTSUS)
 - Pengadaan alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Masyarakat; (OTSUS/DAK)
 - Pengadaan Obat dan Vaksin; (OTSUS/DAK)
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai; (DAK)
 - Distribusi alat Kesehatan, Obat, Vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas Kesehatan Lainnya; (DAK)
 - Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan balita; (DAK/DID)



- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar; (DAU)
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; (DAK)
 - Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan; (DAK)
 - Pengelolaan surveilions kesehatan; (DAK)
 - Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; (DAU/DID)
 - Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; (DAK/DAU)
 - Operasional pelayanan puskesmas; (DAK)
 - Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya; (OTSUS)
 - Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan; (OTSU/DAK)
 - Pengelola pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi;
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; (DAK)
- 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; (DAK)
- Pengelolaan data dan informasi kesehatan; (OTSUS).
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman;
- Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Post Market;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor tingkat Daerah Kab/ Kota; (DAU)
 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif tingkat Daerah Kabupaten/Kota; (DAK).

c. Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Pengelolaan sumber daya air (SDA) dan bangunan pengamanan pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota;
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000Ha dalam daerah kabupaten/ kota;
- Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/ kota.

Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

- Pengembangan sistem pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/ kota.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah



- Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.

Program Pengembangan Permukiman

- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penataan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung Diwilayah Daerah Kabupaten/ Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

d. Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman

- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

e. Program dan Kegiatan Urusan Trantibum dan Linmas

1) Program Peningkatan Ketentramanan dan Ketertiban Umum;

- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

2) Program Penanggulangan Bencana



- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana;
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

f. Program dan Kegiatan Urusan Sosial

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan HAPZA di Luar Panti Sosial.
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Penanganan Bencana :
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.



BAB V PENUTUP

Pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berasaskan Transparansi dan Akuntabel saat ini, harapan dan optimisme akan terwujudnya pemerataan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sesuai amanat UUD 1945 perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh elemen penyelenggara pemerintahan.

Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan **PELAYAN** masyarakat **WAJIB** mengambil peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan setiap pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju **Indonesia Maju**. Tentu saja dalam penerapannya perlu dieksplisitkan dan dijabarkan secara nyata dengan berpedoman pada tiga pilar utama yakni Partisipasi, Transparansi dan *Accountability* (pertanggungjawaban) yang dilaksanakan oleh tiga pelaku utama yakni Pemerintah, Legislatif dan Masyarakat (didalamnya termasuk dunia usaha).

Untuk meningkatkan transparansi dan *accountability* baik dibidang keuangan daerah maupun kinerja pemerintah daerah, maka kepala daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini yang secara rinci menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak selama tahun 2023, yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah sesuai RPJMD serta program prioritas daerah.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, dengan mengacu pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan penunjang lainnya yang diserahkan ke daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang digambarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang meliputi tataran



pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kegiatan serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD).

- a) Perlu digaris bawahi bahwa penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini berpedoman pada Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2007;
- b) Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 Tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Namun disadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih membutuhkan perbaikan dan penyesuaian kembali dimasa mendatang selaras dengan pemahaman mengenai ketentuan yang mengatur terhadap penyusunan LPPD.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 ini disampaikan sebagai bentuk kewajiban Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pemerintah secara berjenjang.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah—Nya bagi kita sekalian.



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

1. Urusan Wajib

NO	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	URAIAN		2023			
1	2	3	4		5			
Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1		Jumlah Pegawai	1.640		
			2		Pendidikan			
				a.	S2 / S3	7		
				b.	D4 / S1	46		
				c.	D1 / D2 / D3 /	4		
				d.	SLTA	40		
				e.	SLTP	-		
				f.	SD	-		
			3		Pangkat/Golongan			
				a.	Gol.I	-		
				b.	Gol.II	37		
				c.	Gol.III	50		
				d.	Gol.IV	10		
			4		Jumlah Pejabat Struktural	25		
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	1.349		
			6		Jumlah Staf	72		
2	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1		Jumlah Pegawai	762		
			2		Pendidikan			
				a.	S2 / S3	22		
				b.	D4 / S1	182		
				c.	D1 / D2 / D3 /	386		
				d.	SLTA	153		
				e.	SLTP	10		
				f.	SD	9		
			3		Pangkat/Golongan			
				a.	Gol.I	15		
				b.	Gol.II	200		
				c.	Gol.III	512		
				d.	Gol.IV	35		
			4		Jumlah Pejabat Struktural	31		
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	625		
			6		Jumlah Staf	106		
				RSUD TYPE C	1		Jumlah Pegawai	232
					2		Pendidikan	
						a.	S2 / S3	13
						b.	D4 / S1	72
						c.	D1 / D2 / D3 /	95
						d.	SLTA	37
						e.	SLTP	3
						f.	SD	2
					3		Pangkat/Golongan	
						a.	Gol.I	9



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			b.	Gol.II	45
			c.	Gol.III	165
			d.	Gol.IV	14
			4	Jumlah Pejabat Struktural	10
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	184
			6	Jumlah Staf	38
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Jumlah Pegawai	112
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	2
			b.	D4 / S1	55
			c.	D1 / D2 / D3 /	14
			d.	SLTA	34
			e.	SLTP	6
			f.	SD	1
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	2
			b.	Gol.II	43
			c.	Gol.III	47
			d.	Gol.IV	4
			4	Jumlah Pejabat Struktural	25
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	83
4	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Jumlah Pegawai	30
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	4
			b.	D4 / S1	19
			c.	D1 / D2 / D3 /	2
			d.	SLTA	5
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	1
			c.	Gol.III	24
			d.	Gol.IV	5
			4	Jumlah Pejabat Struktural	13
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	17
		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1	Jumlah Pegawai	43
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	1
			b.	D4 / S1	16
			c.	D1 / D2 / D3 /	-
			d.	SLTA	19
			e.	SLTP	3
			f.	SD	4
			3	Pangkat/Golongan	



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			a.	Gol.I	5
			b.	Gol.II	17
			c.	Gol.III	19
			d.	Gol.IV	2
			4	Jumlah Pejabat Struktural	12
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	31
5	Urusan Sosial	Dinas Sosial	1	Jumlah Pegawai	42
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	6
			b.	D4 / S1	22
			c.	D1 / D2 / D3 /	8
			d.	SLTA	6
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	11
			c.	Gol.III	25
			d.	Gol.IV	6
			4	Jumlah Pejabat Struktural	16
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	26
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Jumlah Pegawai	29
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	3
			b.	D4 / S1	15
			c.	D1 / D2 / D3 /	5
			d.	SLTA	6
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	8
			c.	Gol.III	17
			d.	Gol.IV	4
			4	Jumlah Pejabat Struktural	14
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	15
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
6	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan	1	Jumlah Pegawai	62
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	5
			b.	D4 / S1	23
			c.	D1 / D2 / D3 /	19
			d.	SLTA	14
			e.	SLTP	-



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	19
			c.	Gol.III	38
			d.	Gol.IV	5
			4	Jumlah Pejabat Struktural	16
7	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	46
			1	Jumlah Pegawai	48
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	5
			b.	D4 / S1	30
			c.	D1 / D2 / D3 /	3
			d.	SLTA	10
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	9
			c.	Gol.III	29
8	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	d.	Gol.IV	10
			4	Jumlah Pejabat Struktural	23
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	25
			1	Jumlah Pegawai	32
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	5
			b.	D4 / S1	13
			c.	D1 / D2 / D3 /	4
			d.	SLTA	10
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
9	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	b.	Gol.II	9
			c.	Gol.III	19
			d.	Gol.IV	5
			4	Jumlah Pejabat Struktural	16
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	17
			1	Jumlah Pegawai	44
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	2
			b.	D4 / S1	20
			c.	D1 / D2 / D3 /	2
			d.	SLTA	19



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			e.	SLTP	-
			f.	SD	1
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	1
			b.	Gol.II	15
			c.	Gol.III	26
			d.	Gol.IV	2
			4	Jumlah Pejabat Struktural	16
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	28
10	Urusan Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	Jumlah Pegawai	41
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	4
			b.	D4 / S1	16
			c.	D1 / D2 / D3 /	7
			d.	SLTA	13
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	14
			c.	Gol.III	21
			d.	Gol.IV	6
			4	Jumlah Pejabat Struktural	15
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	26
11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Jumlah Pegawai	36
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	3
			b.	D4 / S1	25
			c.	D1 / D2 / D3 /	2
			d.	SLTA	6
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	4
			c.	Gol.III	28
			d.	Gol.IV	4
			4	Jumlah Pejabat Struktural	12
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	24
12	Urusan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	Jumlah Pegawai	64
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	2
			b.	D4 / S1	17
			c.	D1 / D2 / D3 /	5



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			d.	SLTA	12
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	9
			c.	Gol.III	24
			d.	Gol.IV	3
			4	Jumlah Pejabat Struktural	16
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	20
13	Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik Urusan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1	Jumlah Pegawai	45
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	5
			b.	D4 / S1	12
			c.	D1 / D2 / D3 /	8
			d.	SLTA	10
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	9
			c.	Gol.III	16
			d.	Gol.IV	5
			4	Jumlah Pejabat Struktural	16
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	19
14	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1	Jumlah Pegawai	37
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	4
			b.	D4 / S1	20
			c.	D1 / D2 / D3 /	7
			d.	SLTA	6
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	9
			c.	Gol.III	20
			d.	Gol.IV	8
			4	Jumlah Pejabat Struktural	19
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	18
15	Urusan Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan	1	Jumlah Pegawai	37
	Masyarakat dan Desa	Masyarakat dan Kampung	2	Pendidikan	



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			a.	S2 / S3	2
			b.	D4 / S1	20
			c.	D1 / D2 / D3 /	2
			d.	SLTA	12
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
		3		Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	12
			c.	Gol.III	21
			d.	Gol.IV	4
		4		Jumlah Pejabat Struktural	16
		5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
		6		Jumlah Staf	21
16	Urusan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	Jumlah Pegawai	31
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	5
			b.	D4 / S1	11
			c.	D1 / D2 / D3 /	3
			d.	SLTA	11
			e.	SLTP	1
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	1
			b.	Gol.II	13
			c.	Gol.III	11
			d.	Gol.IV	6
			4	Jumlah Pejabat Struktural	12
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	19
17	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	1	Jumlah Pegawai	158
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	19
			b.	D4 / S1	65
			c.	D1 / D2 / D3 /	9
			d.	SLTA	48
			e.	SLTP	9
			f.	SD	8
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	15
			b.	Gol.II	43
			c.	Gol.III	81
			d.	Gol.IV	19
			4	Jumlah Pejabat Struktural	44
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	114
		Sekretariat DPRD	1	Jumlah Pegawai	38



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	3
				b.	D4 / S1	17
				c.	D1 / D2 / D3 /	-
				d.	SLTA	15
				e.	SLTP	1
				f.	SD	1
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	1
				b.	Gol.II	15
				c.	Gol.III	17
				d.	Gol.IV	5
			4		Jumlah Pejabat Struktural	10
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	28
		Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1		Jumlah Pegawai	83
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	8
				b.	D4 / S1	37
				c.	D1 / D2 / D3 /	11
				d.	SLTA	27
				e.	SLTP	-
				f.	SD	-
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	-
				b.	Gol.II	22
				c.	Gol.III	54
				d.	Gol.IV	7
			4		Jumlah Pejabat Struktural	29
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	54
		Inspektorat	1		Jumlah Pegawai	51
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	9
				b.	D4 / S1	33
				c.	D1 / D2 / D3 /	2
				d.	SLTA	6
				e.	SLTP	1
				f.	SD	-
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	1
				b.	Gol.II	6
				c.	Gol.III	31
				d.	Gol.IV	13
			4		Jumlah Pejabat Struktural	10
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	19
			6		Jumlah Staf	22



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		Jumlah Pegawai	60
		2		Pendidikan	
			a.	S2 / S3	2
			b.	D4 / S1	42
			c.	D1 / D2 / D3 /	4
			d.	SLTA	13
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
		3		Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	13
			c.	Gol.III	43
			d.	Gol.IV	3
		4		Jumlah Pejabat Struktural	20
		5		Jumlah Pejabat Fungsional	3
		6		Jumlah Staf	37
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1		Jumlah Pegawai	37
		2		Pendidikan	
			a.	S2 / S3	9
			b.	D4 / S1	26
			c.	D1 / D2 / D3 /	3
			d.	SLTA	7
			e.	SLTP	2
			f.	SD	-
		3		Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	1
			b.	Gol.II	8
			c.	Gol.III	32
			d.	Gol.IV	6
		4		Jumlah Pejabat Struktural	25
		5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
		6		Jumlah Staf	22
	Distrik Fakfak	1		Jumlah Pegawai	41
		2		Pendidikan	
			a.	S2 / S3	2
			b.	D4 / S1	17
			c.	D1 / D2 / D3 /	4
			d.	SLTA	16
			e.	SLTP	2
			f.	SD	-
		3		Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	2
			b.	Gol.II	11
			c.	Gol.III	28
			d.	Gol.IV	-
		4		Jumlah Pejabat Struktural	14
		5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
		6		Jumlah Staf	24



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

		Distrik Fakfak Barat				
			1		Jumlah Pegawai	35
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	3
				b.	D4 / S1	8
				c.	D1 / D2 / D3 /	1
				d.	SLTA	16
				e.	SLTP	3
				f.	SD	4
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	7
				b.	Gol.II	14
				c.	Gol.III	13
				d.	Gol.IV	1
			4		Jumlah Pejabat Struktural	7
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	28
		Distrik Karas				
			1		Jumlah Pegawai	27
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	-
				b.	D4 / S1	8
				c.	D1 / D2 / D3 /	1
				d.	SLTA	12
				e.	SLTP	4
				f.	SD	2
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	6
				b.	Gol.II	12
				c.	Gol.III	9
				d.	Gol.IV	-
			4		Jumlah Pejabat Struktural	6
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	21
		Distrik Fakfak Tengah				
			1		Jumlah Pegawai	37
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	1
				b.	D4 / S1	5
				c.	D1 / D2 / D3 /	2
				d.	SLTA	19
				e.	SLTP	6
				f.	SD	2
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	6
				b.	Gol.II	20
				c.	Gol.III	11
				d.	Gol.IV	-
			4		Jumlah Pejabat Struktural	11
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			6		Jumlah Staf	37
		Distrik Kokas	1		Jumlah Pegawai	39
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	-
				b.	D4 / S1	12
				c.	D1 / D2 / D3 /	3
				d.	SLTA	15
				e.	SLTP	8
				f.	SD	1
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	4
				b.	Gol.II	20
				c.	Gol.III	15
				d.	Gol.IV	-
			4		Jumlah Pejabat Struktural	12
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	27
		Distrik Teluk Patipi	1		Jumlah Pegawai	32
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	1
				b.	D4 / S1	8
				c.	D1 / D2 / D3 /	3
				d.	SLTA	12
				e.	SLTP	4
				f.	SD	3
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	7
				b.	Gol.II	12
				c.	Gol.III	12
				d.	Gol.IV	12
			4		Jumlah Pejabat Struktural	8
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	23
		Distrik Bomberay	1		Jumlah Pegawai	23
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	1
				b.	D4 / S1	6
				c.	D1 / D2 / D3 /	2
				d.	SLTA	11
				e.	SLTP	3
				f.	SD	-
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	3
				b.	Gol.II	11
				c.	Gol.III	9
				d.	Gol.IV	-
			4		Jumlah Pejabat Struktural	4



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	19
		Distrik Fakfak Timur	1		Jumlah Pegawai	23
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	-
				b.	D4 / S1	8
				c.	D1 / D2 / D3 /	-
				d.	SLTA	7
				e.	SLTP	2
				f.	SD	6
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	8
				b.	Gol.II	4
				c.	Gol.III	10
				d.	Gol.IV	1
			4		Jumlah Pejabat Struktural	7
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	16
		Distrik Kramongmongga	1		Jumlah Pegawai	30
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	1
				b.	D4 / S1	7
				c.	D1 / D2 / D3 /	3
				d.	SLTA	12
				e.	SLTP	5
				f.	SD	2
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	7
				b.	Gol.II	11
				c.	Gol.III	11
				d.	Gol.IV	1
			4		Jumlah Pejabat Struktural	7
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	23
		Distrik Pariwari	1		Jumlah Pegawai	55
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	1
				b.	D4 / S1	28
				c.	D1 / D2 / D3 /	4
				d.	SLTA	17
				e.	SLTP	4
				f.	SD	1
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	4
				b.	Gol.II	17
				c.	Gol.III	33
				d.	Gol.IV	1



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			4		Jumlah Pejabat Struktural	20
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	35
		Distrik Wartutin	1		Jumlah Pegawai	17
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	1
				b.	D4 / S1	8
				c.	D1 / D2 / D3 /	1
				d.	SLTA	6
				e.	SLTP	1
				f.	SD	-
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	-
				b.	Gol.II	6
				c.	Gol.III	10
				d.	Gol.IV	1
			4		Jumlah Pejabat Struktural	5
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	10
		Distrik Fakfak Timur Tengah	1		Jumlah Pegawai	19
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	-
				b.	D4 / S1	6
				c.	D1 / D2 / D3 /	3
				d.	SLTA	7
				e.	SLTP	3
				f.	SD	-
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	2
				b.	Gol.II	9
				c.	Gol.III	7
				d.	Gol.IV	1
			4		Jumlah Pejabat Struktural	8
			5		Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6		Jumlah Staf	8
		Distrik Arguni	1		Jumlah Pegawai	13
			2		Pendidikan	
				a.	S2 / S3	-
				b.	D4 / S1	8
				c.	D1 / D2 / D3 /	-
				d.	SLTA	4
				e.	SLTP	1
				f.	SD	-
			3		Pangkat/Golongan	
				a.	Gol.I	-
				b.	Gol.II	5
				c.	Gol.III	7



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			d.	Gol.IV	1
			4	Jumlah Pejabat Struktural	7
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	6
		Distrik Mbahamdandara	1	Jumlah Pegawai	10
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	-
			b.	D4 / S1	5
			c.	D1 / D2 / D3 /	-
			d.	SLTA	1
			e.	SLTP	2
			f.	SD	2
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	3
			b.	Gol.II	2
			c.	Gol.III	4
			d.	Gol.IV	1
			4	Jumlah Pejabat Struktural	5
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	5
		Distrik Kayauni	1	Jumlah Pegawai	15
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	1
			b.	D4 / S1	5
			c.	D1 / D2 / D3 /	1
			d.	SLTA	6
			e.	SLTP	-
			f.	SD	2
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	8
			c.	Gol.III	10
			d.	Gol.IV	1
			4	Jumlah Pejabat Struktural	6
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	9
		Distrik Furwagi	1	Jumlah Pegawai	16
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	-
			b.	D4 / S1	9
			c.	D1 / D2 / D3 /	1
			d.	SLTA	6
			e.	SLTP	-
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	6



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			c.	Gol.III	9
			d.	Gol.IV	1
			4	Jumlah Pejabat Struktural	6
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	10
		Distrik Tomage	1	Jumlah Pegawai	16
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	-
			b.	D4 / S1	9
			c.	D1 / D2 / D3 /	-
			d.	SLTA	6
			e.	SLTP	-
			f.	SD	1
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	1
			b.	Gol.II	5
			c.	Gol.III	8
			d.	Gol.IV	1
			4	Jumlah Pejabat Struktural	4
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	15

2. Urusan Pilihan

NO	NAMA URUSAN	NAMA SKPD	URAIAN		2023
1	2	3	4		5
1	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Jumlah Pegawai	207
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	9
			b.	D4 / S1	77
			c.	D1 / D2 / D3 /	16
			d.	SLTA	33
			e.	SLTP	4
			f.	SD	1
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	6
			b.	Gol.II	33
			c.	Gol.III	91
			d.	Gol.IV	13
			4	Jumlah Pejabat Struktural	25
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	42
			6	Jumlah Staf	75
		Dinas Perkebunan	1	Jumlah Pegawai	36
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	5
			b.	D4 / S1	15
			c.	D1 / D2 / D3 /	3
			d.	SLTA	12



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

			e.	SLTP	1
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	1
			b.	Gol.II	10
			c.	Gol.III	19
			d.	Gol.IV	6
			4	Jumlah Pejabat Struktural	14
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	22
2	Urusan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan	1	Jumlah Pegawai	51
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	3
			b.	D4 / S1	27
			c.	D1 / D2 / D3 /	8
			d.	SLTA	12
			e.	SLTP	1
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	1
			b.	Gol.II	9
			c.	Gol.III	36
			d.	Gol.IV	3
			4	Jumlah Pejabat Struktural	16
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	17
3	Urusan Perdagangan Urusan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	Jumlah Pegawai	34
			2	Pendidikan	
			a.	S2 / S3	6
			b.	D4 / S1	17
			c.	D1 / D2 / D3 /	5
			d.	SLTA	7
			e.	SLTP	1
			f.	SD	-
			3	Pangkat/Golongan	
			a.	Gol.I	-
			b.	Gol.II	1
			c.	Gol.III	4
			d.	Gol.IV	11
			4	Jumlah Pejabat Struktural	25
			5	Jumlah Pejabat Fungsional	-
			6	Jumlah Staf	11